

**MEDIASI JERMAN DALAM UPAYA PERDAMAIAN
KONFLIK UKRAINA-RUSIA TAHUN 2014**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Hubungan Internasional Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Oleh:

Virda Yasmin Ramizha

105120407121007

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

2017

LEMBAR PERSETUJUAN

**Mediasi Jerman dalam Upaya Perdamaian Konflik Ukraina-Rusia
Tahun 2014**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

VIRDA YASMIN RAMIZHA

105120407121007

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

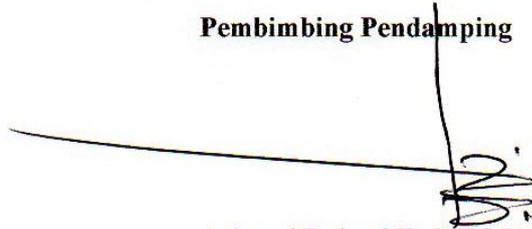
Tanggal 28 Februari 2017

Pembimbing Utama



Asih Purwanti, S.IP,M.IP
NIK.2010117710292001

Pembimbing Pendamping



Achmad Fathoni K, S.IP,MA
NIK.200906820123001

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hubungan Internasional**



Dian Mutmainah S.IP,MA
NIP.197803192005012002

LEMBAR PENGESAHAN

**Mediasi Jerman dalam Upaya Perdamaian Konflik Ukraina-Rusia
Tahun 2014**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

VIRDA YASMIN RAMIZHA

105120407121007

Telah dinyatakan LULUS dalam ujian Sarjana pada Tanggal 26 Oktober 2016

Ketua Majelis Penguji



Dian Mutmainah S. IP, MA
NIP.197803192005012002

Sekretaris Majelis Penguji



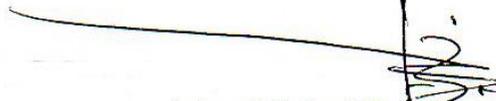
Yustika Citra Mahendra, S. Sos, MA
NIP.198408232015041001

Anggota Penguji I



Asih Purwanti, S. IP, M. IP
NIK.2010117710292001

Anggota Penguji II



Achmad Fathoni K., S. IP, MA
NIK.200906820123001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Unti Lucigdo, SE, M.Si., Ak.
NIP.196908141994021001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Virda Yasmin Ramizha

NIM : 105120407121007

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul “**MEDIASI JERMAN DALAM UPAYA PERDAMAIAN KONFLIK UKRAINA-RUSIA TAHUN 2014** ” adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda catatan kaki dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 30 Juni 2017

Yang membuat pernyataan



Virda Yasmin Ramizha
NIM.105120407121007

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, ribuan shalawat terucap kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai pancaran ilmu Allah di dunia sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab akhir perkuliahan dalam skripsi yang berjudul “*Mediasi Jerman dalam Upaya Perdamaian Konflik Ukraina-Rusia Tahun 2014*” dengan lancar dan tepat waktu.

Selain sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, skripsi yang disusun oleh penulis merupakan hasil ketertarikan penulis terhadap isu krisis Ukraina dan kepemimpinan Jerman di regional Eropa dalam upaya mediasinya menyelesaikan konflik di Ukraina.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan skripsi sehingga penulis terus bersemangat dan berjuang dalam menyelesaikannya, yaitu:

1. Puguh Ruminto dan Sri Suryani, sebagai orang tua penulis yang tak tak henti memberikan dukungan moral dan materil, do’a tiada henti setiap saat; serta kedua jagoan Rizal Lutfianto dan Reyhan Salsabil yang senantiasa memberi dukungan sehingga penulis dapat sampai di tahap penyelesaian skripsi.
2. Ibu Asih Purwanti selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih atas segala kesabaran, ketelatenan, dan ketegasan ibu selama membimbing penulis serta pelajaran hidup yang ibu bagikan sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan sebaik-baiknya.
3. Bapak Achmad Fathony selaku dosen pembimbing pendamping penulis. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk membimbing dan memberikan masukan dalam perbaikan skripsi penulis.

4. Ibu Dian Muthmainah dan Bapak Yustika Citra Mahendra selaku bagian dari dewan penguji atas diskusi, kritik, dan saran sehingga dapat memaksimalkan penulisan skripsi penulis.
5. Mas Dadang dan staf Program Studi HI lainnya yang selalu siap sedia dalam memenuhi kebutuhan administrasi selama perkuliahan rutin, ujian PKN, seminar proposal, hingga ujian skripsi.
6. *Sisters till Jannah* Wahyu Rachmadhani dan Baiq Marinda Ariyana yang terus bersama saya hingga saat ini. Maulana Rizqi dan Diah Puspita, teman terbaik saat normal dan tidak normal. Alfath Utomo yang siap sedia setiap saat bagai rexona, Aditya Alhafizh yang dukungannya tidak pernah putus meskipun berjarak 1.400 kilometer.
7. Teman-Teman D. HI.Ing 2010, Annisa Fitri yang menjadikan rumahnya sebagai tempat singgah-ku, Ciptadi Putra my always prince, Hepi Hepi squad, Geng Ogi dan rumahnya yang menyimpan banyak cerita, terima kasih banyak teman.
8. Claudia Yusron, *sister* yang dengan sukarela membantu mengurus administrasi pengumpulan skripsi penulis, May Allah bless you.
9. Kelompencapir, AIESECer, dan teman-teman IFL yang memberikan *positive vibes* selama perkuliahan, yang membantu penulis untuk terus berkembang, terima kasih sudah menjadi wadah penulis untuk memaksimalkan potensi yang ada.
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Malang,
30 Juni 2017

Virida Yasmin Ramizh

ABSTRAK

Peran strategis Jerman di kawasan Eropa merupakan salah satu pandangan politik Jerman pada masa kepemimpinan Angela Merkel. Kuatnya pertumbuhan ekonomi Jerman di tahun 2014 juga mampu membawa Jerman sebagai strategic player di kawasan. Melalui *2014 Review: understanding tomorrow's foreign policy*, Menteri Luar Negeri Jerman memperjelas peran Jerman dalam perpolitikan internasional.

Konflik Ukraina dan Rusia membuktikan Jerman mampu berperan penting di antara negara Barat dan Timur melalui posisi strategisnya. Jerman mengupayakan berbagai upaya mediasi yang diinisiasi pemerintah Jerman dimana Jerman sendiri berperan sebagai mediator melalui kerangka manajemen krisis sebagai bentuk kebijakan luar negeri Jerman pada konflik internasional tersebut.

Perubahan orientasi politik Jerman tentunya disertai oleh beberapa factor baik itu internal, eksternal dan kepemimpinan Merkel itu sendiri. Konflik Ukraina telah menarik perhatian masyarakat Jerman yang ditunjukkan melalui berbagai aksi yang menuntut pemerintah Jerman mengambil sikap atas konflik yang terjadi. Konflik yang bermula dari isu internal namun pasca aksi militer yang dilakukan Rusia, konflik tersebut mengalami perubahan isu krisis menjadi pelanggaran HAM. Kepemimpinan Merkel yang pragmatis juga mampu memberikan nilai lebih dimana Merkel menghabiskan masa kecilnya di Jerman Timur sehingga mampu menjadi komunikator yang baik antar negara-negara Eropa Timur dan juga Rusia.

Dengan peran strategis Jerman di konflik Ukraina mendorong ketertarikan untuk meneliti factor-faktor yang mempengaruhi Jerman dalam upaya mediasi konflik Ukraina tersebut. Penelitian ini menggunakan model Adaptif politik luar negeri milik J. N Rosenau. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara mendalam factor-faktor politik yang mempengaruhi keputusan Jerman dalam konflik Ukraina di tahun 2014.

Kata Kunci: Upaya Mediasi, Jerman, konflik Ukraina, Model Adaptif

ABSTRACT

Asia Pacific has important role in global economy that is proved by growth rate accomplishment for almost 40% in 2014, so that making this region considerable in terms of trade cooperation. Trans-Pacific Partnership (TPP) is mega-regional free trade comprised of 12 countries in Asia Pacific. It is signed by member countries in 2016.

Japan is one of the member countries that officially joined on TPP in July 2013. After its participation, interest groups and politicians show their denial on TPP. They insist on government protecting five key agricultural products from tariff elimination. In order to attain its national interest, Japan must negotiate at international level and get approval from domestic. However, Japan faces dilemma because most of the TPP's chapters are approved by other member countries and refusal from domestic. Even so, this condition does not prevent Japan to achieve approval at domestic or international and quickly ratify TPP in December 2016.

By looking at the rapid ratification, interests in doing research on TPP issues in Japan also increases. This research will analyze the process of Japan in TPP ratification by using international relations theory particularly on international political negotiation, two-level games which is put forward by Robert D. Putnam. This research hopefully can explain deeply about ratification process of Japan on TPP from 2013 until 2016 through domestic and international level.

Keywords: Trans-Pacific Partnership, Japan, ratification, two-level games, domestic, international

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pernyataan Orisinalitas	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak.....	v
Abstract.....	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Grafik	ix
Daftar Tabel.....	x
Daftar Singkatan.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah.....	7
I.3. Tujuan	8
I.4. Manfaat	8
I.4.1. Manfaat Akademis	8
I.4.2. Manfaat Praktis	8
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Studi Terdahulu	9
2.2. Definisi Konseptual.....	12
2.2.1. Kebijakan Luar Negeri.....	12
2.2.2. Model Adaptif (<i>The Adaptive Model</i>).....	16
2.3. Operasionalisasi Konsep	24
2.3.1. Upaya Jerman di Uni Eropa dalam resolusi konflik Ukraina	26
2.4 Kerangka Berfikir.....	28
2.5 Argumen Utama	29

BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1.	Jenis Penelitian 30
3.2.	Ruang Lingkup 30
3.3.	Teknik Pengumpulan Data..... 31
3.4.	Teknik Analisis Data 31
3.4.	Sistematika Penulisan 31
BAB 4 GAMBARAN UMUM	
4.1.	Politik Luar Negeri Jerman pada tahun 2005-2014 34
4.2.	Krisis Ukraina pada tahun 2014..... 41
BAB 5 Analisis Politik Adaptasi Jerman terhadap Perubahan <i>External, Internal, Leadership</i> dalam Upaya Diplomasi pada Resolusi Konflik Ukraina	
5.1.	<i>External Change</i> : Adanya Perubahan Isu Area yang Berpengaruh pada Upaya Diplomasi Jerman dalam Resolusi Konflik Ukraina..... 48
5.1.1	<i>Great Power Structure</i> (Struktur Tatanan Global)..... 48
5.1.2	Hubungan Aliansi..... 53
5.1.2	Isu Area Krisis..... 56
5.2	<i>Internal Change</i> : Adanya Perubahan Internal Jerman yang Berpengaruh pada Upaya Diplomasi Jerman dalam Resolusi Konflik Ukraina 61
5.2.1	Geografi Jerman..... 61
5.2.2	<i>Size</i> (Populasi dan Ketersediaan Sumber Daya Alam) 64
5.2.3	Sosial Budaya..... 69
5.2.4	Pembangunan Ekonomi 71
5.2.5	Opini Publik..... 74
5.2.6	Struktur Pemerintahan..... 83
5.3	<i>Leadership Change</i> : Nilai dan Karakter Angela Merkel yang Mendorong Upaya Diplomasi Jerman pada Resolusi Konflik Ukraina 87
5.3.1	Pernyataan Resmi Angela Merkel terkait Krisis Ukraina 95
BAB 6 PENUTUP	
6.1.	Kesimpulan..... 105
6.2.	Saran..... 107p
	Daftar Pustaka 109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Ukraina	42
Gambar 2. Peta Jerman.....	62
Gambar 3. Angela Merkel	42

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Tingkat Pertumbuhan Penduduk Jerman	65
Grafik 2. Tingkat Pertumbuhan GDP Jerman	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Operasionalisasi Model Apaktif	42
Tabel 2. Krisis Ukraina dari Tahun ke Tahun	43

DAFTAR SINGKATAN

- AA : *Association Agreement*
- A&D : *Aerospace & Defense*
- BRIC : Brazil, Rusia, India, Cina
- CDU : Christian Democratic Union
- FTA : *Free Trade Area*
- GDP : *Gross Domestic Product*
- GNP : *Gross National Product*
- HAM : Hak Asasi Manusia
- NATO : *North Atlantic Treaty Organization*
- OSCE : *Organization for Security and Cooperation of Europe*
- PBB : Perserikatan Bangsa Bangsa
- SDP : *Social Democratic Party*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aksi militer Rusia pada krisis Ukraina di tahun 2014 telah membawa Jerman sebagai negara di kawasan Eropa yang berperan penting di antara negara-negara Barat dan Timur melalui posisi strategisnya. Pasca kejadian tersebut, dalam konferensi keamanan Munich di tahun 2014, Presiden Jerman, Joachim Gauck, menyampaikan bahwa Jerman akan lebih berperan penting dalam konflik internasional dengan lebih menekankan pada nilai-nilai kebijakan luar negeri yang lebih bertanggung jawab dan tegas. Pada pidatonya tersebut, Jerman menunjukkan kesiapannya untuk lebih aktif dalam *international engagement* dimana kemudian krisis Krimea menjadi tantangan pertama untuk politik luar negeri Jerman yang lebih aktif.¹

Jerman menyatakan kekecewaan atas aksi Rusia di Ukraina melalui pernyataan Angela Merkel di *Bundestag* (parlemen) yaitu:

*“Russia’s actions in Ukraine undoubtedly represent a violation of fundamental principles of international law....it is vital that we do not simply return to business as usual. The conflict cannot be solved by military means: military action is not an option for us.”*²

Pernyataan Jerman tersebut diikuti oleh berbagai upaya mediasi yang diinisiasi pemerintah Jerman. Jerman secara aktif berperan sebagai mediator yang

¹Joachim Gauck, 2014, “*Speech to open 50th Munich Security Conference*”, diakses melalui <http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/EN/JoachimGauck/Reden/2014/140131-Munich-Security-Conference.html> pada 21 Desember 2015

²Pidato Angela Merkel di Bundestag, 2014, *Policy Statement by Federal Chancellor Angela Merkel on the situation in Ukraine*, diakses melalui https://bundesregierung.de/Content/EN/Reden/2014/2014-03-13-regierungserklaerung-ukraine_en.html (Diakses pada 11 Desember 2015)

mengupayakan resolusi konflik melalui kerangka manajemen krisis sebagai kebijakan luar negeri Jerman terhadap krisis Ukraina.³ Sikap politik Jerman tersebut diperjelas melalui pernyataan resmi Angela Merkel:

*“This government along with our partners is pursuing a three-pronged political and economic approach. First we are working hard to establish a diplomatic solution through observer mission and a contact or coordination group...we are seeking through these means to find a political and diplomatic solution to the crisis.”*⁴

maka krisis Ukraina ini kemudian menjadi tantangan baru bagi kebijakan luar negeri Jerman di kawasan Eropa. Pemerintah Jerman menyatakan tiga poin penting terkait kebijakan luar negerinya pada krisis Ukraina yaitu upaya diplomasi tanpa kekerasan dan militer, tekanan ekonomi melalui sanksi, dan revitalisasi Ukraina.

Krisis Ukraina yang sudah berlangsung sejak tahun 2013 akibat perbedaan pandangan politik dan sosial pada internal Ukraina telah menunjukkan dinamika baru dalam perpolitikan di kawasan Eropa, termasuk juga respon Jerman terhadap krisis tersebut. Pasca terpilihnya Vladimir Putin pada kursi kepresidenan Rusia di tahun 2012, intensitas keterlibatan Rusia dalam konflik sipil di Ukraina semakin meningkat. Konflik yang bermula dari protes atas penolakan perjanjian kerjasama antara Ukraina dengan Uni Eropa oleh masyarakat pro Ukraina Barat di tahun 2013 ini menarik perhatian masyarakat internasional karena eskalasi konflik yang semakin meningkat. Pada tanggal 20 Februari 2014, eskalasi krisis mencapai kondisi terburuk hingga

³Mathias Bolinger. 2015. “How Crimea Changed Germany’s International Role” diakses melalui <http://www.dw.com/en/how-crimea-changed-germanys-international-role/a-18322004> pada 20 Maret 2016.

⁴Angela Merkel, *Ibid.*

menimbulkan 100 korban jiwa dari aksi protes yang berlangsung.⁵ Pergolakan politik tersebut semakin diperparah ketika Rusia menolak adanya otoritas baru di Ukraina dan justru melalui Menteri Luar Negerinya, Rusia mengakui hasil referendum yang dilaksanakan Republik Otoritas Krimea⁶ dengan hasil berupa deklarasi kemerdekaan dan keputusan untuk bergabung dengan Rusia.⁷

Pola respon Jerman dalam menanggapi krisis Ukraina tidak terlepas dari peran dan pengaruhnya yang kuat di Uni Eropa. Posisi Jerman sebagai pemimpin kebijakan moneter Uni Eropa dalam *European Central Bank* dalam beberapa tahun terakhir serta sebagai pelopor inisiatif perluasan Uni Eropa menjadikan Jerman *leading power* di Uni Eropa. Terlebih di saat yang sama Jerman juga mendefinisikan diri sebagai negara yang mampu menjadi penyeimbang bagi Uni Eropa untuk menjadi posisi strategis antara Rusia dan Eropa Timur-Tengah.⁸ Oleh karena itu pasca peran pentingnya dalam krisis Eropa lalu, saat ini Jerman menjadi salah satu negara di Uni Eropa yang memegang kendali kepemimpinan atas krisis Ukraina dengan menginisiasi berbagai upaya dalam resolusi konflik Ukraina.

Pasca reunifikasi di tahun 1990, Jerman menjadi salah satu negara anggota Uni Eropa dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Dalam hitungan *Gross*

⁵ Diakses melalui <http://www.aicgs.org/publication/ostpolitik-reset/>

⁶Krimea adalah salah satu wilayah yang berada di Ukraina Selatan tepatnya di Peninsula Krimea. Wilayah ini menjadi kawasan etnis Rusia terbanyak dibanding kawasan lain. Pada tahun 1992 terjadi ketegangan etnis karena penduduk Krimea ingin memisahkan diri dari Ukraina. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Ukraina member otonomi khusus budaya dan ekonomi dengan tetap dalam kesatuan Ukraina. Dewan Kementerian Republik Otonomi Krimea, *Regional Profile: The Autonomous Republic of Crimea*. 2013. hal. 2.

⁷ Tadeusz Iwanski, 2014, *Russian Policy towards Ukraine: Not Just Crimea*. OSW.

⁸ M. Werbowski. *Germany's Dominant Role in European Union* dalam <http://www.globalresearch.ca/germanys-dominant-role-in-the-european-union/5326785> (Diakses pada 5 November 2015)

Domestic Products (GDP), Jerman menempati posisi ke-4 dunia setelah AS, Cina, dan Jepang dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,74% di tahun 2014.⁹ Potensi ekonomi Jerman yang meningkat tersebut menjadikan Jerman sebagai *key player* dalam perekonomian global. Selain itu, kondisi geografis Jerman yang sangat luas serta berada di antara Eropa Barat dan Eropa Timur memberikan peluang geopolitik yang besar bagi Jerman sehingga Jerman bisa memainkan tujuan politik luar negerinya melalui Uni Eropa.

Terkait krisis Ukraina, sejak awal munculnya protes Euromaidan, Menteri Luar Negeri Jerman, Frank Walter Steinmeier yang dilantik pada 17 Desember 2013, menyatakan penolakan jika Jerman harus melakukan upaya mediasi pada krisis Ukraina dan menyatakan bahwa krisis tersebut menjadi tanggung jawab Uni Eropa.¹⁰ Namun setelah eskalasi konflik pada Februari 2014, Jerman secara aktif menginisiasi dialog dan negosiasi dengan menjadi mediator dalam upaya resolusi konflik Ukraina.¹¹ Sikap politik Jerman diawali dengan pertemuan *Weinmar Triangle* yang telah menjadi forum dialog trilateral Prancis dan Polandia sejak tahun 1991. Dalam pertemuan tersebut, Angela Merkel bersama Frank Walter Steinmeier mengupayakan penghentian kekerasan antara aparat pemerintahan Victor Yanukovich dan demonstran.¹² Namun, hasil dari *Weimar Triangle* yang berupa gencatan senjata tidak bertahan lama akibat Victor Yanukovich melarikan diri hingga Rusia memutuskan untuk menempatkan

⁹Ulrich Speck, 2014, “*Foundations of German Power*” diakses melalui <http://carnegieeurope.eu/2014/03/14/foundations-of-german-power#> pada 5 Desember 2015

¹⁰“*Steinmeier lehnt eine Vermittlerrolle ab*”, 2013, *Die Welt*, diakses melalui at: <www.welt.de>.

¹¹Mathias Bolinger, OpCit.

¹²Andreas Rinke. 2014. *How Putin Lost Berlin: Moscow's Annexion of Crimea Changed Germany's Policies towards Russia*, *Internationale Politik* 69, no. 3

pasukannya di Ukraina. Aksi Rusia tersebut kemudian dilihat sebagai intervensi Rusia dengan skala yang lebih besar pada Ukraina hingga memicu eskalasi konflik yang semakin meningkat.

Kegagalan dialog pada pertemuan Weimar tersebut tidak menghentikan Jerman dalam peran pentingnya sebagai mediator. Di awal Juni 2014, Jerman memperkuat perannya pada *Organization for Security and Cooperation of Europe* (OSCE) dengan menginisiasi *trilateral group* bersama Presiden Swiss yang selanjutnya menghasilkan keputusan Minsk antara Rusia, Kiev dan perwakilan masyarakat pro-Rusia.¹³ Selain itu, upaya diplomasi dan negosiasi Jerman terhadap Rusia pun dilakukan pada tingkatan elit kedua negara dengan intensitas yang cukup tinggi. Kanselir Angela Merkel dan Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier mengedepankan komunikasi dua arah melalui percakapan telepon dengan Presiden Vladimir Putin (tercatat sebanyak 40 komunikasi via telepon) dan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov; ataupun kunjungan kenegaraan.¹⁴

Komitmen Jerman dalam mengambil peran aktif sebagai mediator dalam beberapa upaya resolusi konflik Ukraina menunjukkan keseriusan Jerman untuk terlibat aktif dalam krisis internasional. Sikap politik Jerman yang selama ini dibuktikan pada krisis Ukraina tersebut sesuai dengan pandangan yang diharapkan

¹³Stefan Lehne, "Reviving OSCE: European Security and Ukraine Crisis", diakses melalui <http://carnegieeurope.eu/2015/09/22/reviving-osce-european-security-and-ukraine-crisis/ii06> pada 1 April 2016

¹⁴Anna Kwiatkowska-Drosdz dan Konrad Poplawski, 2014, "The German Reaction to the Russian-Ukrainian conflict – Shock and Disbelief", OSW.

Steinmeier di akhir tahun 2003. Steinmeier memproyeksikan tujuan jangka panjang politik luar negeri Jerman sebagai pemimpin kawasan.¹⁵

Respon Jerman terhadap konflik Ukraina ini kemudian menjadi tantangan baru dalam kebijakan luar negerinya karena sejak Angela Merkel menduduki jabatan kanselir di tahun 2005, Jerman tidak mengambil peran penting terlebih posisi terdepan dalam konflik internasional.¹⁶ Pola respon Jerman terhadap Rusia dalam konflik Ukraina ini berbeda dengan respon-respon Jerman terhadap Rusia pada konflik-konflik sebelumnya khususnya pada masa kepemimpinan Angela Merkel. Sebagai contoh, pada masa kepemimpinan Kanselir Gerhard Schroeder, Jerman pernah mengecam aksi Rusia atas Georgia di Osetia Selatan namun kecaman tersebut dianggap kurang asertif dan tidak mengupayakan negosiasi tetapi mengembalikan keadaan pada “*business as usual*” dengan Russia¹⁷ untuk menstabilkan keadaan.¹⁸ Kepemimpinan Gerhard Schroeder juga menunjukkan tidak adanya signifikansi dalam upaya diplomasi *Orange War*. Namun saat ini Jerman dituntut untuk lebih aktif dalam menunjukkan tanggung jawabnya sebagai negara yang berpengaruh di kawasan melalui kebijakan atau tindakan yang lebih asertif terhadap konflik internasional.¹⁹

¹⁵Federal Foreign Office, 2015, “*Review 2014: A Fresh Look at Foreign Policy*”, Berlin: Federal Foreign Office. Diakses melalui <http://www.auswaertigesamt.de/cae/servlet/contentblob/699442/publicationFile/202977/Schlussbericht.pdf>. Hal. 47

¹⁶ Ulrich Speck. 2015. *Stopping Putin: Can Merkel Succeed without Force?* dalam <https://www.newsweek.com/stopping-putin-can-merkel-succeed-without-force-319086> (Diakses pada 28 Agustus 2015)

¹⁷ Hannes Adomeit. *Ibid.* Hal. 23

¹⁸ Andrew Moravcsik pada review *Germany, Russia, and the Rise of Geo-Economics; The Paradox of German Power* dalam <https://www.foreignaffairs.com/reviews/2015-08-13/germany-russia-and-rise-geo-economics-paradox-german-power> (Diakses pada 24 Desember 2015)

¹⁹ C. Nunlist. *More Responsibility? German Foreign Policy in 2014* (149) dalam *CSS Analysis in Security Policy*. Hal. 2

Berdasarkan sikap berupa respon Jerman atas krisis internasional yang semula tidak terlihat aktif dalam penyelesaian konflik internasional dan lebih menekankan “*business as usual*” kepada Rusia menjadi lebih asertif dengan menjadi mediator dan menginisiasi berbagai upaya resolusi konflik Ukraina ini menjadi kasus percobaan bagi kebijakan luar negeri. Penulis melihat sikap Jerman tersebut menunjukkan bahwa Jerman melakukan adaptasi atas perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya hingga memutuskan untuk terlibat aktif dalam resolusi konflik Ukraina.

1.2. Rumusan Masalah

Pertanyaan yang mendasari penelitian ini adalah bagaimana model adaptif politik luar negeri Jerman dalam **upaya diplomasi pada resolusi konflik Ukraina di tahun 2014?**

1.3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan kebijakan luar negeri Jerman terkait upaya mediasi yang dilakukan pada resolusi konflik Ukraina 2014.
2. Menjelaskan model adaptif berupa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Jerman pada konflik Ukraina.

1.4. Manfaat

1.4.1. Manfaat Akademis

1. Sebagai bahan kajian dalam membangun pemikiran dan pengembangan ilmu Hubungan Internasional secara khusus, dan ilmu sosial secara umum.
2. Memberi sumbangan informasi bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk mengkaji permasalahan yang sama.
3. Sebagai bekal wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan menganalisis fenomena HI.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Mendapatkan fenomena Hubungan Internasional terkait perubahan Kebijakan Luar Negeri Jerman.
2. Memperoleh informasi-informasi terbaru seputar hubungan internasional.
3. Mengetahui dinamika hubungan internasional yang saling mempengaruhi satu sama lain.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini penulis menjelaskan studi terdahulu dan kajian teori mengenai perspektif kebijakan luar negeri termasuk di dalamnya menjelaskan konsep dasar politik luar negeri. Selanjutnya analisis kebijakan luar negeri tersebut digambarkan oleh operasionalisasi konsep yang menjelaskan fenomena dari penelitian ini. Untuk menggambarkan arah penelitian ini agar terfokus, penulis menyertakan alur pemikiran pada penelitian ini. Sebagai penutup dari bab ini akan dijelaskan hipotesis penulis terkait penyebab perubahan respon Jerman terhadap Rusia di tahun 2014.

2.1. Studi Terdahulu

Studi literatur pertama yang penulis gunakan adalah tesis milik Anne Kathrin Kreft (2010) dengan judul *The weight of history: change and continuity in German foreign policy towards the Israeli-Palestinian conflict*.²⁰ Dalam tulisannya Kreft memfokuskan pada latar belakang sejarah Jerman yang panjang hingga berimplikasi pada bentuk kebijakan luar negerinya terhadap konflik Israel-Palestina. Dalam menganalisis kebijakan luar negeri Jerman, Kreft menggunakan pendekatan *Foreign Policy Analysis* dengan paradigma realis dan konstruktivis. Kreft lebih menekankan pendekatan konstruktivis karena kebijakan luar negeri Jerman terhadap Israel lebih banyak dipengaruhi oleh latar belakang sejarah. Dengan menekankan pada struktur ide,

²⁰ Anne-Kathrin Kreft, 2010, "*The weight of history: change and continuity in German foreign policy towards the Israeli-Palestinian*", WWU Masters Thesis Collection.

nilai, dan *intersubjective understanding* yang dikemukakan Alexander Wendt, Kreft menjelaskan bahwa pasca unifikasi Jerman memperoleh keuntungan sebagai negara yang berdaulat dengan bertambahnya luas wilayah, populasi, dan sumber daya. Jika dilihat dari sudut pandang realis maka kapabilitas Jerman yang semakin meningkat memungkinkan Jerman untuk meningkatkan kekuatannya dan mencapai kekuatan di posisi global. Namun, latar belakang sejarah Jerman justru memberi keyakinan yang kuat pada elit politiknya untuk mengutamakan diplomasi dan pendekatan multilateral.

Tesis ini menggunakan lima studi kasus terkait yang dapat menunjukkan pola kebijakan luar negeri Jerman terhadap Israel. Kuatnya dukungan Jerman terhadap Israel merupakan hasil dari norma *Philo-Zionism* yang terbentuk pada elit politik Jerman. Pada akhirnya, tulisan ini menunjukkan tidak adanya perubahan atau dengan kata lain kebijakan luar negeri Jerman terhadap Israel merupakan sebuah *continuity* akibat adanya nilai dan kesepakatan bersama yang terbentuk seiring dengan terbentuknya integritas kawasan sehingga sudah menjadi budaya politik Jerman dalam mengambil keputusan. Tulisan Kreft memberikan gambaran terhadap penulis atas pola perumusan kebijakan luar negeri Jerman dan pemahaman atas struktur pemerintahan yang berperan dalam pengambilan kebijakan karena subjek penelitian yang sama yaitu Jerman. Namun penulis menggunakan studi kasus yang berbeda dan lebih menjelaskan pada poin analisis kebijakan luar negeri.

Kemudian pada tulisan Kearens (2012) yang berjudul Kebijakan Luar Negeri Australia Terhadap Indonesia: Kebijakan Kontra-Terrorisme Pasca Serangan Bom Bali

I (2002-2008),²¹ penulis mengambil pemahaman mengenai kerangka analisis kebijakan luar negeri yang didasarkan pada identitas. Permasalahan yang diangkat penelitian tersebut yaitu mengapa Australia mengeluarkan kebijakan kontra terorisme dengan pendekatan *soft approach* dibanding pendekatan *hard approach*. Kearens menggambarkan hubungan Indonesia dan Australia dalam kurun waktu tertentu hinggaakhirnya Australia mengeluarkan kebijakan kontra terorisme. Dalam menjawab permasalahan tersebut, Kearens menggunakan teori kebijakan luar negeri milik Rosenau dengan perspektif model adaptif sebagai alat analisis atas faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan kebijakan tersebut.

Adapun variabel dependen yang diangkat yaitu kebijakan Australia terhadap penanganan terorisme di Indonesia dan dianalisis menggunakan variabel independen berupa perubahan internal/struktural, eksternal, dan kepemimpinan. Kearens membuktikan bahwa faktor internal yang terjadi pada saat itu yaitu pergantian partai penguasa, pergantian pemimpin, perubahan opini publik yang berkembang melalui media massa yang memberitakan kontra-terorisme kemudian mempengaruhi paradigma pemimpin dalam memutuskan kebijakan luar negeri. Faktor eksternal yang juga mempengaruhi kebijakan tersebut diantaranya penguatan isu HAM (Hak Asasi Manusia) yang semakin mengglobal dan hubungan khusus antara Amerika Serikat dan Australia.

²¹ Heggy Kearens, 2012, *Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Indonesia: Kebijakan Kontra Terorisme Pasca Serangan Bom Bali I*, dalam <http://lontar.ui.ac.id/file?file?=digital/20299886-T30458-Heggy%20Kearens-pdf>, diakses pada 10 Oktober 2015.

Tulisan Kearens selanjutnya membantu penulis dalam memahami kerangka teori kebijakan luar negeri milik Rosenau dengan objek fenomena yang berbeda tetapi masih dalam lingkup kebijakan luar negeri. Posisi penulis dalam hal ini yaitu pentingnya faktor kepentingan nasional dalam pengambilan suatu keputusan luar negeri tanpa menyampingkan faktor geopolitik.

2.2. Definisi Konseptual

2.2.1. Kebijakan Luar Negeri

Dalam memahami dinamika interaksi antar dua negara, pola hubungan yang dibentuk kedua negara dapat dijelaskan melalui kajian politik luar negeri yaitu pendekatan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri sendiri berusaha menjawab pertanyaan apa kebijakannya, mengapa negara bersikap atau mengeluarkan kebijakan tersebut, dan bagaimana proses pembuatan kebijakan tersebut.²² Peran negara masih menjadi aktor penting dalam perpolitikan internasional dimana pada akhirnya kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan pengambil kebijakan akan menentukan arah perjalanan sebuah negara dan pada akhirnya membentuk sistem internasional itu sendiri. Dengan kata lain, sistem internasional yang terbentuk merupakan konsekuensi logis dari hasil kebijakan suatu negara atau sub-sistem mempengaruhi sistem. Negara sebagai aktor yang menjalankan politik luar negeri tetap menjadi unit politik utama dalam sistem internasional sehingga dalam analisis yang dilakukan negara berperan sebagai unit analisis. Asumsi dasar dari politik luar negeri yang harus dipahami bahwa

²²B. White. 1989. *Analysing Foreign Policy* dalam M. Clarke, & B. White, *Understanding Foreign Policy: The Foreign Policy Systems Approach* (pp. 1-24). Southampton: The Camelot Press.

interaksi yang dijalankan kedua negara atau lebih bersifat *action theory* dimana aksi tersebut diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan aktor dalam hal ini negara yang ditunjukkan kepada negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu.²³

Secara sederhana ide dari kebijakan luar negeri adalah bagaimana negara berinteraksi dengan aktor global lainnya. Namun sebenarnya tidak ada kesepakatan tentang definisi kebijakan luar negeri itu sendiri karena kebijakan luar negeri menjadi suatu sistem kompleks dari agen dan sikap yang ditunjukkan kepada negara lain. Pengambil kebijakan luar negeri diibaratkan seperti bermain catur karena mengandung ketidakpastian akan motif, keyakinan, dan kalkulasi akan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, politik luar negeri dapat dijadikan sebagai perangkat formula atas nilai, sikap, arah, dan sasaran untuk mengamankan kepentingan nasionalnya.²⁴ Politik luar negeri kemudian bertindak sebagai pedoman untuk menentukan berbagai pilihan dalam proses pengambilan kebijakan yang ditujukan di luar wilayah kedaulatan suatu negara.

Dalam prosesnya, politik luar negeri tidak menafikkan pentingnya aspek-aspek domestik yang berpengaruh pada pertimbangan pengambilan kebijakan. Politik luar negeri yang dilakukan mendasar pada kepentingan nasional sebagai konsep yang selalu terkait dengan tujuan dari politik luar negeri. Kepentingan nasional dipahami sebagai keinginan dan kebutuhan yang hendak dicapai oleh negara berdaulat dalam hubungannya dengan negara lain di lingkungan eksternalnya. Negara dapat mengklasifikasikan kepentingan nasionalnya berdasarkan rentan waktu dan

²³A. A. Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

²⁴ *Ibid.* Hal. 49

objektifnya, Holsti menyebutkan yaitu 1. Tujuan jangka pendek yang meliputi kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi sebuah negara dan bersedia untuk berkorban sebesar-besarnya untuk mencapai tujuan tersebut, 2. Tujuan jangka menengah yang dijelaskan sebagai usaha pemerintah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan akan prestise sebuah negara, 3. Tujuan jangka panjang yang meliputi impian dan pandangan akan ideologi sistemnya dalam mengatur hubungan dan peran negara tertentu dalam sistem tersebut.²⁵

Upaya negara dalam keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternal dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara merupakan tujuan penting dari kebijakan luar negeri. Beberapa kondisi yang termasuk dalam *policy influencers* yang harus dipertimbangkan yaitu kondisi domestik dan kondisi eksternal yang dalam hal ini disebut sistem internasional. Dapat dikatakan pula bahwa kebijakan luar negeri adalah kepanjangan dari politik domestik, tentang bagaimana pemimpin yang berkuasa pada saat itu menentukan arah dan kepentingan nasional suatu negara.²⁶ Pentingnya aspek kepemimpinan dalam hal ini dapat mengakomodasi persepsi pemimpin dalam mengambil kebijakan. Sikap dan citra pembuat kebijakan kemudian akan membentuk orientasi, peran dan tujuan negara dalam menyikapi lingkungan eksternal. Holsti secara singkat menggambarkan kebijakan luar negeri sebagai ide dan tindakan yang dirancang oleh pembuat kebijakan dalam menyelesaikan suatu masalah atau membuat perubahan lingkungan dalam bentuk sikap atau tindakan.

²⁵ K.J. Holsti. 1988. *Politik Internasional: Kerangka Analisa*. Jakarta: Erlangga. Hal. 144

²⁶ Mohtar Mas'oe'd. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES.

Penulis menggunakan definisi yang dikemukakan James N. Rosenau dalam memahami kebijakan luar negeri yaitu bagian dari orientasi, komitmen dan tindakan, serta sikap dari sebuah negara. Ketiganya berhubungan satu sama lain dalam memandang fenomena di luar batas negara.²⁷ Tindakan nasional juga dipahami sebagai aksi nyata yang diambil sebuah negara (*form of behavior*) yang merupakan tingkat empiris dari sebuah kebijakan luar negeri berdasarkan situasi di lingkungan internal dan domestik dengan tujuan yang lebih spesifik.²⁸ Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri adalah tindakan nyata pada lingkungan eksternal yang dilakukan para pembuat kebijakan suatu negara dengan tujuan mempertahankan kelangsungan hidup negaranya sesuai kondisi yang sedang terjadi.²⁹

Faktor-faktor yang mendasari politik luar negeri dalam hal ini perumusan kebijakan luar negeri disebut sebagai input. Disebutkan oleh Rosenau, terdapat sumber-sumber utama yang dikelompokkan yaitu pertama, sumber sistemik (*systemic sources*) berupa sumber yang berasal dari kondisi eksternal yang meliputi struktur hubungan antar-negara besar yaitu jumlah negara besar yang terlibat dalam struktur hubungan internasional itu dan bagaimana pembagian kapabilitas diantara mereka; pola aliansi yang terbentuk, dan faktor situasional eksternal yaitu stimulan yang muncul secara tiba-tiba dari kondisi internasional terakhir.³⁰

²⁷James N. Rosenau, *The Study of Foreign Policy*, hal. 17

²⁸Perwita & Yani. *OpCit.*, Hal. 55

²⁹ James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson, "World Politics: An Introduction" dalam DR. Anak Agung Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani (eds), "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006. Hal. 49

³⁰Perwita & Yani. *OpCit.* Hal. 57

Sumber kedua adalah masyarakat (*societal sources*) yaitu sumber yang berasal dari lingkungan internal termasuk di dalamnya faktor sejarah, struktur sosial, pembangunan ekonomi, dan perubahan opini publik atau perubahan sentimen masyarakat akan dunia luar.³¹ Kemudian sumber ketiga yaitu pemerintahan (*governmental sources*) yang merupakan tanggung jawab politik dari pemerintahan yang ada dalam struktur pemerintahan. Pertanggung jawaban tersebut diantaranya termasuk pemilu, kompetisi partai, dan bagaimana pemimpin atau pengambil kebijakan dapat merespon situasi eksternal yang ada. Struktur kepemimpinan dapat dilihat dari kelompok atau individu yang menempati posisi pemerintahan.³²

Sumber terakhir adalah idiosinkratik (*idiosyncratic sources*) yang merupakan sumber internal berupa nilai-nilai pengalaman, bakat dan kepribadian elit politik yang dapat mempengaruhi persepsi, kalkulasi dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri. Persepsi elit politik terhadap keadaan internal dan arena internasional dalam mencapai tujuan nasional juga menjadi sumber perumusan kebijakan.³³

2.2.2. Model Adaptif (*The Adaptive Model*)

Penulis menggunakan model politik luar negeri adaptif yang dijelaskan James N. Rosenau dalam memahami perumusan kebijakan luar negeri yang berupa sikap Jerman. Model ini mengakomodasi analisis permasalahan yang dilihat dari konsekuensi akan perubahan yang terjadi baik di lingkungan internal maupun

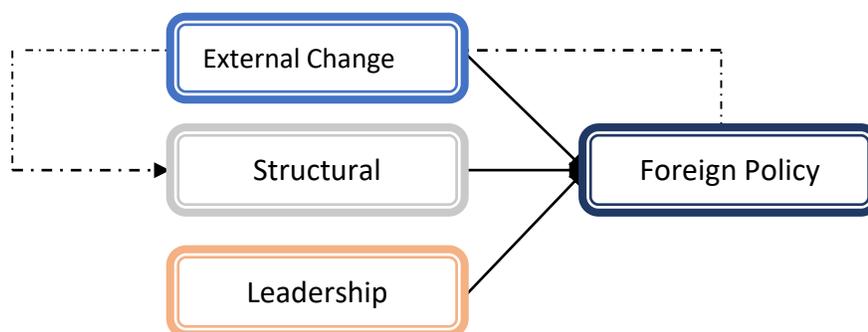
³¹ *Ibid.* Hal. 57

³² *Ibid.* Hal. 57

³³ *Ibid.* Hal. 57

eksternal.³⁴ Selain itu, model adaptif juga memungkinkan analisis terhadap respon negara akan perubahan situasi baik internal maupun eksternal terhadap kendala atau kesempatan yang tercipta dari kondisi tersebut. Kebijakan luar negeri atau tindakan suatu negara dikatakan adaptif ketika negara dapat merespon dan mengatasi perubahan yang ada di lingkungannya dan berkontribusi untuk tetap menjaga struktur utama masyarakat dalam batas yang diterima.³⁵ Oleh karena itu, model adaptif menekankan pada adanya perubahan sebagai dimensi utama sehingga negara melakukan upaya adaptasi melalui kebijakan luar negerinya.

Bagan 1. Model Adaptif Politik Luar Negeri



Sumber: James N. Rosenau. 1974. *Comparing Foreign Policy: Theories, Findings, and Methods*. New York: Sage Publications. Hal. 47 [Dalam A.A Banyu Perwita dan Yanyan Moch. Yani. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Rosdakarya. Hal. 67]

Model adaptif berupaya memisahkan beberapa pilihan poliik luar negeri berdasarkan perkiraan kapabilitas yang dimiliki serta posisi geopolitiknnya. Suatu tindakan negara dalam model ini dipahami sebagai konsekuensi yang terjadi akibat perubahan di lingkungan internal atau struktural dan eksternalnya pada suatu waktu tertentu sehingga perubahan tersebut merupakan variabel independen yang akan

³⁴Perwita & Yani. *OpCit*. Hal. 66

³⁵ J. N. Rosenau. 1981. *The Study of Political Adaptatio*. New York: The Free Press.

menjelaskan perumusan kebijakan luar negeri. Model adaptif juga memperhatikan pentingnya aspek kepemimpinan dari elit politik terkait yang juga mempengaruhi pengambilan keputusan suatu negara.³⁶ Secara singkat, model adaptif dapat dipahami dengan perumusan sebagai berikut:

$$P_t = E_t + S_t$$

P_t = politik luar negeri pada suatu waktu tertentu

E_t = perubahan eksternal

S_t = perubahan struktural

Perkembangan selanjutnya berubah menjadi:

$$P_t = L_t + E_t + S_t$$

dimana L_t merupakan aspek kepemimpinan dari elit politik yang berkuasa saat itu.

Rosenau menjelaskan bahwa perubahan-perubahan baik internal atau eksternal yang terjadi merupakan sumber-sumber yang ditempatkan pada kontinuu waktu tertentu dan kontinuu agrerasi sistemik. Kontinuu waktu yang dimaksud adalah sumber-sumber yang bersifat tetap dan berlaku terus menerus (*sources that tend to change slowly*) dan sumber-sumber yang dapat dipengaruhi oleh fluktuasi jarak pendek (*short term fluctuations*), dan sumber-sumber yang dapat berubah (*sources that tend to undergo rapid change*). Model adaptif ini diinisiasi oleh pembuat kebijakan yang menginginkan

³⁶ James N. Rosenau. *OpCit.* Hal. 67

adanya keseimbangan antara masyarakat dan lingkungannya sehingga dapat menjaga kinerja yang memadai dari masyarakatnya.³⁷

Dapat disimpulkan, model adaptif ini melihat bahwa negara bangsa merupakan entitas yang akan selalu melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Analisis model adaptif lebih memusatkan pada proses tindakan adaptasi suatu negara sebagai respon terhadap lingkungan internal dan eksternalnya yang berubah, dimana perubahan eksternal yang terjadi pada waktu tertentu dan perubahan internal akan mempengaruhi proses pemerintah dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Rosenau menambahkan bahwa kebijakan luar negeri dapat menjadi mekanisme beradaptasi dalam merespon perubahan yang ada. Perubahan tersebut memungkinkan terbukanya pilihan-pilihan yang ada dalam proses perumusan kebijakan. Dalam upaya mencapai tujuan nasional dan bertahan hidup, pemerintah dituntut dapat menyeimbangkan antara tuntutan internal dan tekanan internal sehingga dapat terhindar dari kemungkinan disintegrasi. Kemungkinan tersebut terjadi ketika perkembangan di lingkup internal semakin meningkatkan tuntutan terhadap apa yang terjadi di lingkungan eksternal atau perkembangan di lingkup eksternal memiliki potensi ancaman bagi negara tersebut. Adanya tekanan-tekanan tersebut kemudian diproses dalam benak para pembuat keputusan untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi dan memaksimalkan peluang-peluang yang dipersepsikan pembuat kebijakan mengenai kondisi di lingkungan tersebut.³⁸

³⁷ N. Peterson. 1977. *Adaptation As a Framework For The Analysis Foreign Policy Behavior*.

³⁸Perwita & Yani. *OpCit*. Hal. 68

Perubahan-perubahan yang terjadi merupakan variabel yang akan menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri menjadi hasil dari sebuah proses adaptasi. Secara lebih rinci, Rosenau menggambarkan bentuk-bentuk perubahan yang terjadi³⁹, yaitu:

1. *External Change*

Perubahan eksternal ini menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi di luar batas wilayah negara yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan negara tersebut. Rosenau menjelaskan perubahan eksternal yang mencakup: 1). *Great Power Structure*, yaitu adanya perubahan pola hubungan atau struktur antar negara dalam sistem internasional. Struktur dalam sistem internasional terbentuk melalui hubungan antar-negara dalam beberapa aspek yang mana struktur tersebut bergantung pada *great power* yang berada dalam hubungan tersebut serta distribusi kekuatan di dalamnya. Hubungan dengan negara besar pada akhirnya dapat mengatur suatu negara dalam mengambil langkah eksternal akibat negara besar memiliki kekuatan yang tidak dimiliki negara lain sehingga negara besar mampu mempengaruhi tindakan suatu negara untuk mengikuti pemikiran dari negara besar sebagai bentuk kebijakan luar negeri.⁴⁰

Selanjutnya adalah 2). Aliansi yang merupakan komitmen bersama dalam mengatasi berbagai fenomena untuk tujuan politik dimana ketika negara anggota aliansi terancam atas pihak lain maka negara anggota lain harus dapat memenuhi permintaan sekutunya. Musuh sekutu menjadi musuh bersama anggota aliansi yang

³⁹ James N. Rosenau. Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*, New York: The Free Press. Hal. 17-29

⁴⁰ James N. Rosenau. *OpCit*. Hal. 22

dapat melanggengkan atau mencegah negara anggota aliansi mengeluarkan kebijakan.⁴¹

Indikator terakhir yaitu 3). *Situational Factor* yang berarti keputusan pemerintah haruslah disesuaikan dengan situasi eksternal yang sedang terjadi di waktu tertentu maupun tiba-tiba. Kejadian di luar batas wilayah tersebut kemudian akan menjadi input dalam perumusan kebijakan luar negeri. Situasi eksternal yang dapat mempengaruhi dapat berupa isu yaitu fenomena yang menjadi topik hangat pada masyarakat internasional sedangkan krisis berarti situasi yang mengancam suatu negara sehingga memaksa negara tersebut untuk segera mengambil keputusan.⁴² Peneliti dapat menentukan situasi yang berpengaruh atau relevan dengan pengambilan kebijakan suatu negara disesuaikan dengan fenomena yang sedang menjadi objek penelitian, yaitu bisa berupa situasi konflik, ekonomi, politik atau fenomena lain yang juga memiliki relevansi dengan penelitian.

2. *Structural Change*

Perubahan struktural yaitu perubahan yang terjadi dalam lingkup internal atau domestik suatu negara yang dapat mempengaruhi pengambil kebijakan untuk memutuskan sebuah kebijakan. Adapun dua sumber yang dapat menjadi input dalam perubahan struktural yaitu sumber masyarakat yang meliputi geografis yaitu peran negara terhadap lingkungan sekitarnya bergantung pada kondisi geografis negara tersebut. Geografis diartikan sebagai kondisi konfigurasi tanah, iklim, kesuburan, dan lokasi relatif terhadap dataran lain. Kondisi geografis mencerminkan kemampuan suatu

⁴¹*Ibid.* Hal. 23

⁴²*Ibid.* Hal. 27-28.

negara untuk bertahan hidup di sistem internasional. Sumber ini juga dapat menunjukkan apakah suatu negara berada di bawah kontrol negara lain atau justru mengontrol negara lain dalam perumusan kebijakan luar negerinya.⁴³

Selanjutnya adalah *size* yakni perubahan yang terjadi pada baik sumber daya manusia maupun sumber daya bukan manusia. Sumber ini telah ditemukan sesuai kondisi yang sudah ada dan cenderung tidak mengalami perubahan banyak seiring berjalannya waktu. *Size* lebih menjelaskan kapabilitas suatu negara yang dapat diukur melalui: 1). Sumber daya manusia yakni jumlah penduduk dan keahlian masyarakat, dan 2). Sumber daya bukan manusia yang mencakup Sumber Daya Alam dan wilayah. Kapabilitas negara tersebut kemudian dapat membentuk pandangan masyarakat atas negaranya sendiri dan sejauh apa peran negaranya terhadap perpolitikan dunia.⁴⁴

Sumber perubahan ketiga adalah budaya dan sejarah yaitu perubahan norma dan tradisi pada masyarakat yang juga dilihat dari sejarah yang meliputi nilai dan kejadian masa lalu yang dapat menyatukan hubungan antar anggota masyarakat. Dengan kata lain, budaya dan sejarah masyarakat dapat mengarahkan atau justru menghambat kebijakan luar negeri jika orientasi kebijakan tidak mempertimbangkan budaya masyarakat yang ada. Bentuk nyata budaya masyarakat juga dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan melalui opini publik yang terbentuk akan suatu fenomena atau kebijakan yang akan diambil pemerintah.⁴⁵

⁴³ James N. Rosenau, *OpCit.* Hal. 19-20

⁴⁴ James N. Rosenau, *OpCit.* Hal. 19

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 21

Sumber selanjutnya dalam *structural change* ini yaitu pembangunan ekonomi yang memaparkan pergerakan ekonomi suatu negara yang dapat dilihat dari peningkatan *Gross National Product* (GNP) yang diproyeksikan untuk urusan eksternal seperti pengembangan militer dan bantuan luar negeri. Semakin kuat perkembangan ekonomi suatu negara maka akan semakin mandiri dalam merealisasikan kebijakan luar negerinya dibanding negara dengan perekonomian lemah.

Opini publik juga sangat mempengaruhi perubahan pada internal yaitu berupa pergeseran pendapat masyarakat dalam menanggapi suatu fenomena yang sedang terjadi di negara tersebut maupun fenomena yang terjadi di lingkup eksternal. Kondisi opini publik dapat tetap atau justru berubah secara drastis tergantung pada perubahan yang terjadi baik di lingkup internal ataupun eksternal. Opini publik memiliki kekuatan untuk mendesak pemerintah mengeluarkan kebijakan tertentu sesuai apa yang diharapkan masyarakat. Maka dari itu opini publik menjadi sangat penting dalam perumusan kebijakan luar negeri karena dapat mencerminkan orientasi yang ada dalam masyarakat terhadap kebijakan luar negeri suatu negara.⁴⁶

Adapun perubahan yang terjadi pada pemerintahan meliputi pertama, struktur pemerintahan yang merupakan perubahan struktur yang terjadi pada wewenang pemerintahan. Untuk melihat perubahan struktur pemerintahan didasarkan pada sistem pemerintahan yang digunakan suatu negara. Kedua, akuntabilitas politik tentang pertanggung jawaban politik oleh pejabat politik kepada warga negaranya juga menjadi

⁴⁶ James N. Rosenau. *OpCit.* Hal. 25

sumber perubahan yang mempengaruhi perubahan struktural. Akuntabilitas politik dapat dilihat melalui pemilu, kompetisi partai, dan sebagainya. Akuntabilitas politik tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut suatu negara.⁴⁷

3. *Leadership*

Leadership menjelaskan ketika suatu negara mengalami pergantian pemimpin. Pemimpin dari waktu ke waktu memiliki sifat dan sikap yang berbeda satu sama lain terlepas dari sistem pemerintahan yang berlaku. Pemimpin memiliki nilai dan persepsi yang berbeda dalam menjalankan kepemimpinannya sehingga hal ini menjadi input yang penting dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Hal tersebut dapat terlihat dari pandangan pemimpin tersebut atas negaranya dan sistem internasional yang dapat menentukan arah kebijakan luar negeri.⁴⁸

Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut kemudian menjadi proses adaptasi terhadap perubahan internal, eksternal, dan kepemimpinan melalui kebijakan luar negerinya dalam empat pola adaptasi politik luar negeri yang dijelaskan Rosenau⁴⁹, yaitu:

1. *preservative adaptation*: respon terhadap perubahan eksternal dan internal berupa respon baik terhadap lingkungan sosial,
2. *acquiescent adaptation*: respon terhadap perubahan eksternal saja,
3. *intransigent adaptation*: respon terhadap perubahan internal saja seperti respon yang sepenuhnya terhadap tuntutan masyarakat saja atau kondisi internal,

⁴⁷*Ibid.* Hal. 25

⁴⁸ James N. Rosenau. *OpCit.* Hal. 28

⁴⁹ James N. Rosenau. *The Study of Political Adaptation. OpCit.* Hal. 63-79

4. *promotive adaptation*: bukan respon dari lingkungan internal maupun eksternal melainkan pada persepsi pembuat kebijakan berdasarkan pertimbangan nilai.

2.3. Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini akan menjelaskan politik luar negeri Jerman dalam merespon krisis Ukraina yang ditandai dengan upaya yang dilakukan Jerman dalam resolusi konflik Ukraina terkait keterlibatan Rusia dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan luar negeri khususnya model adaptif milik James N. Rosenau. Dalam operasionalisasi ini, penulis akan menjelaskan sumber-sumber yang menyebabkan Jerman mengubah responnya atas krisis Ukraina dalam beberapa variabel dan indikator. Jerman yang semula cenderung mengutamakan diplomasi dan pendekatan ekonomi terhadap Rusia namun saat ini Jerman menjadi lebih aktif melalui perannya dalam manajemen resolusi konflik serta upaya lain dalam rangka menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi.

Tabel. 1 Operasionalisasi Model Adaptif

Variabel	Indikator	Operasionalisasi
<i>External change</i> (Sumber perubahan sistemik)	<i>Great Power Structure</i>	Hubungan dengan Amerika Serikat yang memberikan pengaruh dalam perumusan kebijakan Jerman
	Aliansi	Pola aliansi Jerman dan yang memberikan pengaruh pada perumusan kebijakan Jerman

	<i>Situational Factors</i>	Jatuhnya pesawat Malaysia MH17 dan adanya peningkatan isu <i>military intervention</i> oleh Rusia
<p style="text-align: center;"><i>Structural change</i> (Sumber perubahan dalam masyarakat)</p>	Geografi	Adanya perubahan bentuk geografis Jerman yang berimplikasi pada kebijakan Jerman
	<i>Size</i>	Adanya perubahan pandangan masyarakat atas peran Jerman pada level internasional
	Budaya dan sejarah	Nilai-nilai Jerman yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan luar negeri Jerman terkait upaya resolusi konflik oleh Jerman
	Perkembangan ekonomi	Perubahan proporsi GNP dalam pendanaan luar negeri Jerman
	Struktur sosial	Adanya perubahan kelompok masyarakat Jerman yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan Jerman
	Opini publik	Adanya peningkatan protes kecaman atas tindakan Rusia di Ukraina
Sumber perubahan dalam pemerintahan	Struktur pemerintahan dan akuntabilitas politik	Adanya perubahan <i>grand coalition</i>

		parlemen Jerman pada September 2013
<p style="text-align: center;"><i>Leadership</i></p> <p>(Sumber kepemimpinan dan idiosinkratik)</p>	Nilai-nilai yang dianut pemimpin	Adanya perbedaan latar belakang Angela Merkel dengan Kanselir Jerman sebelumnya
	Tanggapan/persepsi pemimpin	Adanya perbedaan persepsi atas Rusia antara Angela Merkel dengan Kanselir sebelumnya

2.3.1. Upaya Jerman dalam mediasi Krisis Ukraina di tahun 2014

Setiap negara berhak untuk menentukan sikap dalam hubungannya dengan negara lain sesuai dengan kepentingan negara tersebut. Sejak Merkel menduduki jabatan sebagai kanselir Jerman di tahun 2005, Angela Merkel tidak terlalu tertarik pada keterlibatan negaranya dalam level internasional. Jerman cenderung menjadi negara yang mengutamakan pendekatan multilateral sebagai konsep dasar dalam setiap pendekatan kebijakan luar negeri.

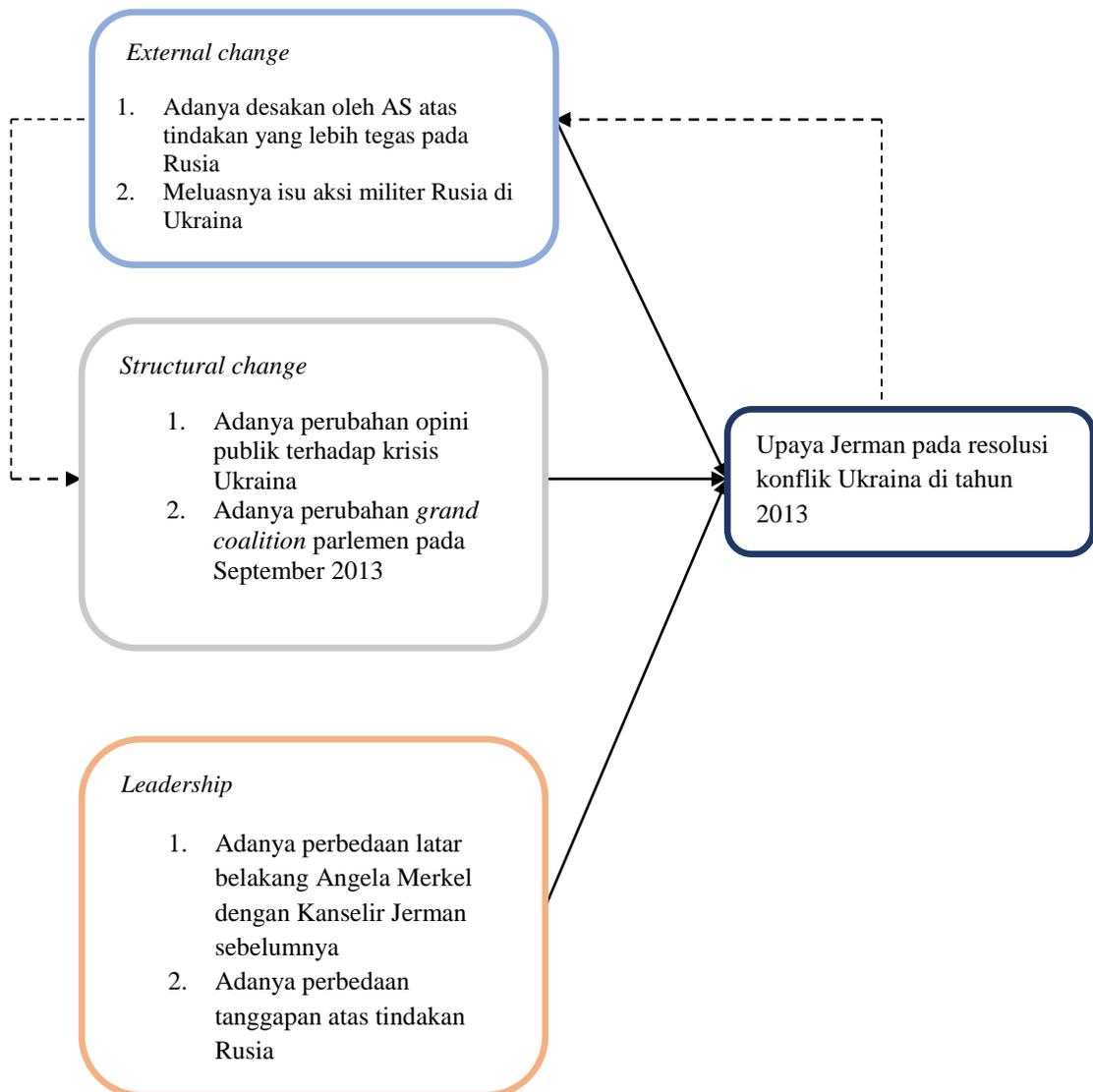
Posisi Jerman dalam krisis Ukraina merupakan salah satu efek dari beberapa perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal Jerman. Harapan bahwa Rusia akan melakukan modernisasi di bidang politik mulai bergeser ketika Putin memaksimalkan kekuasaannya melalui kebijakan yang dinilai agresif dan bersifat destruktif untuk membangun wilayah kekuasaan di sekitar Rusia dalam hal ini Ukraina. Sebagai bukti nyata adalah aksi militer di Krimea yang kemudian dipandang merubah pola respon Jerman dalam krisis internasional. Meskipun terdapat perbedaan

pandangan pada masyarakat dan elit politik Jerman mengenai krisis Ukraina, namun perubahan respon Jerman yang menjadi lebih tegas dengan mengupayakan resolusi konflik dan puncaknya yaitu menyepakati sanksi ekonomi yang lebih luas terhadap Rusia menjadi posisi politik Jerman saat ini.

Dalam penelitian ini, berubahnya respon Jerman terhadap Rusia akan dilihat dari perspektif politik luar negeri Rosenau secara spesifik pada politik adaptif Jerman terkait krisis Ukraina. Untuk menjawab permasalahan utama dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu politik luar negeri Jerman secara umum yang kemudian mengarahkan bagaimana kebijakan luar negeri Jerman terbentuk khususnya pada keputusan Jerman menjadi mediator krisis Ukraina. Selanjutnya penulis akan menentukan agen utama yang memiliki peran penting dalam perubahan kebijakan luar negeri Jerman. Fenomena konflik Ukraina yang menjadi kasus pertama Jerman dalam politik luar negeri yang lebih aktif juga akan dipaparkan sebagai gambaran umum. Faktor-faktor yang menjadi input dalam formulasi kebijakan luar negeri akan dijelaskan pada bab selanjutnya sebagai data-data pendukung dalam analisis politik adaptif yang dilakukan Jerman.

Berdasarkan operasionalisasi di atas, penulis akan melihat bagaimana kemampuan seorang pembuat keputusan dapat secara fleksibel memutuskan dan merespon situasi internal dan eksternal untuk mendapatkan kepentingan nasional.

2.4. Kerangka Berfikir



2.5. Argumen Utama

Model adaptif kebijakan luar negeri Jerman pada masa pemerintahan Angela Merkel terkait upaya Jerman di Uni Eropa atas resolusi konflik Ukraina di tahun 2014 merupakan hasil adaptasi perubahan eksternal yaitu desakan AS untuk Jerman untuk mengambil tindakan tegas terhadap dan adanya perluasan isu berupa tindakan militer Rusia di Ukraina. Selain itu, adanya perubahan struktural yaitu pandangan masyarakat atas peran Jerman pada perpolitikan dunia, perubahan opini publik berupa kecaman atas tindakan Rusia di Ukraina dan perubahan koalisi pada parlemen Jerman juga mempengaruhi kebijakan luar negeri Jerman. Adapun faktor kepemimpinan yaitu perbedaan latar belakang Angela Merkel dan tanggapan Angela Merkel berupa pidato dibandingkan dengan tanggapan kanselir Jerman sebelumnya terkait Rusia.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yakni penelitian yang akan menggambarkan serta menghubungkan variabel-variabel tertentu yang dapat menjelaskan suatu fenomena. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Jerman pada masa Angela Merkel ketika Jerman mengupayakan upaya resolusi konflik pada krisis Ukraina 2014 dengan menjadi mediator konflik. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah faktor-faktor perubahan yang mendasari kebijakan Jerman terkait krisis Ukraina sehingga penulis melihat *level of analysis* pada level negara.

3.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada generalisasi non-kausal.⁵⁰ Adapun ruang lingkup topik yang diteliti adalah perubahan sikap Jerman terhadap konflik internasional dalam hal ini krisis Ukraina. Poin kajiannya yaitu faktor-faktor yang menjadi *influencer* dari perubahan kebijakan Jerman terkait krisis Ukraina. Sedangkan ruang lingkup waktu menjangkau sejak awal terjadinya konflik yaitu tahun 2013 hingga saat sanksi ekonomi dijatuhkan pada tahun 2014. Namun untuk mengetahui latar belakang atas persetujuan sanksi yang diberikan Jerman, penulis melakukan kajian historikal atas kebijakan umum Jerman terhadap Rusia untuk mendukung penelitian penulis.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui studi literatur dan kajian kepustakaan terhadap bahan bacaan dan data tertulis yang berasal baik dari buku, *e-book*, jurnal, makalah seminar dan diskusi, maupun yang berasal dari situs internet yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data kualitatif dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian mengkorelasikannya satu sama lain untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Teknik analisis yang dilakukan secara kualitatif ini juga bertujuan untuk

⁵⁰ Mohtar Mas'ood. *OpCit*. Hal. 181

membuat penjelasan secara sistematis, faktual, sifat dan fenomena yang diteliti melalui studi telaah pustaka, dan observasi untuk mendalami studi penelitian permasalahan ini.

3.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dengan merujuk pada sistematika Penulisan Skripsi, Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan meliputi: BAB 1 Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah berisi tentang alasan pemilihan kasus, faktor-faktor yang melatarbelakangi pengambilan masalah untuk diteliti, dan argumen penulis disertai dengan bukti dari beberapa sumber. Selanjutnya rumusan masalah memaparkan perumusan inti masalah yang hendak diteliti. Pada tujuan berisi tentang jawaban dari rumusan masalah untuk membawa pembaca kepada arah pencapaian penelitian. Sedangkan manfaat penelitian merupakan manfaat yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini baik secara umum untuk para pengkaji ilmu sosial dan ilmu politik khususnya bagi pengkaji hubungan internasional.

Pada bab selanjutnya yaitu Kajian Pustaka yang berisi tentang informasi dalam membangun logika berpikir dan membantu untuk menjawab rumusan masalah. Diawali dengan Studi Terdahulu, penulis menggunakan dua studi terdahulu yang bersifat komparasi atas teori atau konsep yang digunakan. Selanjutnya yaitu definisi konseptual berisi tentang penjelasan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini sehingga memudahkan penulis dalam menjelaskan fenomena dalam konsep yang

digunakan. Konsep tersebut kemudian dioperasionalkan dalam operasionalisasi konsep yang menjelaskan konsep-konsep yang dikaitkan dengan fenomena penelitian ini yaitu faktor-faktor Jerman menjadi mediator dalam resolusi konflik Ukraina di tahun 2014. Keseluruhan inti dari penelitian ini digambarkan pada Kerangka Pemikiran yang dilanjutkan dengan Argumen Utama berupa dugaan sementara penulis atas jawaban akhir penelitian ini.

Pada Bab 3 dipaparkan Metodologi Penelitian yang meliputi jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta sistematika penulisan. Bab selanjutnya yaitu bab 4 akan menyajikan gambaran umum terkait data-data yang diperlukan untuk mempermudah menjawab permasalahan. Bab ini akan menjabarkan berisi perubahan yang terjadi di lingkup eksternal Jerman atau variabel independen sebagai faktor yang mendasari kebijakan Jerman untuk mengupayakan resolusi konflik Ukraina yang mengacu juga pada sumber sistemik, internal, dan *leadership* hingga menghasilkan kebijakan Jerman yang tertuang pada upaya resolusi konflik Ukraina yang dilakukan Jerman.

BAB 5 berisi analisis model adaptif dalam kebijakan luar negeri Jerman terkait keputusan Jerman untuk mengupayakan resolusi konflik di Uni Eropa dengan menjadi mediator terkait krisis Ukraina tahun 2014 pada masa kepemimpinan Angela Merkel. BAB 6 merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB 4

GAMBARAN UMUM

Pada bab ini, penulis akan memaparkan data-data relevan terkait Jerman dan krisis Ukraina yang nantinya akan menjadi data untuk menjelaskan faktor-faktor penting dari kebijakan Jerman dalam krisis Ukraina sebagai gambaran umum bagi pembaca.

4.1 Politik Luar Negeri Jerman pada Masa Pemerintahan Angela Merkel 2005-2014

Politik luar negeri Jerman saat ini tidak terlepas dari aspek sejarah sosial politik Jerman pasca runtuhnya Tembok Berlin di tahun 1989 yang juga menandai berakhirnya Perang Dingin. Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II, melemahnya pemerintahan republik di tahun 1919-1933, dan terpisahnya Jerman menjadi dua negara yang kemudian membentuk karakteristik tersendiri bagi kebijakan luar negeri Jerman yang

membedakan dengan negara lainnya. Pengalaman-pengalaman Jerman tersebut membentuk karakter kebijakan luar negeri Jerman yang disebut *civilian power*.⁵¹ Berdasarkan pengalaman sejarah itu pula, Jerman mengupayakan untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari negara-negara lainnya sehingga pendekatan multilateral⁵² dalam politik luar negeri menjadi konsep utama bagi Jerman dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Perkembangan globalisasi yang diiringi pesatnya kemajuan teknologi membawa pola politik luar negeri yang mana kepentingan domestik dan kepentingan internasional tidak dapat dipisahkan. Kebijakan luar negeri Jerman merupakan serangkaian pilihan politik baik berupa sikap ataupun aturan untuk memastikan kepentingannya baik berupa nilai, kejayaan, dan keamanan dalam rangka mempertahankan diri di tengah kepentingan negara-negara lain yang sangat kompetitif.

Secara umum, interaksi antar-negara merupakan tanggung jawab pemerintah federal sehingga segala permasalahan terkait kebijakan luar negeri Jerman dilaksanakan oleh pemerintah federal. Terdapat aktor penting dalam formulasi kebijakan luar negeri yaitu *top-level executive* yang disebut *Bundeskanzlerin* yang terdiri dari Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan, dengan pertimbangan dari Menteri Perekonomian dan beberapa lingkaran penasihat yang menjadi pelaksana

⁵¹*Civilian power* merupakan sebuah komitmen Jerman untuk meningkatkan integrasi di Eropa dan transatlantik, mengurangi penggunaan militer, dan mematuhi aturan PBB melalui resolusi konflik. Philip Schweers, 2008, “*Still a Civilian Power?*”, DIAS Analyse No. 27.

⁵² Multilateral diartikan ketika suatu aktor negara akan memastikan aktor lain untuk mengubah orientasi kebijakan luar negerinya berdasarkan pada norma umum yang berlaku dan aturan yang ada sekalipun aturan tersebut kurang sesuai dengan kepentingan nasional.

utama dalam kebijakan luar negeri. Elit politik inilah yang kemudian menjadi representasi dari negara sebagai aktor dalam lingkungan internasional.

Kanselir memiliki peran penting dalam kebijakan luar negeri Jerman. Kanselir berlaku sebagai penanggung jawab arah politik luar negeri Jerman yang kemudian diimplementasikan dalam kebijakan luar negeri. Tidak dapat dipungkiri, kuatnya peran Kanselir sebagai penentu arah kebijakan Jerman baik domestik maupun non-domestik seperti yang tertulis pada Pasal 65 UUD, menjadikan kebijakan Jerman sangat tergantung pada model kepemimpinan dan pengalaman Kanselir bersama para menterinya dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. Meskipun secara institusional terdapat *Foreign Office* yang mengatur urusan luar negeri, namun kebijakan luar negeri tetap dirumuskan oleh kanselir bersama menteri-menteri terkait.

Politik luar negeri Jerman dapat dipahami melalui beberapa peristiwa yang dihadapi Jerman pada masa sebelumnya. Tahun 1990, menjadi penanda dari kebijakan luar negeri Jerman. Dengan memperkuat aliansinya dengan Barat, Jerman mampu memainkan politik luar negerinya yang bersifat multilateral. Pasca reunifikasi, kanselir Helmuht Kohl dari *Christian Democratic Union* (CDU) memformulasikan strategi yang disebut "*A European Germany, not a German Europe*". Sebuah sikap politik yang diambil Jerman untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia dan menebus rasa bersalah atas generasi yang mengalami kekerasan NAZI. Strategi ini dilakukan dengan keinginan Jerman untuk membatasi kekuatannya pada institusi internasional.⁵³ Sebagai bukti, sejak tahun 1945, Jerman selalu melihat kepentingan nasionalnya berada

⁵³ Christian Nunlist, "*More Responsibility? German's Foreign Policy in 2014*", CSS Analyses No. 149 hal. 2

pada kepentingan masyarakat Eropa dan Jerman mempertimbangkan komitmennya pada Uni Eropa dan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) sebagai aspek penting dari kebijakan luar negerinya.

Jika dilihat saat ini, Jerman telah memainkan peran yang signifikan dalam kawasan. Tercatat Jerman mampu menghasilkan solusi atas krisis di Eropa akibat kuatnya perekonomian Jerman. Meskipun menghadapi pro kontra atas keputusan Jerman pada krisis Yunani, nyatanya keputusan Jerman tersebut yang membawa peran baru bagi Jerman. Di awal tahun 2015, Walter Steinmeier akhirnya mengungkapkan bahwa diperlukannya rencana strategis secara konseptual atas kebijakan luar negeri Jerman yang jelas, maka melalui proyek *2014 Review: understanding tomorrow's foreign policy*, Steinmeier melakukan inisiatif untuk memperjelas peran Jerman dalam masyarakat internasional sehingga masyarakat Jerman mampu menyadari peran negaranya.⁵⁴

Arahan baru bagi orientasi politik luar negeri Jerman ini melalui tiga proses yang sebelumnya Jerman tidak begitu menekankan pada proses ini. Pada tahap pertama, Steinmeier mengungkapkan bahwa proses pemilihan pilihan-pilihan politik luar negeri tidak didasarkan pada kepentingan nasional melainkan pada perspektif atau penilaian dari masyarakat internasional. Hal ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan terkait kebijakan luar negeri Jerman terhadap 57 ahli dari 26 negara. Tahap kedua yaitu dengan memperluas cakupan proses pemetaan pilihan politik. Sebagai hasil, *Foreign Affairs Office* terlibat dalam lebih dari 60 diskusi dengan penduduk,

⁵⁴ Annegret Berdick, 2015, "*The 2014 Review: Understanding the Pillars of German Foreign Policy and the Expectations of the rest of the World*", SWP Berlin: Working Paper RD EU. Hal. 2

focus group discussion, konferensi dan simulasi krisis untuk menstimulasi hal-hal kritis dari kebijakan luar negeri Jerman saat ini. Tahap terakhir adalah tahap formulasi yang tidak terbuka untuk umum dimana departemen terkait dalam *Foreign Affairs Office* menentukan perubahan apa yang terjadi pada lingkup internasional sehingga Jerman dapat mengambil pendekatan baru untuk bertindak pada pilihan politik tersebut.⁵⁵

Selanjutnya poin penting dalam menjelaskan politik luar negeri suatu negara adalah faktor domestik dan non-domestik sebagai input yang mempengaruhi formulasi kebijakan luar negeri. Kedua faktor tersebut kemudian menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk dipertimbangkan secara tepat dalam pembuatan kebijakan karena sangat dimungkinkan faktor-faktor tersebut mengalami perubahan sehingga perlu bagi sebuah negara untuk melakukan adaptasi melalui kebijakan luar negerinya. Dalam perumusan kebijakan luar negeri, pemerintah federal memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan politik luar negeri seperti yang tertuang pada Undang-Undang pasal 22.⁵⁶

Jerman yang sebelumnya berbentuk kekaisaran merupakan salah satu negara federasi di Eropa Barat dengan sistem pemerintahan parlementer yang dipimpin Presiden Joachim Gauck sebagai kepala negara dan Kanselir Angela Merkel sebagai kepala pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Jerman menganut sistem

⁵⁵ Walter Steinmeier, 2015, “*Speech by Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier pada acara penutupan Review 2014-A fresh look at German Foreign Policy*” diakses melalui http://auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/Presse/Raden/2015/150225-BM_Review_Abschlussveranstaltung.html diakses pada 20 Desember 2015.

⁵⁶ Federal German Ministry of Justice and Customer Rights, 2012, “*Basic Law for the Federal Republic of Germany* versi revisi yang diterbitkan oleh Federal Law Gazette dan diamandement pada 11 July 2012,” *Federal Law Gazette* I, article 32. Diakses melalui http://www.gesetze-im-Internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html#p0107

parlemen bikameral dimana terdapat dewan federal (*Bunderstat*) yang merupakan perwakilan negara bagian dan parlemen federal (*Bundestag*) yang terdiri dari perwakilan rakyat Jerman yang dipilih melalui pemilihan umum langsung.

Pemerintahan federal baik dalam lingkup domestik ataupun internasional dijalankan oleh kabinet yang terdiri dari kanselir dan menteri-menterinya. Kanselir sendiri diangkat oleh parlemen berdasarkan mayoritas suara partai yang memenangkan pemilihan. Kanselir memiliki wewenang utuh dan dominan dalam menjalankan pemerintahan federal bersama menteri-menteri federal sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga eksekutif memiliki peran yang sangat kuat dalam membentuk arah kebijakan Jerman.

Komposisi parlemen yang berlaku terdiri dari empat grup parlemen yang bersal dari empat partai besar yaitu *Christian Democratic Union (CDU/CSU)*, *Social Democratic Party (SDP)*, *Die Linke* (Partai kiri), dan *The Green* (Partai Hijau). Karakteristik CDU sebagai partai *center-right* yang mendukung liberalisasi pasar bebas pada aspek ekonomi tetapi merupakan partai yang konservatif ketika menyangkut isu sosial. Kedekatan dengan Amerika Serikat juga dibangun dengan baik oleh anggota partai. CDU merupakan partai terbuka yang tidak terpusat pada golongan tertentu.⁵⁷ Partai besar lainnya yang merupakan partai tertua di Jerman yaitu SPD. SPD yang semula merupakan partai di Jerman Barat memiliki peran penting pada terbentuknya Jerman sebelum unifikasi. Nilai-nilai yang dibawa SPD adalah

⁵⁷ David P. Conradt, 2015, "*Christian Democratic Union*", diakses melalui <http://www.britannica.com/topic/Christian-Democratic-Union-political-party-Germany> pada 26 Desember 2015

pentingnya modernisasi ekonomi sebagai jawaban globalisasi dengan tetap memperhatikan kebutuhan sosial.⁵⁸

Pada aspek kebijakan luar negeri, lembaga eksekutif yang terdiri dari Kanselir dan menteri-menteri memang memiliki peran yang dominan, bahkan inisiatif kebijakan luar negeri hanya bisa dilakukan oleh lembaga legislatif dengan persetujuan parlemen. Sedangkan *Bundestag* menjalankan fungsi *check and balance*. Sebanyak dua per tiga dari parlemen memiliki kewajiban untuk membagikan kedaulatannya untuk segala urusan di Uni Eropa.

Keutamaan suatu negara juga dapat dikatakan sebagai kapabilitas yang dapat berupa ekonomi, militer, politik, budaya, dan teknologi. Jika sebelumnya kekuatan militer menjadi kapabilitas utama yang diukur, namun pasca Perang Dingin, kekuatan ekonomi menjadi aspek dominan yang mempengaruhi interaksi antar negara. Hal tersebut sejalan dengan kemajuan teknologi dan informasi sebagai efek dari globalisasi yang merubah tatanan kondisi masyarakat menjadi masyarakat industri dengan orientasi kemajuan ekonomi.⁵⁹

Berakhirnya perang dingin juga merubah struktur tatanan dunia yang mulanya berupa bipolar yaitu perimbangan kekuatan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, menjadi unipolar dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan tunggal dal struktur internasional. Namun saat ini, beberapa negara juga muncul sebagai kekuatan baru

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹Igor Kovac, 2012, "*The Power Structure of The Post Cold War International System*", Ljubljana, diakses melalui http://www.academia.edu/8353379/THE_POWER_STRUCTURE_OF_THE_POST_COLD_WAR_I_NTERNATIONAL_SYSTEM pada 2 April 2016. Hal. 35

dalam sistem internasional diantaranya China, Jepang, dan India. Munculnya negara-negara tersebut sebagai kekuatan baru diprediksikan mengubah tatanan global menjadi multipolar. Namun tatanan global tidak serta merta berubah hanya karena munculnya kekuatan baru. Negara-negara tersebut memang memiliki peningkatan kekuatan dalam beberapa aspek yang membuat mereka mampu bersaing dengan Amerika Serikat namun dalam level regional. Tatanan dunia dapat berubah menjadi multipolar jikalau terdapat negara yang mampu menandingi atau melemahkan kekuatan Amerika Serikat.

Jika dilihat dari aspek aliansi, Jerman memiliki aliansi keamanan bersama Amerika Serikat dalam wadah NATO. Aliansi militer yang berdiri sejak 1949 melalui Traktat Atlantik Utara di Amerika Serikat ini menjadi penanda pentingnya peran Amerika Serikat yang semula ditujukan untuk membendung invasi Uni Soviet.⁶⁰ Akan tetapi dalam hal ini faktor NATO tidak menjadi faktor pendorong bagi keputusan Jerman mengupayakan diplomasi pada konflik Ukraina.

4.1 Krisis Ukraina pada Tahun 2014

Pada tahun 2007, Uni Eropa menginisiasi sebuah negosiasi yaitu *Association Agreement* (AA) bersama Ukraina sebagai bentuk tindak lanjut untuk mendiskusikan *Free Trade Area* (FTA) yang sebelumnya sudah dibicarakan pada tahun 1994. Terkait hal tersebut, Rusia tidak menunjukkan perhatiannya atau responnya hingga pada Agustus 2013, Rusia mencetuskan diplomasi ekonomi yang bertujuan untuk mengubah

⁶⁰*America and the North Atlantic Alliance*, dalam <http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=41807> pada 28 Maret 2016

kalkulasi politik di Ukraina agar tidak menandatangani AA yang ditawarkan Uni Eropa.⁶¹

Isu yang menjadi perhatian bagi masyarakat Jerman terkait krisis Ukraina di tahun 2014 adalah intervensi Rusia terhadap Ukraina, puncaknya ketika Rusia melakukan aneksasi atas Krimea yang telah melanggar hukum internasional dan Memorandum Budapest. Sebenarnya aneksasi Krimea bukanlah fenomena baru bagi Rusia. Berikut ini adalah perkembangan konflik Ukraina dari tahun ke tahun.

Tabel 2. Krisis Ukraina dari Tahun ke Tahun

Tahun	Peristiwa
1783	Rusia melakukan aneksasi terhadap Krimea sebagai langkah politik Catherine II untuk memperluas wilayah kedaulatannya di bagian Selatan Uni Soviet.
1853	Terjadi pertempuran yang dikenal sebagai <i>Crimean War</i> antara Uni Soviet dan pihak Barat yang berakhir dengan kekalahan Uni Soviet.
1954	Nikita Kurchchev selaku Sekretaris Umum Partai Komunis di Uni Soviet berhasil mengembalikan Krimea kepada <i>Ukrainian Soviet Socialist Republic</i> .
1991	Merujuk pada hasil sebanyak 346 atau 90,3% mayoritas parlemen Ukrainian memutuskan untuk merdeka dari Uni Soviet, bahkan sebanyak 54% di wilayah Krimea juga memilih kemerdekaan Ukrainian
Agustus 1991	Ukraina mendeklarasikan kemerdekaannya yang dipimpin oleh Leonid Kravchuk selaku petinggi pada <i>Ukrainian Supre Sovieti</i>

⁶¹ European Union Committee, 2015. “*The EU and Russia: Before and Beyond the Crisis in Ukraine*”, London: Authority of House of Lords. Hal. 54

2011	Wipperfuerth melaporkan bahwa sesaat setelah pertemuan tingkat tinggi NATO di tahun 2008, Rusia akan mengambil alih Krimea jika Krimea bergabung dengan NATO
2012	Ukraina mengalami resesi ekonomi dimana GDP terus menurun hingga 0% pada tahun berikutnya
2013	Presiden Yanukovich memutuskan untuk menerima paket pinjaman dari Rusia dengan tidak menandatangani kesepakatan ekonomi dari Uni Eropa
2013	Presiden Yanukovich memutuskan untuk menerima paket pinjaman dari Rusia dengan tidak menandatangani kesepakatan ekonomi dari Uni Eropa

Sumber: Hasil Olahan Penulis dari berbagai sumber

Eskalasi krisis Ukraina yang ditandai oleh aneksasi Krimea oleh Rusia dan perlawanan senjata di bagian timur Ukraina pada mulanya berakar pada konflik domestik antara masyarakat Euromaidan dan masyarakat pro-Rusia. Pada level regional, konflik terjadi antara Rusia dan Ukraina dimana Rusia berusaha mengembalikan kondisi masa lalu Ukraina sebagai bagian kekuasaan dari Uni Soviet. Krisis Ukraina harus dipahami secara komprehensif untuk dapat dilihat sebagai objek yang berpengaruh dalam penentuan sikap politik Jerman.

Dalam memahami krisis Ukraina, arti strategis Ukraina akan dijabarkan terlebih dahulu. Krisis Ukraina ini menjadi krusial karena perbedaan strategi orientasi geoekonomi dari Ukraina itu sendiri, yaitu apakah Ukraina akan menentukan politik luar negerinya sendiri atau menjadi bagian dari pengaruh Rusia. Hal tersebut menjadi penting bagi Rusia karena dapat mempengaruhi proyeksi geopolitik Rusia di kemudian hari. Secara sistem pemerintahan, orientasi Ukraina atas pemerintahan yang demokrasi dengan peningkatan kerjasama dengan Uni Eropa dan Barat menjadi tantangan bagi

model otoriter versi Rusia. Selain itu, Rusia sangat bergantung pada industri pertahanan Ukraina dimana Rusia sangat mengandalkan industri *aerospace and defense (A&D)*, tercatat sebanyak 30% ekspor alutsista ke Rusia karena Rusia tidak dapat memenuhi hanya dari produksi dalam negeri. Dengan ini, Rusia tercatat sebagai negara importer alutsista terbesar ke-3 bagi Ukraina.⁶²

Di sisi lain, arti strategis Ukraina adalah sebagai katalis bagi terbentuknya *Euroasian Union* yang digagas Rusia. Krimea juga merupakan wilayah strategis yang dapat menjadi proyeksi kekuatan Rusia di Laut Hitam. Krimea merupakan akses penting Rusia untuk menjangkau pangkalan laut di Sevastopol dan Laut Hitam dimana Rusia menempatkan pasukan angkatan lautnya di area tersebut.([sumber](#))

Sebenarnya krisis Ukraina menjadi implikasi dari konflik antara Georgia dan Rusia yang terjadi di tahun 2008 yang berakhir pada wacana perluasan NATO bagi Georgia dan Ukraina. Konflik ini menghasilkan dua pendekatan yang berbeda bagi Uni Eropa, selaku institusi supranasional yang berpengaruh, dan juga Rusia. Melalui program *Eastern Partnership* yang digagas Uni Eropa bersama lima negara *ex-soviet* di tahun 2009, Uni Eropa berusaha meningkatkan orientasi Ukraina kepada Barat dengan memberikan tawaran kerjasama ekonomi dengan batas waktu penandatanganan pada 28-29 November 2013.⁶³ Di lain pihak, Rusia berusaha menarik perhatian Ukraina

⁶² Dmitri Trenin, 2014, "*The Ukraine Crisis and the Resumption of Great power Rivalry*", Moscow: Carnegie Moscow Center. Hal.4

⁶³ Council of the European Union 2013, "*Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Vilnius, 28–29 November 2013: Eastern Partnership; The Way Ahead.*" Council of the European Union, diakses melalui http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/139765.pdf. pada 21 Maret 2016 hal.3

dengan menginisiasi sebuah *custom union* yang juga diinisiasi di tahun 2009 hingga akhirnya berhasil berdiri sebagai *Euroasian Economic Union* pada Mei 2014.⁶⁴

Pada masa pemerintahan Presiden Yanukovich yang menjabat sejak tahun 2010 hingga 2014, Ukraina mengalami kesulitan dalam mengamankan kondisinya ditambah dengan hutang Ukraina yang terus meningkat dari 76,6% di tahun 2012 hingga 81% di tahun 2013, di saat yang sama juga untuk menstimulasi industri Ukraina.⁶⁵ Akibat hal tersebut, Yanukovich berada dalam kondisi terdesak karena pemilihan akan segera berlangsung di awal tahun 2015. Rusia menunjukkan dua pilihan bagi Ukraina yaitu jika Ukraina memilih asosiasi ekonomi Uni Eropa maka Rusia akan menerapkan *trade barriers*, namun jika Rusia akan memberikan paket bantuan jika Ukraina memilih sebaliknya. Pada November 2013, Yanukovich secara tiba-tiba menunda penandatanganan asosiasi politik dan ekonomi yang ditawarkan Uni Eropa dan beberapa bulan kemudian Yanukovich menerima paket bantuan ekonomi dari Rusia. Akibat keputusan tersebut, terjadilah protes oleh masyarakat pro-Barat di pusat kota Kiev. Masyarakat yang tergolong sebagai kaum menengah ke bawah menyatakan kekecewaan atas keputusan Yanukovich tersebut. Mereka berpendapat bahwa kerjasama yang ditawarkan Uni Eropa merupakan jalan keluar bagi kesulitan yang dirasakan masyarakat pro-Barat akibat budaya korupsi yang terstruktur pada keluarga besar Yanukovich.⁶⁶

⁶⁴ Dmitri Trenin, *OpCit.* Hal. 5

⁶⁵ World Bank, 2014, "*Ukraine Economic Update*," diakses melalui <http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/ukraine/ua-macro-april-2014-en.pdf>. pada 20 Maret 2016

⁶⁶ European Union Committee, 2015. "*The EU and Russia: Before and Beyond the Crisis in Ukraine*", London: Authority of House of Lords. Hal. 53

Masyarakat inilah yang kemudian dikenal dengan Euromaidan, yaitu masyarakat yang tinggal di wilayah barat Ukraina dan menyatakan bahwa identitas Ukraina adalah terpisah dari Rusia. Euromaidan ini juga didukung oleh kelompok nasionalis yang tidak puas dengan pemerintahan Yanukovich. Selain menyampaikan kekecewaannya, protes tersebut juga menuntut agar Yanukovich mundur dari jabatannya dan segera diadakan pemilihan umum. Bermula dari awal tahun 2014, telah terjadi peningkatan aksi kekerasan antara masyarakat pro-Barat dan aparat keamanan. Yanukovich memutuskan untuk menghentikan segala aksi aparat keamanan dengan membuka forum dialog dengan pihak oposisi. Di waktu yang sama, pada 21 Februari 2014, Jerman bersama Prancis, dan Polandia yang tergabung dalam *Weimar Triangle* memfasilitasi pertemuan tersebut hingga menghasilkan sebuah kesepakatan antar pemerintahan Yanukovich dan para protestan. Tidak berselang lama, masyarakat Euromaidan membatalkan kesepakatan tersebut dan meminta agar pasukan militernya di Ukraina, menduduki pos-pos penting militer Ukraina. Upaya Rusia dalam memperluas geopolitiknya di Ukraina ini juga didukung oleh kondisi yaitu aturan pemerintah untuk tidak menyerang tentara Rusia karena dikhawatirkan memicu eskalasi konflik. Akibat kosongnya kekuasaan, pada 18 Maret 2014, masyarakat Ukraina bagian Timur memutuskan untuk melakukan referendum untuk menentukan nasib entitasnya. Sebanyak 60% populasi masyarakat Ukraina merupakan etnis Rusia dengan bahasa yang mendukung Krimea sebagai bagian dari Rusia yang tidak dapat dipisahkan.⁶⁷ Hasil referendum ini kemudian memperkuat legitimasi Rusia atas

⁶⁷ Dmitri Krenin, 2014, "*The Ukraine Crisis and The Resumption of Great Power Rivalry*", Moscow: Carnegie Moscow Center. Hal. 6

Republik Krimea di level internasional. Sebagai hasilnya, Rusia berhasil menganeksasi Republik Krimea dan Kota Sevastopol sebagai bagian dari entitas Negara Federal Rusia. Aksi aneksasi yang secara tiba-tiba ini tidak diprediksi oleh Barat dan terlalu terlambat bagi Barat untuk merespon peristiwa tersebut dengan aksi militer.

Perkembangan isu area dalam krisis Ukraina yang menjadi pengaruh dalam sikap politik Jerman atas krisis Ukraina yaitu ketika jatuhnya maskapai Boeing 777 di area separatis Ukraina tinggal. Sebanyak 298 penumpang dan awak kapal tewas dalam kejadian tersebut. Jatuhnya pesawat komersil tersebut diduga akibat tembakan dari *Surface-to-Air-Missile-System* (SA-11). Rusia menyangkal terlibat dalam penembakan pesawat tersebut, namun karena peristiwa tersebut masih dalam rentang waktu krisis Ukraina maka Rusia kembali dijatuhkan sanksi ekonomi.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid.*

BAB 5

ANALISIS POLITIK ADAPTASI JERMAN TERHADAP *EXTERNAL CHANGE*, *INTERNAL CHANGE*, DAN *LEADERSHIP* DALAM UPAYA DIPLOMASI PADA RESOLUSI KRISIS UKRAINA

Bab ini akan menjelaskan analisis dari faktor-faktor yang mempengaruhi politik adaptasi Jerman dalam kaitannya dengan upaya resolusi konflik dalam krisis Ukraina 2014 sesuai dengan kerangka operasional yang telah dijabarkan pada Bab II. Bab ini akan dibagi menjadi tiga sub-bab sesuai dengan faktor-faktor perubahan dari model adaptif James N. Rosenau yaitu, *external change*, *internal change*, dan *leadership*. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap upaya Jerman dalam resolusi konflik Ukraina tergantung pada ada atau tidaknya perubahan dalam faktor-faktor tersebut.

5.1 *External Change*: Adanya Perubahan di Lingkup Eksternal Jerman yang Berpengaruh pada Keputusan Jerman dalam Resolusi Konflik Ukraina

Sumber sistemik terdiri dari faktor-faktor eksternal yang berasal dari sistem internasional dan dapat memberikan pengaruh pada perumusan kebijakan luar negeri. Terdapat tiga faktor dalam *external change* yaitu, *great power structure*, aliansi, dan juga *situational factor*.

4.1. *Great Power Structure* (Struktur Tatanan Global)

Great Power Structure dalam sistem internasional mempengaruhi suatu negara untuk menentukan posisi politiknya dalam melihat fenomena internasional yang tertuang dalam kebijakan luar negeri. *Great power structure* juga dapat menentukan kedudukan sebuah negara dalam tatanan d unia berdasarkan kapabilitas yang dimilikinya. Kapabilitas yang dimiliki suatu negara biasa disebut sebagai power, yang dipahami sebagai keunggulan tertentu yang dimiliki suatu negara untuk membuat negara lain mengikuti apa yang negara tersebut inginkan atau selaras dengan apa yang dilakukan negara tersebut.⁶⁹

Di awal abad ke-20 diprediksi bahwa akan terjadi perubahan tatanan global yang semula unipolar dan digantikan dengan tatanan multipolar yang ditandai dengan munculnya negara-negara baru yang memiliki keunggulan tersendiri yaitu, BRIC (Brazil, Rusia, India, Cina).⁷⁰ Hilangnya dominasi unipolar diasumsikan akibat negara-negara tersebut mulai memiliki peran peran yang lebih besar dalam perekonomian dunia. Ekonomi menjadi faktor dominan pasca Perang Dingin terlebih pasca globalisasi

⁶⁹ Peter Bachrach & Morton. S. Baratz, 2012, “*Power and Its Two Faces Revisited: A Reply to Geoffrey Debnam*” dalam Igor Kovac, “*The Power Structure of The Post Cold War International System*”. Ljubljana. Hal. 29

⁷⁰ Michael Cox, 2012, “*Power Shifts, Economic Change and the Decline of the West?*”, London: Sage Publication, hal. 370

yang mendorong masyarakat internasional berubah menjadi masyarakat industri dengan orientasi kemajuan ekonomi.

Kemenangan Amerika Serikat pada Perang Dingin menjadikan Amerika Serikat sebagai kekuatan unipolar dalam sistem global. Meskipun potensi munculnya kekuatan-kekuatan baru, namun posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan tunggal tidak berubah. Dominasi Amerika Serikat dalam memelihara tatanan dunia melemah seiring munculnya negara-negara baru dengan kekuatan yang cukup besar namun hal tersebut tidak membuktikan bahwa tatanan dunia berubah menjadi multipolar. Munculnya kekuatan baru seperti BRICs hanya menandingi kekuatan Amerika Serikat pada level regional. Sedangkan untuk dapat dikatakan multipolar, maka harus ada sebuah negara yang dapat menandingi kekuatan Amerika Serikat atau meruntuhkan kekuatan Amerika Serikat di level internasional. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa Amerika Serikat hanya mengalami penurunan kapasitas dalam manajemen global dibandingkan pasca Perang Dingin.⁷¹ Berkaitan dengan jangka waktu penelitian penulis yakni pada masa kepemimpinan Angela Merkel tahun 2013 hingga terjadinya krisis Ukraina di tahun 2014, maka struktur kekuatan global tetap berupa unipolar, yaitu Amerika Serikat sebagai kekuatan tunggal dalam sistem internasional.

Amerika Serikat memiliki hubungan bilateral dengan berbagai negara, termasuk itu Jerman. Amerika Serikat merupakan mitra pertahanan Jerman yang tergabung dalam NATO. Bersama dengan Jerman dan anggota NATO lainnya, saat ini

⁷¹ "The Global Power Structure, Norms and the Future of the Liberal International Order", diakses melalui <http://gt2030.com/2012/06/06/the-global-power-structure-norms-and-the-future-of-the-liberal-international-order> pada 15 April 2016

aliansi keamanan tersebut memiliki tujuan untuk menjaga kebebasan dan keamanan anggotanya melalui kerjasama militer dan politik.⁷² Selain kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan pertama bagi Jerman, NATO juga menjadi aliansi militer pertama yang mendasari hubungan militer antara Jerman dan Amerika Serikat.

Hubungan Amerika Serikat dan Jerman saat ini tidak seperti pada masa Perang Dingin. Meskipun telah tercatat beberapa aspek kerjasama dilakukan seperti pada perluasan NATO, *nuclear nonproliferation*, dan juga misi perdamaian di Timur Tengah, namun hubungan kedua negara saat ini. Bahkan Kanselir Helmut Kohl memiliki hubungan yang sangat baik dengan Presiden Bill Clinton. Meskipun dalam beberapa hal kedua negara memiliki visi yang sejalan, dalam kasus Iran, Jerman memiliki pendekatan tersendiri yang berbeda dengan Amerika Serikat. Menteri Ekonomi Jerman pada saat itu menyatakan bahwa embargo ekonomi yang dilakukan Amerika Serikat bukan instrumen yang tepat dalam menanggulangi konflik di Iran.⁷³ Jerman menunjukkan kepercayaan diri dengan mendeklarasikan “*German Way*” yang diprakarsai oleh Gerard Schroeder sebagai sikap oposisi atas tindakan invasi Irak dan sikap abstain Jerman pada resolusi konflik Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait krisis Libya di tahun 2011.

Pada masa Angela Merkel yang menjabat sejak tahun 2005 dan kepemimpinan Barack Obama dari 2008 hingga saat ini, hubungan kedua negara ini mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013, terjadi skandal mengenai tindakan spionase yang dilakukan

72

⁷³Charles Lane, 1995, *Germany's New Ostpolitik*, New York: Council on Foreign Relations NY diakses melalui <http://search.proquest.com/docview/214230804?accountid=46437> pada 15 Februari 2016. hal. 1

Amerika Serikat terhadap telepon genggam Angela Merkel. Merkel menyatakan dalam salah satu kutipannya bahwa tidak ada teman yang saling melakukan spionase.⁷⁴ Kejadian tersebut menjadi tantangan dalam hubungan Jerman dan Amerika Serikat.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, penulis melihat tidak adanya perubahan *great power structure* karena Amerika Serikat tetap menjadi aktor dominan dalam perpolitikan dunia. Dalam hubungannya dengan Jerman, Amerika Serikat tetap menjalin hubungan kerjasama yang baik. Ukraina sendiri bukanlah prioritas dari kebijakan luar negeri dan geopolitik Amerika Serikat. Dengan dasar persamaan ideologi dengan masyarakat pro-Barat yaitu terwujudnya demokrasi, maka Amerika Serikat menyatakan dukungan bagi masyarakat pro-Barat.

Terkait krisis Ukraina, Jerman melakukan beberapa upaya koordinasi dengan Amerika Serikat untuk menemukan resolusi dari krisis Ukraina baik melalui kunjungan kenegaraan maupun percakapan via telepon. Pada 4 Maret 2014, Jerman melakukan kontak via telepon dengan Presiden Obama dan sepakat dalam satu pandangan bahwa Rusia telah melakukan pelanggaran kedaulatan dan keutuhan wilayah Ukraina.⁷⁵ Terdapat perbedaan pendekatan yang dilakukan kedua negara tersebut. Dalam resolusi konflik, Obama menyampaikan pada 6 Maret 2014 di Gedung Putih dan 28 Maret 2014 di Brussels, atas dukungannya terhadap sikap politik yang sudah dilakukan Jerman dalam upaya resolusi krisis Ukraina namun Amerika Serikat lebih menekankan pada

⁷⁴ Christian Nunlist, 2014, “*More Responsibility? German Foreign Policy in 2014*”, CSS Analyses No. 149 hal. 1

⁷⁵ Steve Holland dan Roberta Rampton, 2014, “*Obama, Germany’s Merkel discuss potential resolution to Ukraine crisis*”, Reuters, diakses melalui <http://reuters.com/article/idUSBREA2401N20140305> pada 20 April 2016.

terjaminnya keamanan aliansi negara-negara Eropa Tengah melalui NATO dengan upaya mempersenjatai Ukraina. Amerika Serikat masih menekankan pada strategi *deterrence* dalam menjamin keamanan.⁷⁶ Sedangkan pendekatan yang selama ini dilakukan Jerman pasca berakhirnya Perang Dingin lebih kepada mengupayakan dialog dan menghindari konfrontasi akibat tindakan militer. Dalam kunjungan kenegaraan yang dilakukan Merkel di Washington, Merkel menekankan meskipun terdapat perbedaan dalam upaya resolusi konflik Ukraina, namun aliansi antara Jerman dan Amerika Serikat akan terus berjalan.⁷⁷ Amerika Serikat bukan menjadi faktor pendorong atas inisiatif Jerman dalam upaya resolusi konflik di Ukraina. Secara garis besar, terlihat bahwa tidak adanya perubahan struktur global pada masa terjadinya krisis Ukraina.

5.1.2 Aliansi

Aliansi diartikan sebagai komitmen bersama yang dijalankan dengan suatu negara atau lebih untuk menanggapi berbagai macam fenomena demi tujuan politik. Aliansi berlaku ketika sebuah negara anggota mendapat ancaman maka negara anggota lain harus merespon permintaan negara sekutu tersebut. Dapat dikatakan bahwa musuh sekutu adalah musuh bersama dari aliansi tersebut.⁷⁸

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ VOA, 2015, “Obama, Merkel for Diplomacy in Ukraine Crisis”, diakses melalui <http://www.voanews.com/content/german-chancellor-to-hold-talks-monday-with-obama-on-ukraine/2634472.html> pada 8 Maret 2016

⁷⁸ James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson, 1976, “*World Politics: An Introduction*”, New York: *The Free Press*”, hal. 23

NATO ini kemudian menjadi bentuk nyata dari sebuah *collective security* bagi negara-negara di kawasan Atlantik Utara. Berdasarkan sejarah pembentukannya, NATO menerapkan beberapa nilai-nilai dasar yang menjadi acuan operasional NATO yaitu atas nama demokrasi, keutuhan aliansi, kebebasan individu, dan aturan hukum. Jerman Barat bergabung dengan NATO di tahun 1955 ketika pada saat itu pakta pertahanan ini dibentuk untuk membendung ekspansi Soviet di Eropa. Partisipasi Jerman dalam aksi NATO pertama kali dilakukan pada tahun 1999, pada masa Kanselir Gerhard Schroder, yaitu ketika pesawat-pesawat tornado Jerman berpartisipasi dalam serangan udara NATO di Serbia. Aksi militer tersebut ditujukan untuk meminimalisir pelanggaran HAM dan aksi kekerasan di Kosovo. Hingga saat ini tercatat terdapat lebih dari 2.500 tentara Jerman di Kosovo.⁷⁹

Lembaga militer Jerman dikenal sebagai Bundeswehr yang menunjukkan kapabilitas militer Jerman. Kekuatan militer Jerman merupakan militer terbesar ke-4 dalam Uni Eropa setelah Prancis, Italia, dan Inggris, dengan 180.000 tentara yang aktif bertugas. Meskipun roda perekonomian Jerman terus menyumbang pertumbuhan ekonomi, namun Jerman hanya menghabiskan 1,35% dari GDP untuk anggaran militer.⁸⁰ Persentase tersebut lebih kecil dibandingkan negara-negara aliansi NATO yang mengeluarkan 2% dari belanja total negara untuk keperluan militer. Fakta tersebut menunjukkan keengganan Jerman untuk terlibat aktif dalam aksi militer NATO. (sumber)

⁷⁹ DW, 2009, "*Partisipasi Pertama Militer Jerman dalam Aksi NATO*", diakses melalui <http://www.dw.com/id/partisipasi-pertama-militer-jerman-dalam-aksi-nato/a-4122879> pada 20 April 2016.

⁸⁰ Global Fire Power, 2016, "*Germany Military Strength*", diakses melalui http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=germany pada 20 April 2016.

Peran Jerman dalam keamanan internasional memang terbatas sejak negara ini bersatu menjadi Republik Federal Jerman. Dalam sejarahnya, pasca reunifikasi Jerman memang ingin mengembalikan eksistensinya dalam level internasional dengan menunjukkan komitmennya pada aliansi sehingga di tahun 1955 Jerman Barat bergabung dengan aliansi keamanan NATO. Namun di sisi lain, sejarah juga membentuk karakter kebijakan luar negeri Jerman yang bersifat *post-war pacifism*. Jerman tidak terlalu melibatkan diri dalam isu keamanan internasional dan memilih untuk memproyeksikan *geo-economic*⁸¹ sebagai kapabilitas Jerman. Masyarakat Jerman beranggapan bahwa untuk mencapai keamanan dan perdamaian tidak harus dicapai melalui aksi militer terutama perang. Rendahnya partisipasi militer Jerman dalam masalah internasional juga menjadi keputusan pemerintah yang didasari tingginya sentimen anti-Amerika dari masyarakat Jerman. Aksi militer Amerika Serikat yang bersifat multilateral pada masa kepresidenan George W. Bush yang kala itu melakukan invasi di Timur Tengah dan penahanan Teluk Guantanamo mendorong pandangan negatif Amerika Serikat sebagai negara *aggressor*.⁸²

Berdasarkan data yang penulis temukan, tercatat Jerman hanya memiliki satu aliansi keamanan yaitu NATO. Meskipun NATO juga memiliki fungsi dalam resolusi konflik internasional namun hal tersebut bukan menjadi faktor pendorong bagi Jerman untuk mengambil langkah diplomasi dibanding militer pada resolusi konflik Ukraina.

⁸¹ Negara yang memimpin dalam kapabilitas ekonomi dan menempatkan kepentingan ekonomi nasionalnya sebagai nilai dasar dari kebijakan luar negeri tetapi menjadi sangat rentan jika harus berperan pada aspek keamanan. Diakses melalui <http://www.leksika.org/tacticalanalysis/2015/3/26/geoeconomics-and-german-russian-relations> pada 15 April 2016.

⁸² John Vinocur, 2015, “*Germany Falls Out of Love with America*”, Wall Street Journal, diakses melalui <http://www.wsj.com/articles/germany-falss-out-of-love-with-america-1433187158> pada 11 April 2016.

Jerman menunjukkan pendekatan yang berbeda dengan apa yang Amerika Serikat harapkan melalui NATO yaitu dengan tidak mempersenjatai pasukan Ukraina.

5.1.3 Isu Area dan Krisis

Adanya perubahan isu area telah membuat Jerman menempatkan kepentingan politik di atas kepentingan ekonomi, tidak seperti pada konflik sebelumnya ketika berhadapan dengan Rusia, Jerman selalu mengembalikan keadaan pada *business as usual*. Terdapat tiga poin penting yang menjadi isu area dalam memahami krisis Ukraina. Poin pertama yaitu aksi Rusia berupa aneksasi Krimea yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Elit politik Jerman kecuali sayap kiri memahami krisis Ukraina disebabkan oleh aksi militer Rusia yang tidak memperhatikan hukum internasional, khususnya Memorandum Budapest.⁸³ Pelanggaran hukum internasional yang dikhawatirkan mengancam stabilitas kawasan merupakan poin yang selalu ditekankan elit politik Jerman terutama Angela Merkel dalam beberapa kesempatan pidatonya yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Jerman menjadi sangat memperhatikan intervensi yang dilakukan Rusia di Ukraina karena memang Jerman merupakan subjek dari pembentukan Uni Eropa dan berkontribusi terhadap lahirnya 1975 *Helsinki Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe* sehingga isu pelanggaran hukum internasional menjadi penting bagi Jerman. Rasa tanggung jawab Jerman tersebut yang mendorong Jerman untuk berperan aktif dalam

⁸³ Mariana Budjeryn, "The Breach Ukraine's Territorial Integrity and the Budapest Memorandum", Wilson Center, Washington: NPIHIP. Hal. 2

resolusi konflik Ukraina.⁸⁴ Poin selanjutnya yang menjadi perhatian publik Jerman adalah konflik senjata yang terjadi di Donbass sejak Februari 2014 dan yang terakhir peristiwa jatuhnya maskapai Malaysia MH17.

Dalam kasus ini, perubahan eksternal yang berpengaruh pada perumusan kebijakan luar negeri Jerman atas keterlibatan Rusia pada krisis Ukraina yaitu berupa perubahan isu krisis Ukraina yang semula merupakan konflik internal namun setelah adanya intervensi dari Rusia krisis ini menjadi isu pelanggaran hukum internasional dan pelanggaran HAM yang kemudian menjadi perhatian khusus masyarakat Jerman. Data menunjukkan, pada Juni 2015 tercatat telah terjadi pelanggaran HAM serius di Ukraina bagian timur yaitu berupa aksi penembakan, eksekusi, penahanan ilegal, penyiksaan, penganiayaan, perampasan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Ukraina, serta rendahnya akuntabilitas pemerintah. Antara pertengahan April 2014 hingga awal 2015 setidaknya 6.417 orang dinyatakan tewas, termasuk itu perempuan dan anak-anak, di zona konflik Ukraina bagian timur. Upaya Jerman dalam mencapai kesepakatan pada tanggal 12 Februari 2012 mampu menurunkan intensitas aksi baku tembak namun tidak menghentikan aksi kekerasan tersebut sehingga warga sipil masih terus berada dalam kondisi tidak aman. Korban dari masyarakat sipil juga berjatuh akibat ranjau darat.⁸⁵

⁸⁴ Urmas Paet, 2015, “*The Ukraine crisis is a threat to Europe’s security architecture*”, Europe’s World, diakses melalui <http://europesworld.org/2015/06/24/ukraine-crisis-threat-europes-security-architecture/#.VzTqGchXesM> pada 11 April 2016.

⁸⁵ UN News Center, “*Persistent and Grave Human Rights Violations in Eastern Ukraine-UN Report*”, diakses melalui <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID+51016> pada 20 April 2016.

Jerman menjadi negara yang terus menyuarakan tercapainya HAM. Jerman terlibat dalam semua perjanjian hak asasi manusia Perserikatan Bangsa Bangsa yang penting serta dalam protokol tambahannya (Pakta Sipil, Pakta Sosial, Konvensi Antirasime, Konvensi Hak Perempuan, Konvensi Antipenganiayaan, Konvensi Hak Anak-Anak, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, Konvensi Antipenghilangan). Terakhir Jerman menandatangani Protokol Tambahan untuk Kesepakatan Melawan Penganiayaan serta Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Kedua perjanjian tersebut berlaku sejak tahun 2009. Sebagai negara pertama di Eropa, Jerman juga meratifikasi Protokol Tambahan untuk Konvensi Hak Anak-Anak, yang memungkinkan gugatan secara individual.⁸⁶

Pemerintah Federal Jerman mendukung perlindungan terhadap diskriminasi dan rasisme, serta aktif di seluruh dunia untuk menentang hukuman mati dan untuk mendukung partisipasi politik dan kepastian hukum. Pemerintah Jerman juga membela kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat, berjuang melawan perdagangan manusia, serta mendesak supaya diwujudkannya hak atas tempat tinggal serta hak atas air bersih dan perlengkapan saniter. Hampir 900 juta penduduk dunia tidak mempunyai akses pada air bersih. Dengan dana sebesar 400 juta Euro per tahun, Jerman menunjang sejumlah besar proyek untuk perbaikan situasi tersebut di 27 negara.⁸⁷

Untuk kedua kali sejak tahun 2012, Jerman duduk sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swis. Pada tahun 2015, Jerman untuk pertama kali

⁸⁶ Federal Foreign Office, 2016, “*Human Rights Policy*”, diakses melalui http://auswaertiges-amt.de/sid_94779453949AA811895AB5FE18968CFD/EN/Aussenpolitik/Menscherechte.html pada 13 April 2016.

⁸⁷ *Ibid.*

menjadi ketua dewan tersebut, jabatan yang dipegang oleh Duta Besar Joachim R cker selama satu tahun. Instrumen terpenting yang dipegang oleh Dewan Hak Asasi adalah "Pemeriksaan Negara-Negara Secara Berkala yang Bersifat Universal". Dalam pemeriksaan tersebut, setiap negara anggota PBB mengajukan laporan tentang pelaksanaan tugasnya di bidang hak asasi, dan siap menghadapi pertanyaan kritis. Jerman telah melewati prosedur tersebut pada tahun 2009 dan 2013.⁸⁸

Jerman termasuk negara yang paling aktif di antara ke-47 anggota Dewan Eropa, badan yang mendukung perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, pengukuhan negara hukum, dan demokrasi di seluruh Eropa. Melalui kesepakatan yang bersifat memelopori, khususnya melalui Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, Dewan Eropa turut mengembangkan kawasan hukum bersama di Eropa, sekaligus mengawasi penegakan standar dan nilai-nilai bersama yang mengikat di Benua Eropa.

Krisis Ukraina telah menjadi permasalahan regional dimana krisis yang bermula dari konflik internal kemudian mengalami perluasan isu krisis ketika Rusia melakukan aneksasi terhadap Krimea dan pada tanggal 2 Maret, Putin secara resmi menyampaikan bahwa aksi militer yang selama ini berlangsung di Krimea merupakan tanggung jawab Rusia. Aksi aneksasi Krimea oleh Rusia telah melanggar memorandum Budapest telah menunjukkan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki Jerman sebelum peristiwa ini terjadi sehingga peristiwa ini menjadi determinan bagi politik luar negeri Jerman untuk melakukan adaptasi. Terlebih lagi dilaporkan Rusia

⁸⁸ Federal Foreign Office, 2016, "UN Human Rights Council", diakses melalui http://auswaertiges-amt.de/Aussenspolitik/Menschenrechte/Menchenrechtstrat_node.htm pada 12 April 2016.

mempersenjatai gerakan separatis di sekitar area bandara Donetsk yang menjadi titik penting untuk persenjataan kelompok pemberontak.⁸⁹

Krisis Ukraina menjadi faktor pendorong dari lingkungan eksternal. Jika mengacu pada sejarah, Ukraina memang menjadi *sphere of influence* bagi Rusia sejak waktu yang lama. Melihat bagaimana Rusia memproyeksikan pengaruhnya melalui ketergantungan gas Eropa melalui monopoli gas yang merugikan Ukraina, tampaknya tidak membuat Jerman menjadi aktor penting dalam level internasional. Ketika isu tersebut berkaitan dengan integritas kawasan, Jerman menunjukkan pengaruhnya dengan menginisiasi berbagai dialog perdamaian untuk menyelesaikan konflik.

Rosenau menyebutkan bahwa negara yang terbiasa menghadapi konflik merupakan negara dengan status yang lebih besar dibanding negara yang berkonflik.⁹⁰ Jerman membuktikan sebagai negara yang memiliki peran penting dalam beberapa permasalahan di Eropa sebelum krisis Ukraina terjadi, juga memainkan pengaruh politiknya dalam upaya resolusi konflik Ukraina. Dapat dibuktikan bahwa perubahan isu area krisis Ukraina menyangkut nilai-nilai yang dipahami Jerman mengenai stabilitas kawasan sehingga pada akhirnya perkembangan krisis ini mendorong Jerman untuk beradaptasi melalui sikap politiknya.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ James N. Rosenau, 1976, “*The Study of Foreign Policy*” dalam “*World Politics: An Introduction*”, New York: The Free Press. Hal. 28

5.2. *Internal Change*: Adanya Perubahan pada Opini Publik dan Struktur Pemerintah yang Mendorong Jerman dalam Upaya Diplomasi pada Krisis Ukraina

5.2.1 Geografi Jerman

Jerman merupakan negara terbesar ke-tujuh di Eropa dengan luas area 357.022 kilometer persegi. Jerman terletak di tengah Benua Eropa dan berbatasan dengan sembilan negara dan tidak ada negara lain di Eropa yang memiliki tetangga lebih banyak dari Jerman. Secara geografis, Jerman terletak pada posisi strategis yang dapat memberikan kesempatan sekaligus tantangan bagi peran politiknya di kawasan.

Gambar 1. Peta Jerman



Sumber: *Maps of World*⁹¹

⁹¹ Maps of World, 2016, “*Map of Germany*”, diakses melalui <http://www.mapsofworld.com/germany/> pada 10 April 2016

Dilihat dari peta di atas pada bagian utara, Jerman punya akses ke Laut Baltik dan Laut Utara, di selatan berbatasan dengan Pegunungan Alpen. Gunung tertinggi adalah Zugspitze di Bavaria setinggi 2.962 m di atas permukaan laut. Titik terendah di daratan berada 3,54 m di bawah permukaan laut di desa Neuendorf-Sachsenbande di negara bagian Schleswig-Holstein. Dengan luas 357.340 km² Jerman adalah negara keempat terbesar di Uni Eropa sesudah Prancis, Spanyol dan Swedia. Hampir sepertiga dari keseluruhan wilayahnya terdiri atas hutan. Danau, sungai dan perairan lainnya mencakup dua persen lebih dari seluruh wilayah. Sungai terpanjang adalah Sungai Rhein. Di barat daya membentuk perbatasan antara Jerman dan Prancis, lebih jauh ke utara terletak kota-kota Bonn, Köln, dan Düsseldorf di tepiannya. Sungai Elbe, sungai terpanjang kedua, menghubungkan Dresden, Magdeburg, dan Hamburg lalu bermuara ke Laut Utara.⁹² Jerman sendiri memiliki iklim sedang. Di bulan Juli, suhu maksimum rata-rata berada pada 21,8 derajat Celsius, minimumnya pada 12,3 derajat Celsius. Di bulan Januari suhu maksimum rata-rata 2,1 derajat, dan minimum sekitar -2,8 derajat. Suhu tertinggi yang tercatat sejak mulai dilakukannya perekaman data cuaca terjadi pada tanggal 5 Juli 2015, yaitu 40,3 derajat Celsius di Kitzingen am Main.⁹³

Jerman memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang melimpah. Terdapat sekitar 48.000 jenis satwa dan 24.000 spesies tumbuh-tumbuhan, lumut, jamur, dan ganggang laut. Kekayaan tersebut dilindungi dalam Konstitusi Jerman tahun 1994. Antara Laut Utara dan Pegunungan Alpen telah ditetapkan 16 taman nasional dan 15

⁹² Amanda Briney, 2014, "*Geography of Germany*", diakses melalui <http://geography.about.com/od/germanymaps/a/germany-geography.htm> pada 1 April 2016

⁹³ Weather Online. "*Germany*", diakses melalui <http://www.weatheronline.co.uk/reports/climate/Germany.htm> pada 1 April 2016

cagar biosfer UNESCO dengan karakter yang sangat berbeda-beda ditambah juga hadirnya ribuan cagar alam. Dengan keberagaman hayati ini, Jerman termasuk sebagai negara peserta perjanjian internasional terpenting mengenai keanekaragaman hayati, dan di samping itu turut serta dalam kurang lebih 30 kesepakatan dan program antarnegara dalam perlindungan alam untuk mengurangi angka kemusnahan dalam bidang keanekaragaman hayati secara signifikan. Keanekaragaman hayati Jerman juga ditunjukkan dari fauna yang dimiliki yaitu lebih dari 40% jenis binatang bertulang belakang berada di Jerman namun sayangnya keberadaannya terancam.⁹⁴

Jerman secara aktif terlibat dalam upaya perlindungan flora dan fauna baik di darat dan wilayah perairannya yaitu Laut Utara dan Laut Baltik melalui program pemerintahnya untuk mengurangi perusakan ruang hidup alam yang diakibatkan oleh pembangunan pemukiman dan jalan, zat beracun yang berasal dari pertanian intensif dan pemupukan yang berlebihan. Selain itu, pemerintah secara domestik memfokuskan pada perlindungan alam maritim. Perairan Jerman kaya akan keanekaragaman hayati yang mampu menyediakan bahan pangan, energi, dan bahan mentah.⁹⁵ Namun di sisi lain, ekosistem ini terancam dengan tingginya intensitas pengeboran minyak, pelayaran, penangkapan ikan, pembuangan sampah non-organik, dan pengasaman oleh karbondioksida.

Kondisi geografis Jerman pasca reunifikasi hingga terjadinya krisis Ukraina tidak mengalami perubahan. Sebelum terjadinya krisis Ukraina, Jerman diuntungkan

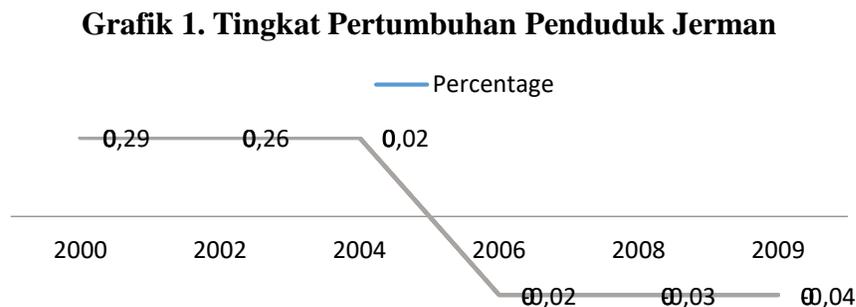
⁹⁴ Susan Buzzelli, 2011, "*Smell the Roses: Germany's Flora and Fauna*", diakses melalui <http://zeitguidegermany.com/2011/03/germanys-flora-fauna/> pada 1 April 2016

⁹⁵ *Ibid.*

dengan posisi sentral diantara Eropa Barat dan Eropa Timur sehingga pemerintah dapat mengakomodasi kepentingan negara-negara Eropa Timur yang selanjutnya diwujudkan dalam inisiasi-inisiasi politik Jerman di Uni Eropa. Pasca krisis terjadi, Jerman masih dapat mengoptimalkan perannya di kawasan sebagai negara yang memiliki posisi strategis. Potensi alam Jerman juga rupanya tidak mempengaruhi upaya Jerman dalam upaya diplomasi pada krisis Ukraina 2014. Kondisi geografis dan kekayaan alam Jerman merupakan isu lingkungan yang tidak relevan dengan isu utama yang menjadi perhatian pemerintah Jerman pada krisis Ukraina.

5.2.2 *Size* (Populasi dan Ketersediaan Sumber Daya Alam Jerman)

Tiga tren menandakan perkembangan demografi: angka kelahiran yang rendah, meningkatnya usia harapan hidup, dan masyarakat yang semakin tua.



Sumber: Hasil olahan penulis dari
<http://www.tradingeconomics.com/germany/population>

Grafik di atas menunjukkan tren pertumbuhan penduduk Jerman yang cenderung menurun. Tercatat, angka kelahiran tertinggi yang pernah diraih Jerman tercatat tahun 1964 dengan 1,357 juta kelahiran; setelah itu Jerman terus mengalami penurunan angka kelahiran (pada 2014 tercatat 715.000 kelahiran). Sejak

tahun 1975 jumlah kelahiran berkisar antara 1,3 anak per perempuan. Oleh karena itu generasi anak-anak sejak 35 tahun lebih kecil sekitar sepertiga dibandingkan dengan generasi dewasa. Kelompok usia 50 tahun saat ini jumlahnya dua kali jumlah kelahiran baru. Bersamaan itu meningkat pula usia harapan hidup. Usia harapan hidup laki-laki rata-rata 77 tahun, sedangkan perempuan 82 tahun. Saat ini Jerman memiliki populasi sebanyak 80.683.335.⁹⁶

Kiranya tidak ada perkembangan lain yang akan menentukan masa depan Jerman selain perubahan demografis: Sejak akhir tahun 1990-an angka kelahiran semakin rendah, yaitu 1,4 anak per perempuan, sedangkan usia harapan hidup senantiasa meningkat. Menurut perkiraan, jumlah penduduk Jerman akan berkurang sekitar tujuh juta jiwa hingga tahun 2050. Tantangan baru bagi sistem jaminan sosial ditimbulkan pula oleh bagian penduduk lanjut usia yang terus bertambah.

Perubahan demografi dengan konsekuensi serius pada perkembangan ekonomi dan jaminan sosial dikurangi oleh imigrasi. Sebanyak 20,3 persen orang yang hidup di Jerman (16,4 juta) memiliki riwayat pascamigrasi. Dari jumlah tersebut 9,2 juta memiliki paspor Jerman, dan 7,2 juta adalah warga negara asing. Warga yang berasal dari empat kelompok minoritas dikategorikan sebagai “lama menetap“ dan oleh sebab itu sangat dilindungi: minoritas Denmark (50.000 orang), kelompok Frislandia (60.000 orang) di Jerman Utara, kelompok Sorbia di daerah Lausitz (60.000 orang) di sepanjang perbatasan Jerman–Polandia, maupun warga Sinti dan Roma (70.000 orang).⁹⁷

⁹⁶ Federal Statistical Office, 2009, “*Germany’s Population by 2060*”, Wiesbaden: Federal Statistical Office.

⁹⁷ *Ibid.*

Di sisi lain, Jerman berkembang menjadi negara imigrasi yang disukai, dimana integrasi merupakan pokok penting Jerman. Sebanyak 16,4 juta warga dengan riwayat pascamigrasi menetap di sini. Jerman telah masuk ke kelompok negara tujuan migrasi paling utama di dunia. Menurut data Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), tahun 2014 Jerman merupakan negara yang paling banyak dituju oleh migran setelah Amerika Serikat. Selama beberapa tahun terakhir ini tidak ada negara lain di antara ke-34 negara anggota OECD yang mencatat kenaikan angka pendatang setinggi di Jerman. Sejak reunifikasi tahun 1990 terdapat 21 juta orang yang datang ke Jerman untuk menetap – sedangkan hanya 16 juta orang yang meninggalkan Jerman. Tahun 2013 tercatat angka imigrasi tertinggi sejak 1993, yaitu 1,2 juta pendatang. Neraca perpindahan penduduk pada tahun 2013 menunjukkan penambahan sebanyak 437.000 orang.⁹⁸

Secara keseluruhan 7,2 juta pemegang paspor asing tinggal di Jerman. Namun jumlah penduduk dengan riwayat pascamigrasi lebih besar, yaitu 16,4 juta orang. Termasuk dalam kelompok ini adalah para imigran, warga negara asing yang lahir di Jerman, dan orang yang ayah atau ibunya adalah imigran atau warga negara asing. Kelompok tersebut mencakup 20 persen lebih sedikit dari jumlah keseluruhan penduduk Jerman, sekitar 10,5 juta orang di antaranya bermigrasi secara mandiri. Sebanyak tiga perempat lebih para imigran berasal dari salah satu negara Eropa

⁹⁸ Worldometers, “*Germany Population*”, diakses melalui <http://www.worldometers.info/world-population/germany-population> pada 3 April 2016

lainnya.⁹⁹ Menurut Laporan Migrasi 2013, bagian terbesar pendatang pada tahun itu berasal dari Polandia dan Rumania. Minoritas etnik terbesar di Jerman terdiri dari hampir tiga juta warga keturunan Turki (di antaranya 1,3 juta warga negara Jerman). Banyak imigran generasi pertama datang ke Jerman sebagai pekerja tidak terampil berdasarkan Kesepakatan Perekrutan Tenaga Kerja dengan Turki 1961. Kini pendatang asal Turki mencakup pula mahasiswa, pengusaha dan tenaga ahli. Kelompok besar lainnya berasal dari bekas Yugoslavia atau negara-negara pecahannya. Dewasa ini 56 persen warga dengan riwayat migrasi memiliki paspor Jerman. Tahun 2014 sebanyak 108.420 warga negara asing dinasionalisasikan. Kelompok transmigran keturunan Jerman yang pindah dari negara-negara pecahan Uni Soviet mencakup sekitar 4,5 juta orang dan merupakan kelompok pendatang terbesar.¹⁰⁰

Sumbangan para migran bagi perkembangan di bidang kemasyarakatan dan perekonomian di Jerman cukup besar. Pemerintah Federal bertekad untuk tetap memungkinkan imigrasi, antara lain untuk mengatasi kekurangan akan tenaga terampil yang diakibatkan oleh perubahan struktur demografis. Menurut hasil studi Bertelsmann-Stiftung, sampai tahun 2050 jumlah penduduk Jerman usia produktif akan menurun dari 45 juta menjadi kurang dari 29 juta. Tanpa adanya arus imigrasi tetap, tekanan terhadap sistem jaminan sosial akan meningkat. Khususnya sistem jaminan hari tua didasarkan atas semacam perjanjian antargenerasi. Intinya, generasi yang bekerja sekarang membayar iuran untuk membiayai uang pensiun generasi yang sudah

⁹⁹ Rita Sussmuth, 2009, “*The Future of Migration and Integration Policy in Germany*”, Migration Policy Institute, diakses melalui <http://migrationpolicy.org/research/future-migration-and-integration-policy-germany> pada 1 Mei 2016.

¹⁰⁰ *Ibid*

berhenti dari dunia kerja – dengan mengharapkan bahwa kelak generasi yang akan datang tentu akan membiayai uang pensiun mereka melalui iurannya pula. Dengan meningkatnya kebutuhan akan tenaga terampil, semakin banyak juga imigran dengan kualifikasi baik datang ke Jerman. Bagian alumni perguruan tinggi antara pendatang baru tersebut lebih tinggi daripada bagian akademisi rata-rata dalam masyarakat Jerman.¹⁰¹

Meskipun terus mengalami penurunan namun Jerman masih merupakan negara di Uni Eropa dengan jumlah penduduk yang besar. Kondisi tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi Jerman dalam Dewan Uni Eropa yang menjadi bagian legislatif dari Uni Eropa. Jerman memiliki suara dominan dalam distribusi suara di dewan Eropa yaitu sebanyak 10 suara seperti halnya Prancis dan Inggris. Dengan populasi yang besar ini pula, Jerman dapat memainkan perannya di Uni Eropa sebagai negara yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Uni Eropa. Hal tersebut membuktikan Jerman memiliki keunggulan *size* dibanding negara lain di Uni Eropa. Dalam kaitannya dengan krisis Ukraina, Jerman memainkan peran yang penting sebagai mediator dalam upaya diplomasi krisis Ukraina karena lokasinya yang strategis sehingga dapat memainkan peran koordinasi antara negara-negara barat dan negara-negara timur khususnya Ukraina dan Rusia. Namun terlihat bahwa faktor geografis dan demografis bukan merupakan faktor yang cepat berubah melainkan lebih kepada faktor yang bersifat konstan sehingga determinan ini tidak mempengaruhi sikap politik Jerman dalam resolusi konflik Ukraina.

¹⁰¹ *Ibid.*

5.2.3 Sosial Budaya

Negara memiliki identitas nasional yang menjadi ciri dari negaranya. Identitas tersebut dibentuk oleh adanya nilai-nilai dan norma dari pengalaman masa lalu yang dapat membentuk perilaku masyarakat negara tersebut. Identitas masyarakat Jerman telah diatur dalam *Nationality and Citizenship Act* yang dibentuk pada 1948.¹⁰² Dengan begitu, seluruh masyarakat yang tinggal di Jerman berpedoman pada petunjuk tersebut.

Dengan penduduk yang berjumlah sekitar 81,2 juta orang, Jerman merupakan negara anggota Uni Eropa yang paling banyak penduduknya. Negara yang modern dan terbuka ini telah berkembang menjadi negara imigrasi penting. Lebih dari 16,4 juta orang di Jerman mampu nyai riwayat pascamigrasi. Jerman kini termasuk negara yang peraturan imigrasinya paling liberal. Menurut hasil studi Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dari tahun 2014, Jerman merupakan negara yang paling banyak dituju oleh migran setelah Amerika Serikat.

Dalam perbandingan internasional, kebanyakan orang di Jerman memiliki standar hidup tinggi serta peluang untuk mewujudkan cara hidup yang individual. Dalam “*Human Development Index 2014*” PBB, Jerman menempati peringkat 6 antara 187 negara. Peringkat pertama diperolehnya dalam “*Nation Brands Index 2014*”, yaitu angket internasional mengenai citra dari 50 negara – antara lain karena nilai baik Jerman di bidang kualitas hidup dan keadilan sosial. Menurut pengertiannya sendiri,

¹⁰² www.comlaw.de, 2009, dalam Michael Klappdor, Moira Coombs “*Germany’s Identity and Nationality*”, Parliamentary Library.

Jerman adalah negara sosial yang menganggap usaha menjamin ke-sejahteraan semua warganya sebagai tugas yang sangat penting.¹⁰³

Ciri yang tampak dalam masyarakat adalah pluralisme gaya hidup serta keanekaan dasar etnobudaya. Keadaan sehari-hari masyarakat berubah karena pengaruh gaya hidup dan kenyataan hidup yang baru. Para pendatang memperkaya negara dengan perspektif dan pengalaman baru. Masyarakat bersikap terbuka dan toleran terhadap cara hidup alter-natif serta orientasi yang berbeda di bidang hubungan seksual. Realisasi persamaan hak antara perempuan dan laki-laki semakin maju, pembakuan peranan yang tradisional tidak mutlak lagi. Penyandang disabilitas semakin aktif mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat.

Selama beberapa tahun terakhir ini di Jerman terjadi perubahan di bidang sosial dan ekonomi yang mengakibatkan kemunculan risiko sosial baru. Mulai tampak juga kecenderungan untuk lebih membedakan masyarakat menurut kekuatan ekonomi. Memang angka pengangguran tahun 2014 sama rendah seperti terakhir tercatat pada tahun 1991 – yaitu rata-rata 2,7 juta. Meskipun demikian hampir setiap penduduk keenam menghadapi ancaman jatuh miskin, khususnya golongan muda dan orangtua tunggal yang terancam. Perbedaan sosial masih terdapat juga antara bagian timur dan barat di Jerman.

¹⁰³ Patrick O’Connel. 2011. “*Germany’s Foreign Policy and National Identity*”

5.2.4 Pembangunan Ekonomi

Pesatnya perekonomian Jerman menunjukkan bahwa masyarakat Jerman adalah masyarakat industri yang berorientasikan pada perkembangan ekonomi. Jerman sebagai negara manufaktur memiliki kualifikasi pelaku bisnis yang kemudian menjadi kelompok kepentingan mengingat Jerman sangat tergantung pada sektor ekspor. Bagaimanapun kondisi negara yang kondusif serta hubungan kerjasama dengan mitra Jerman menjadi hal yang sangat penting guna mendukung kemajuan ekonomi. Terkait krisis yang terjadi di Ukraina, kelompok bisnis mulanya tidak sepakat atas pemberian sanksi Uni Eropa terhadap Rusia karena dikhawatirkan akan memberikan efek buruk bagi perekonomian Jerman, ternyata mulai mengubah persepsinya tentang tindakan tegas yang dilakukan Jerman melalui inisiatif pada resolusi konflik.

Jika dipertimbangkan, Rusia merupakan mitra kerjasama sejak tahun 1990 ketika berbagai jenis perjanjian bilateral ditandatangani. Pada tahun 2004, nilai perdagangan kedua negara mencapai 24 juta dolar Amerika, melampaui nilai perdagangan Rusia dengan Ukraina dan Belarusia. Rusia menjadi mitra perdagangan terbesar Jerman dengan volume perdagangan rata-rata sebesar 20% per tahun dalam tiga tahun terakhir. Sebagai contoh, Jerman berhasil menguasai investasi manufaktur otomotif dan bidang kimia dengan menjadi negara pengimpor utama bagi pasar Rusia. Tercatat investasi Jerman dalam bidang manufaktur otomotif menghasilkan 35,9% lapangan pekerjaan dan berkontribusi hingga 21,1% dari total proyek.¹⁰⁴ Kerjasama

¹⁰⁴Roland Gotz, 2007, "*Germany and Russia Strategic Partnership*, Geopolitical Affairs.

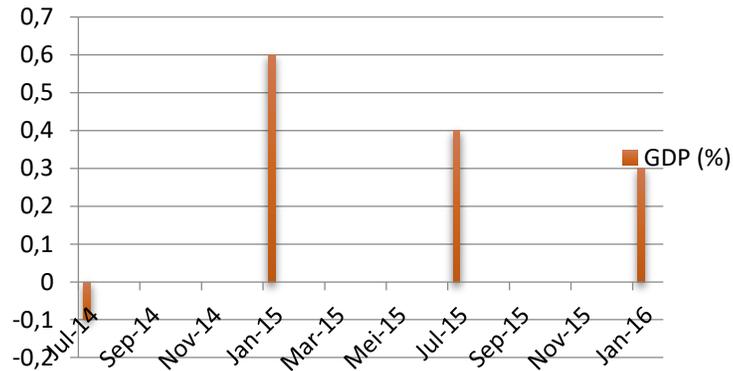
ekonomi kedua negara ini menjadikan Jerman sebagai negara anggota Uni Eropa yang memiliki nilai perdagangan dengan Rusia tertinggi dibanding negara anggota Uni Eropa lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Rusia merupakan investasi diplomatik terbesar bagi Jerman.¹⁰⁵

Pasca runtuhnya tembok Berlin, Jerman memiliki tanggung jawab yang lebih besar sebagai negara yang baru saja berdaulat dengan ekspektasi yang berbeda dari aliansi dan juga masyarakat internasional. Pengalaman Jerman sebagai negara agresif di masa sebelumnya, menuntut Jerman untuk lebih membuktikan kepada masyarakat internasional khususnya mitra aliansi sebagai negara yang kooperatif dan menjunjung nilai-nilai universal. Pasca unifikasi, secara perlahan Jerman membangkitkan perekonomian dan status politiknya dengan pendekatan multilateral dimulai dari *joint military* pada tahun 1990-an.

Secara ekonomi, Jerman mengalami pertumbuhan yang pesat hingga menempati urutan ke-4 dunia di tahun 2010. Jerman merupakan negara *export-oriented* terbesar ke-2 di dunia yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Dari tahun ke tahun, *Gross Domestic Product* (GDP) Jerman meningkat 2,1% yang menghasilkan rata-rata pertumbuhan GDP sebesar 0,32% sejak tahun 1991 hingga 2015.

¹⁰⁵ Andrei Zagorski, 2005, “*Russia and Germany: Continuity and Changes*”. Research Programme Russia.

Grafik 2. Tingkat Pertumbuhan GDP Jerman



Sumber: Hasil olah penulis dari sumber www.tradingeconomics/germany/gdp-growth

Tercatat Jerman menjadi negara dengan nilai perdagangan terbesar di Eropa dengan nilai 20,30 miliar euro pada Februari 2016. Kenaikan signifikan tersebut juga hasil dari naiknya nilai ekspor Jerman sebesar 4,1% dari tahun sebelumnya.¹⁰⁶ Jerman sudah merasakan keuntungan dari sektor ekspornya sejak tahun 1952 sebagai hasil kuatnya komoditi otomotif di Jerman yang mampu memenangkan pasar seperti di Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Prancis, Austria dan Emirates Arab. Jerman membuktikan sebagai negara yang mampu mentransformasi perekonomiannya pasca masa perang.

Kesuksesan ekonomi Jerman juga merupakan kontribusi atas upaya Jerman dalam *European Eastern Partnership*. Meskipun Jerman bukan negara penggagas

¹⁰⁶ Rida Husna, 2016, “*Germany Balance of Trade*”, diakses melalui <http://www.tradingeconomics.com/balance-of-trade> pada 17 Februari 2016

namun visi perluasan Uni Eropa ke negara-negara Eropa Timur ini juga menjadi kepentingan Jerman. Jerman menginisiasi beberapa *milestone* untuk kebijakan *European Neighborhood Policy* (ENP) salah satunya pada 2006 Jerman menginisiasi ENP Plus yang merupakan kerangka kerjasama yang mengutamakan negara-negara Eropa Timur dalam dimensi ENP. Jerman juga secara aktif mempromosikan pentingnya kerjasama dengan Eropa Timur termasuk Rusia. Bermula dari inisiatif Jerman di tahun 2008 untuk memmbentuk *modernization partnership* dengan Rusia, Uni Eropa kemudian juga mengadopsi *modernization partnership* dengan Russia di tahun 2010.¹⁰⁷

Tahun 2016 perekonomian Jerman memasuki tahun pertumbuhan ketujuh secara berturut-turut, jumlah orang yang bekerja mencapai rekor, pendapatan dari negara dan dari asuransi jaminan sosial telah meningkat. Pembuatan utang baru di tingkat Federasi ditekan sampai angka nol. Transisi energi dimajukan– energi-energi terbarukan sedang berkembang menjadi teknologi utama untuk pembangkitan listrik. Reformasi sistem-sistem sosial yang dilakukan pada awal tahun 2000-an, yang dikenal sebagai Agenda 2010, memberi kontribusi juga, sehingga Jerman dapat mengatasi krisis-krisis keuangan yang terjadi sejak tahun 2008 dengan lebih baik, dibandingkan dengan negara-negara lain di Kawasan Euro.

5.2.5 Opini Publik

¹⁰⁷Liana Fix dan Anna-Lena Kirch, 2016, “*Germany and The Eastern Partnership after Ukraine Crisis*”, Brussels: IFRI, hal. 7

Opini publik diartikan sebagai pendapat masyarakat berdasarkan pada persamaan latar belakang, nilai-nilai yang dimiliki, pengalaman masa lalu dan berita yang berkembang yang selanjutnya menjadi persepsi kemudian berubah menjadi opini dan opini yang berkembang ini menjadi konsensus karena adanya kesamaan tertentu seperti ikatan emosional, perasaan gembira atau kekecewaan, kemudian konsensus yang menyatu ini disebut sebagai opini publik.¹⁰⁸ Opini publik tersebut berasal dari berita yang disebarkan media massa sebagai penghubung antar pemerintah dan masyarakat sehingga akhirnya media massa memiliki peran penting dalam menentukan informasi apa yang akan disebarkan, *image* seperti apa yang akan ditampilkan, *angle* apa yang digunakan, serta siapa tujuan dari pemberitaan tersebut. Meskipun opini publik merupakan input yang secara tidak langsung mempengaruhi pembuatan kebijakan, namun opini tersebut merupakan instrumen penting bagi ukuran sebuah pemerintahan.

Pada masyarakat di negara demokrasi, setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya terkait apapun yang terjadi pada pemerintahan baik mengenai hal domestik ataupun non-domestik. Jerman dikenal sebagai *civilian power* bukan hanya karena negara tersebut menganut sistem demokrasi melainkan masyarakat Jerman memainkan peran krusial dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan Jerman baik dalam negeri atau luar negeri. Terkait sikap politik Jerman yang secara aktif mengupayakan diplomasi dalam resolusi konflik Ukraina pada masa kepemimpinan

¹⁰⁸Rhenal Kasali, 2003, “*Manajemen Public Relations, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*”, Jakarta: Pustaka Utama.

Angela Merkel, terdapat beberapa opini publik yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut.

Sebagai negara yang sebelumnya memiliki dua identitas nasional sebelum reunifikasi, perbedaan identitas sangat mempengaruhi pandangan publik terhadap suatu fenomena. Terdapat dua jenis masyarakat di Jerman ketika dihadapkan pada peristiwa yang berhubungan dengan Rusia. Pertama adalah *Amerika-Freunde* yang menekankan pada pendekatan berupa sanksi ekonomi yang tegas bagi Rusia. Sedangkan bagi *Russia-Versteher*, kerjasama dengan Rusia merupakan kunci utama, tidak dengan memunculkan konfrontasi.¹⁰⁹ Dalam perbedaan pendapat ini, terdapat elit politik penting yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Seperti contoh, beredarnya surat terbuka dari kalangan *Rusia-Versteher* yang dipublikasikan pada halaman salah satu media cetak Jerman, *Die Zeit*, pada Desember 2014. Surat terbuka ini ditandatangani beberapa tokoh politik penting Jerman di masa sebelumnya. Tercatat 60 tokoh, termasuk di dalamnya kanselir terdahulu Gerhard Schroeder dari SPD dan juga Presiden terdahulu Roman Herzog dari CDU.¹¹⁰

Bagaimanapun, media sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam pembentukan opini publik. Terdapat dua jenis media di Jerman berdasarkan ideologi yang mereka gunakan. Dalam krisis Ukraina, baik media sayap kiri maupun sayap kanan menampilkan kolom khusus yang membahas perkembangan krisis Ukraina. Meskipun krisis Ukraina yang diawali dari konflik

¹⁰⁹“ *The German chancellor is caught between her country’s Amerika-Freunde and Putin Versteher.*”, diakses melalui

¹¹⁰ Grzegorz Gromadzki, 2015, “*Perception of the Russia-Ukraine conflict in Germany and in Poland – an evaluation*”, Warsaw: Heinrich Boll Foundation. Hal. 8

internal bukan merupakan fenomena baru, namun terdapat masa-masa peningkatan ketertarikan masyarakat terhadap krisis Ukraina. Diawali adanya Euromaidan protes terhadap pemerintahan Victor Yanukovich pada tahun 2013, aneksasi Krimea oleh Rusia, dan intervensi Rusia di Donbass pada musim semi di tahun 2014, Ukraina menjadi topik bahasan masyarakat Jerman. Kompleksitas krisis Ukraina yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang juga menentukan bagaimana opini masyarakat dibentuk. Jika beberapa artikel internasional memuat “Konflik Rusia-Ukraina” atau “Agresi Rusia terhadap Ukraina”, namun media Jerman lebih menggunakan “Krisis Ukraina” sebagai headline berita. Sebagai pembandingan, *headline* “Konflik Rusia-Ukraina” lebih sering muncul pada media Polandia.¹¹¹ Opini publik terkait krisis Ukraina tersebut menunjukkan perbedaan pendapat dari masyarakatnya yang merupakan sesuatu yang wajar dalam sebuah negara demokrasi. Beberapa pendapat berupa kritik dan tekanan mengenai aksi agresif Rusia di Ukraina yang mengancam keamanan regional pada umumnya, di sisi lain terdapat pula pendapat yang berupa toleransi atas aksi Rusia di Ukraina.

Perubahan generasi juga mempengaruhi persepsi masyarakat Jerman terhadap isu-isu internasional. Terdapat perilaku atau persepsi tertentu yang dimiliki masyarakat Jerman berdasarkan pengalaman masa lalu yang saat ini mengalami pergeseran. Generasi tua yang cenderung memiliki persepsi yang baik terhadap Rusia saat ini mulai meningkatkan keinginannya terhadap pemerintah Jerman untuk lebih terintegrasi dengan Barat dan juga Amerika Serikat. Generasi muda yang lahir pasca reunifikasi

¹¹¹ *Ibid.*

memiliki kecenderungan persepsi agar Jerman lebih terlibat dalam level internasional untuk mendukung nilai-nilai seperti hak asasi manusia, dengan tidak mengutamakan tindakan militer.¹¹²

Pada jajak pendapat yang dilakukan di tahun 2014, data menunjukkan sebanyak 44% masyarakat menyatakan sanksi ekonomi Uni Eropa merupakan solusi yang tepat bahkan sebanyak 23% menginginkan agar sanksi tersebut diperkuat. Hanya 23% yang menginginkan agar sanksi ekonomi diringankan.¹¹³ Masyarakat Jerman memberikan dukungan yang besar pada Angela Merkel dalam menyelesaikan krisis Ukraina. Pengalaman sejarah Jerman yang sebelumnya terbagi menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur juga mempengaruhi opini publik dalam mempersepsikan suatu fenomena. Jerman Barat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan demokrasi dan sistem ekonomi yang bebas sedangkan Jerman Timur dipengaruhi oleh pemerintahan komunis dengan *planned economy* dan pengawasan dari aparaturnegara yang sangat ketat.

Sejak 2014, tercatat adanya peningkatan ketertarikan masyarakat pada isu-isu kebijakan luar negeri Jerman yaitu sebanyak 68%.¹¹⁴ Data terbaru dari *Paw Research Center* menunjukkan sebesar 44% responden di Jerman Timur lebih memilih untuk meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat dibanding Rusia. Sedangkan sebanyak 61% responden di Jerman Barat memilih hubungan yang lebih kuat dengan

¹¹²Korber Stiftung, “*Intervene or With Hold*”, Hal. 6-8

¹¹³ *Ibid.* Hal. 6

¹¹⁴Korber Stiftung, 2014, “*Intervene or With Hold*”, Germany: Hamburg, diakses melalui http://www.koerberstiftung.de/fileadmin/user_upload/internationale_politik/sonderthemen/umfrage_aussenpolitik/Koerber-Stiftung_Umfrage_Aussenpolitik_Broschuere.pdf. Pada 30 Maret 2016.

Amerika Serikat.¹¹⁵ Faktanya adalah Jerman saat ini dipimpin oleh Angela Merkel yang sebelumnya dibesarkan di GDR. Hal tersebut juga memberikan pengaruh pada perumusan kebijakan Jerman pada krisis Ukraina akan dijelaskan lebih rinci pada sub-bab selanjutnya.

Meskipun Merkel berasal dari Jerman Timur, namun pemerintahan Merkel mampu membuktikan sebagai pemimpin pragmatis yang memenangkan hati rakyatnya. Pada jajak pendapat yang dilakukan bulan Februari 2014 oleh ARD Deutschlandtrend menunjukkan sebanyak 57% responden menyatakan kepuasannya pada kinerja pemerintah. Jerman yang saat ini dipimpin oleh *Grand Coalition* yang berarti pemerintah didukung oleh masyarakat dengan jumlah yang besar.¹¹⁶

Berdasarkan pengalaman sejarah Jerman, terdapat dua jenis kelompok masyarakat; yang pertama adalah masyarakat yang pro terhadap kebijakan yang tidak menimbulkan konfrontasi yang dapat memicu konflik. Kelompok ini menunjukkan sikap pasifis dari Jerman yang mana penekanan pada solusi damai dan penyelesaian melalui dialog menjadi poin penting bagi kelompok pertama dalam memandang kebijakan pemerintah.¹¹⁷ Tradisi pasifis menjadi efek dari pengalaman Jerman di masa lampau yang dikenal sebagai negara agresor.

Grafik di bawah menunjukkan adanya penurunan terhadap citra Rusia di mata masyarakat Jerman. Pada November 2009 ketika Medvedev memimpin dan

¹¹⁵Pew Research Center, 2015, “*Germany and the United States: Reliable Allies*,” *Pew Research Center: Global Attitudes and Trends*, <http://www.pewglobal.org/2015/05/07/germany-and-the-united-states-reliable-allies/>. Diakses pada 30 Maret 2016.

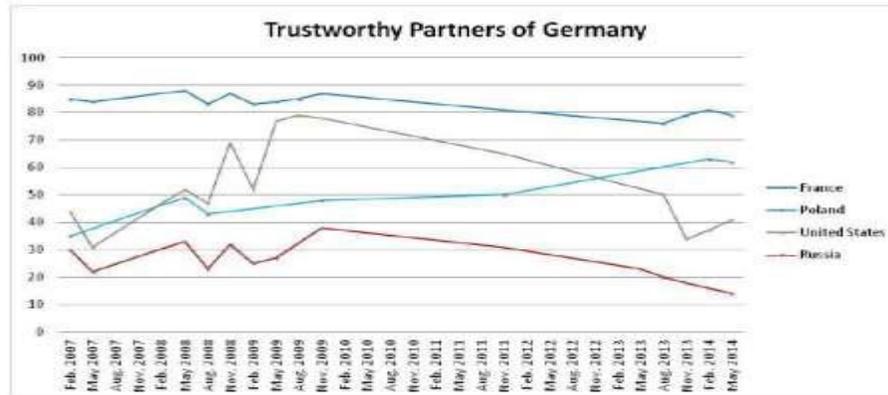
326Jochen Bittner,

¹¹⁶Jacek Kucharczyk, 2015, “*Close together or far apart? Poles, Germans and Russians on the Russia-Ukraine Crisis*”, Institute of Public Affairs European Program. Hal. 19

¹¹⁷ *Ibid.*

menyatakan ingin lebih meningkatkan kerjasamanya dengan Barat melalui konsep modernisasi, sebanyak 40% masyarakat Jerman menyatakan bahwa Rusia dapat dipercaya.¹¹⁸ Adanya penurunan citra Rusia ini kemudian juga membentuk persepsi masyarakat Jerman atas tindakan Rusia di Ukraina. Sebanyak 80% masyarakat Jerman menyatakan eskalasi konflik di Ukraina adalah kesalahan Rusia sehingga sebesar 62% masyarakat menuntut adanya sanksi yang lebih tegas terhadap Rusia meskipun konsekuensi ekonomi menjadi ancaman nyata bagi Jerman.¹¹⁹

Gambar 1. Survey Mitra Jerman



Question: I will now name several countries. Please tell me whether the country concerned can be considered a partner for Germany which one can or cannot trust.
 Source: Infratest, ARD DeutschlandTREND: May 2014, <http://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend2238.pdf>.

Sumber: Infratest¹²⁰

Terkait krisis Ukraina yang terjadi sejak tahun 2013, sebanyak 40% masyarakat mendukung peran penting yang diambil pemerintah Jerman dengan upaya resolusi konflik melalui diplomasi. Namun, perkembangan isu area krisis yang terjadi pasca

¹¹⁸Infratest, *Infratest-dipmap.de*, Agustus 2014, diakses melalui www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2014/august/ Survey dilakukan oleh Infratest pada bulan-bulan selanjutnya menunjukkan sebanyak 82% responden menyatakan aksi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina merupakan tindakan yang mengancam, sebanyak 61% menginginkan Uni Eropa segera menindak tegas Rusia. Diakses melalui www.infratest-dimap.de/uploads/media/dt1409_bericht.pdf pada 2 Maret 2016.

¹¹⁹Survey oleh Infratest, Mei 2014 untuk TV German channel *Das Erste*, DeutschlandTREND, Diakses melalui www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend2238.pdf pada 2 Maret 2016

¹²⁰Infratest, *Infratest-dipmap.de*, Agustus 2014

jatuhnya pesawat Malaysia MH17 mengubah persepsi masyarakat Jerman atas krisis Ukraina. Masyarakat Jerman semakin memperhatikan peran Jerman di level internasional dengan hasil survey yang meningkat sebesar 19% menjadi 59% pada akhir Juli 2014. Di saat yang sama, sebanyak 80% masyarakat Jerman menyatakan bahwa Rusia bertanggung jawab atas kejadian tersebut.¹²¹

Pew Research Center memperbarui jajak pendapat yang mereka lakukan di tahun 2015. Sebanyak lebih dari 50% menyatakan untuk tidak memprioritaskan Rusia khususnya dalam hubungan ekonomi. Hanya sebanyak 34% responden yang mendukung hubungan bilateral Jerman dan Rusia.¹²² Opini publik yang terangkum dalam jajak pendapat tersebut kemudian menjadi *influencer* dari keputusan Jerman dalam upaya resolusi konflik Ukraina. Berdasarkan data yang telah dihimpun, terdapat perubahan opini publik Jerman yang termasuk dalam perubahan internal pada masyarakat. Perubahan signifikan ditunjukkan persepsi publik Jerman dalam memandang krisis Ukraina dan peran negaranya pada krisis tersebut.

Sebagai negara yang mengalami perang pada masa lampau, peristiwa tersebut mampu memunculkan persepsi baru akan negaranya; apakah masyarakat tersebut menginginkan negaranya terlibat aktif dalam urusan eksternal atau justru menutup diri dari lingkungan internasional. Dalam hal ini masyarakat Jerman memiliki persepsi yang baru atas negaranya untuk tetap memainkan peran pentingnya selama hal tersebut tidak mengutamakan aspek militer.

¹²¹ Infratest Dimap, 2014, “*ARD DeutschlandTREND*” [*ARD German Trend*], diakses melalui <http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2014/august/> pada 18 Maret 2016

¹²² Pew Research Center, 2015, “*Germany and the United States*”. Hal. 11-12

Perubahan yang terjadi pada opini publik Jerman yaitu pada rentan waktu 2005 hingga 2015. Dapat dikatakan pada awal Merkel menjabat di tahun 2005, tidak banyak isu internasional yang menjadi perhatian atau fokus kebijakan luar negeri Jerman. Sejak terjadinya krisis Ukraina di tahun 2013, ketertarikan masyarakat akan isu internasional menunjukkan kenaikan sebesar 40%. Hal tersebut menjadi wajar karena sejak awal terjadinya konflik, Jerman sudah secara aktif mengambil inisiatif dialog dalam upaya resolusi konflik. Masyarakat Jerman semakin sadar akan peran negaranya di level internasional sehingga krisis Ukraina mulai jadi perhatian bagi masyarakat Jerman.

Penulis melihat perubahan opini publik Jerman sebagai faktor yang mempengaruhi. Hasil jajak pendapat yang ditampilkan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa opini publik mengikuti keputusan Jerman, bukan mengarahkan perumusan kebijakan. Jerman telah mengupayakan diplomasi melalui berbagai dialog pada krisis Ukraina hingga akhirnya opini publik menunjukkan persetujuan atas keputusan Jerman yang terlibat dalam resolusi konflik Ukraina dengan hasil sebanyak 53% penilaian positif publik Jerman terhadap pemerintah. Responden yang secara positif menilai kinerja Merkel dan *Foreign Office* dalam upaya resolusi konflik Ukraina ini juga diikuti oleh persepsi bahwa Rusia bertanggung jawab atas konflik tersebut. Opini publik ini kemudian sejalan dengan pidato-pidato yang selalu Merkel ungkapkan tentang tindakan Rusia yang tidak bertanggung jawab.

Tingginya pandangan positif masyarakat Jerman terhadap kebijakan Jerman pada krisis Ukraina menjadi relevan karena persepsi masyarakat tidak terbebani oleh kritik terhadap pemerintah. Terlebih lagi sikap politik Jerman tersebut diputuskan oleh

Kanselir yang berasal dari CDU dan Menteri Luar Negeri dari SPD, fakta ini dapat menaikkan dukungan masyarakat pendukung partai terhadap sikap politik tersebut.

Berdasarkan perubahan opini publik tersebut, Jerman tetap mengupayakan diplomasi dalam resolusi konflik Ukraina. Angela Merkel menginisiasi berbagai dialog dan mengupayakan tercapainya kesepakatan di antara pihak yang berkonflik yang diawali dengan pertemuan informal *Weimar Triangle*, dialog *Normandy Format*, hingga tercapainya kesepakatan Minks. Fokus penanganan konflik Ukraina yang dilakukan Merkel kemudian menciptakan citra positif di level internasional atas peran aktifnya dalam mencapai resolusi konflik di Ukraina. Hal tersebut yang kemudian semakin menguatkan opini publik Jerman agar lebih berperan dalam penyelesaian konflik internasional dan lebih berorientasi pada Barat, bukan Rusia.

Perubahan opini publik akibat meluasnya isu area juga menyebabkan menurunnya citra Rusia pada masyarakat Jerman. Opini publik menunjukkan perubahan terjadi pada kelompok grup yang dikenal sebagai *Russia-Versteher*. Adanya pergeseran akan pemahaman krisis Ukraina-lah yang menyebabkan Jerman lebih realistis dalam melihat krisis Ukraina meskipun pendekatan yang digunakan tetap pada solusi damai.

5.2.6 Struktur Pemerintahan

Sepuluh dari sedikitnya 598 kursi di Bundestag diperoleh melalui daftar calon yang disusun oleh partai pada tingkat negara bagian (suara kedua), separuhnya lagi diperoleh melalui perorangan yang dicalonkan di salah satu dari 299 distrik pemilihan (suara pertama). Sistem pemilihan umum Jerman membuat sulit bagi sebuah partai

untuk secara mandiri membentuk pemerintahan, – umumnya terjadi persekutuan antarpartai alias koalisi. Untuk tidak merumitkan perbandingan kekuatan karena kehadiran partai-partai kecil, diberlakukan ketentuan pembatas, yaitu pencapaian minimum lima persen suara untuk memperoleh kursi di Bundestag.¹²³

Saat ini terdapat lima partai di Bundestag: CDU, CSU, SPD, Die Linke (Partai Kiri) dan Bündnis 90/Die Grünen (Partai Hijau). CDU bersama dengan mitranya di Bavaria CSU sejak pemilihan Bundestag pertama tahun 1949 membentuk fraksi bersama di Bundestag. Partai Liberal (FDP) pada pemilihan Bundestag 2013 tidak mencapai batas minimum lima persen suara dan untuk pertama kalinya sejak tahun 1949 tidak terwakili di Bundestag. Pemerintahan saat ini berbentuk koalisi yang terdiri atas CDU/CSU dan SPD, dengan Dr. Angela Merkel (CDU) sebagai Kanselir Federal, Sigmar Gabriel (SPD) sebagai Wakil Kanselir dan Dr. Frank-Walter Steinmeier (SPD) sebagai Menteri Luar Negeri. Partai Kiri dan Partai Hijau membentuk oposisi di parlemen.¹²⁴

Seperempat abad setelah reunifikasi, Jerman merupakan negara yang berbasis nilai etika, yang demokratis, yang maju ekonominya, dan yang terbuka. Kehidupan politiknya beragam; partai-partai demokratis bersaing – namun mereka juga saling menaruh respek dan mengikat perjanjian koalisi di berbagai tingkatan. Sejak pemillihan umum untuk Parlemen Federal (Bundestag) ke-18 pada tahun 2013, Pemerintah Jerman berbentuk “Koalisi Besar” antara partai-partai CDU/CSU dan SPD,

¹²³ Facts about Germany, “*Federal State*”, diakses melalui <http://www.tatsachen-ueber-deutschland.d/en/federal-state> pada 8 April 2016.

¹²⁴ *Ibid. Political Parties.*

yang berarti persekutuan antara kedua kekuatan besar dalam sistem partai Jerman. Dari ke-630 kursi di parlemen, partai-partai koalisi tersebut menempati 503 (CDU/CSU 310, SPD 193). Pihak oposisi yang terdiri dari Partai Kiri (64 kursi) dan Partai Hijau (63 kursi) harus puas dengan 127 kursi. Kelompok oposisi ini merupakan yang terkecil sejak lebih dari 40 tahun. Kanselir Federal Dr. Angela Merkel (CDU) menjabat sebagai kepala pemerintahan sejak tahun 2005 dan menjalani masa jabatannya yang ketiga. Dalam sejarah Republik Federal Jerman, Angela Merkel adalah perempuan pertama yang menjabat sebagai kanselir. Merkel dibesarkan di bekas RDJ dan meraih gelar doktor ilmu fisika di sana pula. Peringkat “Forbes Magazine” tahun 2014 dan 2015 mencantumkannya pada posisi pertama sebagai perempuan yang pa-ling berkuasa di dunia. Wakil Kanselir Sigmar Gabriel (Menteri Ekonomi) dan Dr. Frank-Walter Steinmeier (Menteri Luar Negeri) merupakan wakil penting Partai SPD dalam kabinet. Pemerintah Federal terdiri dari 14 menteri yang masing-masing memimpin sebuah resor, dan Kepala Kantor Kanselir. Dasar untuk kerja sama partai-partai pemerintah dalam masa legislasi yang sedang berlangsung hingga tahun 2017 diletakkan dalam perjanjian koalisi yang bertajuk “Membentuk Masa Depan Jerman.” **SUMBER**

Pemilihan umum Bundestag pada 2013 lalu menghasilkan koalisi antara *Christian Democratic Union* (CDU) yang merupakan partai dimana Angela Merkel berasal, berhasil mendapatkan 310 kursi dan *Social Democratic Party* (SPD) yang mendapat 193 kursi.¹²⁵ Sebelumnya pada 2005 hingga 2009, CDU juga berkoalisi dengan SPD sehingga saat ini bukan kali pertama Merkel bekerja bersama Steinmeier.

¹²⁵ German Bundestag, 2015, “*Parliamentary Groups*”, diakses melalui http://www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/groups pada 26 Desember 2015

Koalisi besar di tahun 2013 ini berhasil menduduki lebih dari 500 kursi dari 630 kursi di *Bundestag*.

Dalam perpolitikan domestik, nilai-nilai yang dianut partai juga mempengaruhi bagaimana kebijakan di formulasikan. Politik domestik Jerman terbagi menjadi dua orientasi; yang pertama yaitu partai yang memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia, seperti *Green Party* dan CDU, sedangkan politik realis, mendasar pada kepentingan, diutamakannya sektor ekonomi berada pada partai SPD. **SUMBER**

Salah satu aspek penting dalam demokrasi adalah tingkat partisipasi politik. Partisipasi politik diartikan tidak hanya berupa memilih calon pemimpin tetapi masyarakat bisa turut andil dalam proses politik. Demokrasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bergabung dalam partai politik, menjadi bagian dari inisiatif masyarakat, menandatangani petisi, aksi boikot dari sebuah produk/program atas alasan politik, ataupun menjalankan birokrasi; merupakan partisipasi politik. Jerman sendiri memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, namun sebanyak 91% berasal dari pekerja. Tingkat partisipasi politik yang sangat rendah bagi pengangguran menyebabkan *gap* yang tinggi dengan partisipasi politik yang kebanyakan dilakukan para pekerja di Jerman.¹²⁶ Sebagai negara demokrasi yang aktif, Jerman menganut sistem pemilu proporsional yang dimodifikasi dan diarahkan pada person calon legislator. Setiap pemilih mempunyai dua suara. Suara pertama untuk calon salah satu partai di distrik pemilihan, suara kedua untuk daftar calon partai di tingkat negara

¹²⁶ Martin Kroh dan Christian Konneke, 2014, "*Poor, Unemployed, and Political Inactive?*", Vol. 4 No. 1, Berlin: DIW Berlin Hal. 6

bagian. Dasar untuk penentuan jumlah kursi di Bundestag adalah suara kedua.

SUMBER

Office for Democratic Institutions and Human Rights, Elections of the Federal Parliament (Bundestag): Atas undangan Jerman, Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) mengamati pemilihan parlemen tanggal 22 September 2013. Laporan para ahli OSCE khususnya membahas peraturan hukum baru mengenai pembagian kursi lebih adil di Bundestag yang diterapkan untuk pertama kali dalam pemilihan tersebut.¹²⁷

Perubahan persepsi dari elit politik Jerman terjadi ketika Rusia tidak lagi menunjukkan sikap kooperatif yaitu ketika aksi aneksasi terhadap Krimea. SPD yang memiliki nilai-nilai yang cenderung berpihak pada Rusia harus menerima realitas politik pada krisis Ukraina sehingga Koalisi Besar berpandangan bahwa aksi Rusia merupakan hal yang tidak dapat ditoleransi. Atas dasar hal tersebut, maka terlihat adanya perubahan pandangan yang disebabkan meluasnya isu area krisis terkait keterlibatan Rusia pada konflik Ukraina.

5.3 Leadership Change: Nilai dan Karakter Angela Merkel

Angela Dorothea Kasner atau yang dikenal sebagai Angela Merkel mendapat beberapa penghargaan diantaranya sebagai *Chancellor of the Free World* oleh majalah TIME untuk tahun 2015 mengalahkan beberapa tokoh politik dunia seperti Donald Trump dan Hassan Rouhani.¹²⁸ Prestasi dan pencapaiannya baik di tingkat domestik

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸

maupun internasional juga mengantarkannya masuk dalam daftar wanita paling berpengaruh selama delapan kali berturut-turut versi majalah *Forbes*.¹²⁹ Wanita kelahiran tahun 1954 ini menjadi Kanselir wanita pertama di Jerman dan termasuk seseorang yang berperan penting dalam integrasi Uni Eropa.

Meskipun Angela Merkel terlahir di Hamburg, Jerman Barat namun karena keinginan orang tuanya untuk mendapatkan ilmu teologi maka Merkel pun menghabiskan masa kecilnya di bagian utara Berlin, tepatnya di desa Quitzow, GDR. Tiga tahun kemudian, Merkel menghabiskan masa mudanya di Templi, sebuah kota yang dipenuhi hutan dan danau yang juga dekat dengan markas tentara Uni Soviet. Merkel tinggal bersama orang tua di perumahan gereja yang menjadi satu bagian dengan masyarakat Jerman yang memiliki disabilitas. Masa muda Merkel dilalui seperti remaja pada umumnya bahkan Merkel memperlakukan penderita disabilitas seperti manusia normal dengan kebaikan hatinya. Meskipun tinggal di GDR dengan kuatnya pengaruh komunis dengan aturan diktator, tidak membuat Angela Merkel trauma bahkan pengalaman tersebut yang justru mendorong Merkel untuk memberikan kebebasan kepada masyarakatnya.

Pada dasarnya, Merkel bukanlah seorang aktivis melainkan seorang ilmuwan. Merkel menjalankan masa studinya di Universitas Leipzig hingga gelar doktor yang Merkel dapatkan di tahun 1978 yang mengantarkan dirinya menjalani profesi sebagai

¹²⁹ *"Ten Reasons Angela Merkel is the World's Most Powerful Woman"*, diakses melalui <http://www.theguardian.com/world/2015/jan/07/ten-reasons-angela-merkel-germany-chancellor-world-most-powerful-woman> pada 10 Maret 2016

ahli kimia di *Central Institute for Physical Chemistry* sejak tahun 1978 hingga 1990.¹³⁰ Tercatat Jerman selalu dipimpin oleh kanselir yang memiliki latar belakang politik namun berbeda dengan Merkel yang berasal dari kalangan ilmuwan. Dalam memutuskan suatu kebijakan atau bersikap, Merkel selalu merujuk pada fakta, statistic, dan data, bukan pada faktor politis atau ideologi.¹³¹

Karir politik Merkel bermula pasca runtuhnya tembok Berlin di tahun 1989 dengan menjadi anggota partai CDU. Kanselir Jerman pada waktu itu, Helmut Kohl, menunjuknya sebagai Menteri Perempuan dan Pemuda dan selanjutnya ditunjuk sebagai Menteri Lingkungan dan Keamanan Nuklir. Setelah kekalahan Kohl pada pemilihan umum di tahun 1998, Merkel menjadi sekretaris umum CDU dan berhasil menjadi ketua partai di tahun 2000 namun Merkel mengalami kekalahan pada proses kandidansi kanselir di tahun 2002. Pada pemilihan umum tahun 2005, Merkel mengalahkan kanselir Gerhard Schroeder dan membentuk koalisi bersama partai SPD hingga ia dikenal sebagai kanselir wanita pertama di Jerman. Keberhasilan Merkel menjadi kanselir terulang kembali untuk kedua kalinya di tahun 2009. Kepemimpinan Merkel sebagai kanselir wanita pertama menarik perhatian dunia karena Merkel adalah satu-satunya warga GDR yang mampu memimpin Jerman pasca unifikasi. Merkel juga memainkan peran politiknya di level internasional. Pada tahun 2007, Merkel menjadi Presiden dari Dewan Eropa dan berhasil menjadi tuan rumah G8. Penghargaan lain

¹³⁰ “*Angela Merkel Biography*”, diakses melalui <http://www.biography.com/people/angela-merkel-9406424#first-female-chancellor> pada 10 Maret 2016

¹³¹ Volker Wagener, “*The Past that Shaped Angela Merkel*”, diakses melalui <http://www.dw.com/en/the-past-that-shaped-angela-merkel/a-17028533> pada 11 Maret 2016

yang didapatkan yaitu *Jawaharlal Nehru Award* di tahun 2009 dari pemerintah India.¹³²

Selama masa kepemimpinannya, Merkel dikenal sebagai pemimpin *leading from behind* yang mengadopsi gaya kepemimpinan *Die Politik der kleinen Schritte* (*the politics of baby steps*) oleh Willy Brandt. Gaya kepemimpinan ini berhasil mengantarkan Merkel mengembalikan citra Jerman dari kesan agresif di masa lampau. Dengan nilai-nilai yang mendasar pada kemanusiaan, murah hati, dan toleransi menjadi penangkal dari citra Jerman di masa lampau. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari beberapa peristiwa yang terjadi seperti bagaimana Merkel menyelamatkan krisis finansial Yunani, bagaimana Merkel merespon kekerasan yang terjadi di Paris, dan bagaimana Merkel menyikapi krisis Ukraina.¹³³

Pada saat krisis ekonomi melanda, Merkel mampu menangani resesi jangka panjang tersebut dengan strategi member paket stimulus ekonomi dan mempersingkat jam kerja bagi para pekerja tetapi tetap mendapatkan gaji yang tinggi dari pemerintah. Kondisi Jerman sebagai eksportir juga mendukung Jerman untuk bertahan pada masa krisis. Merkel juga dikenal sebagai pemimpin yang pro-rakyat. Salah satunya melalui keputusannya memberikan upah minimum bagi pekerja untuk mengurangi ketimpangan sosial. Kebijakan lain Merkel yang mengejutkan yaitu ketika Merkel menyatakan akan melakukan reformasi energi dengan menutup delapan dari 17 reaktor

¹³² "What Personality Type is Angela Merkel?", 2012, diakses melalui <http://www.psychologytoday.com/blog/the-career-within-you/201207/what-personality-type-is-angela-merkel> pada 11 Maret 2016

¹³³ Ilan Mochari, 2015, "Magazine's Person of the Year", diakses melalui <http://www.inc.com/ilan-mochari/time-person-of-year-angela-merkel.html> pada 10 Maret 2015

nuklirnya dan menutup sisa reaktor nuklirnya paling lambat di tahun 2022.¹³⁴ Sebagai rencana jangka panjang, Merkel ingin fokus pada penggunaan energi alternatif yang dikenal dengan *Energiewende* (transformasi energi) yang menjadikan Jerman sebagai negara pemimpin dalam hal transformasi energi dalam menanggulangi efek pemanasan global.¹³⁵

Nilai-nilai keyakinan yang dianut Merkel yaitu sebagai seorang Kristian juga dicerminkan melalui pidato yang disampaikan. Pada tahun 2010, Merkel dalam partainya mengupayakan terbentuknya masyarakat Jerman yang multikultural dengan rasa toleransi yang tinggi namun tidak berhasil. Mengutip pernyataan Merkel:

*“The concept that we are living side by side and are happy about it does not work and we feel attached to the Christian concept of mankind, that is what defines us. Anyone who does not accept that is in the wrong place”*¹³⁶

Meskipun demikian, Merkel berasal dari partai CDU yaitu sayap kanan yang sebenarnya nama *Christian* tersebut tidak berarti bahwa partai tersebut menunjukkan aspek religious. Nama Kristian pada partai hanya sebagai nama pada awal dibentuknya partai yaitu pada masa Jerman sangat memperhatikan agama.

Pada level internasional, beberapa kebijakan Merkel membuat Jerman dikenal sebagai pemimpin *de facto* Uni Eropa karena kesempatannya dalam menentukan arah kebijakan Uni Eropa. Krisis yang terjadi telah mendefinisikan Merkel sebagai kanselir yang memiliki pembeda dari kanselir sebelumnya.

¹³⁴ William Pentland, “*Why is So Revolutionary About Germany’s Energiewende*”, diakses melalui <http://www.forbes.com/sites/williampentland/2015/12/07/what-is-so-revolutionary-about-germanys-energiewende/#4d074e1c65b7> pada 11 Maret 2016

¹³⁵

¹³⁶ Tom Kershaw, 2012, “*The Religion and Political views of Angela Merkel*”, diakses melalui <http://hollowverse.com/angela-merkel/> pada 8 Maret 2016

Terkait krisis Ukraina, Merkel memiliki pendekatan yang berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Masa muda Merkel yang dihabiskan di Jerman Timur membuatnya lebih mudah dalam menjalin dialog dengan Presiden Vladimir Putin karena kemampuan berbahasa Rusia yang baik dan Merkel juga memahami budaya Rusia karena masa pendidikan yang pernah ia tempuh di GDR. Meskipun menjalani masa kecil di GDR dengan sistem komunis, namun Merkel tidak memiliki kedekatan dengan Putin seperti halnya kanselir Jerman sebelumnya, Merkel hanya melihat aksinya mengusahakan dialog sebagai tanggung jawab yang memang harus ia lakukan sebagai kanselir Jerman demi menjaga integrasi Uni Eropa. Stefan Meister, selaku praktisi spesialis Eropa Timur pada *Foreign Office* menyatakan bahwa pengaruh Merkel secara personal dalam krisis Ukraina sangat menentukan. Presiden Putin tidak menghiraukan Obama atau pemimpin Uni Eropa lainnya tetapi tetap menjaga kontak dengan Merkel dalam resolusi konflik tersebut.¹³⁷ Merkel sendiri sangat menunjukkan komitmennya dalam resolusi konflik Ukraina, dengan frekuensi yang cukup intensif, tercatat Merkel melakukan kunjungan kenegaraan diantaranya ke Washington, Ottawa, Kyiv, dan Moskow sebelum dimulainya negosiasi Minks yang menghasilkan keputusan gencatan senjata. Dialog via telepon juga dilakukan sebanyak 35 kali sepanjang tahun 2014 sejak terjadinya krisis Ukraina.

Perbedaan pendekatan dalam resolusi konflik yang dilakukan Merkel dan Obama, dimana Obama lebih menekankan pada upaya militer dengan menyediakan pasukan militer dan senjata bagi, Merkel berusaha meyakinkan bahwa hal tersebut

137

justru akan memicu eskalasi konflik sehingga Merkel lebih memilih upaya diplomasi dengan mengusahakan tercapainya gencatan senjata. Meskipun secara personal Merkel dan Putin tidak memiliki hubungan yang intensif, namun perbedaan pendekatan antara Jerman dan Amerika Serikat juga terlihat saat pertemuan NATO di Bucharest tahun 2008, Merkel menghalangi rencana Amerika Serikat yang menawarkan rencana keanggotaan penuh bagi Georgia dan Ukraina pada aliansi militer tersebut karena dianggap akan memicu konfrontasi.¹³⁸

Kesabaran Angela Merkel terlihat di awal keputusan Presiden Yanukovich menolak kerjasama asosiasi ekonomi yang diajukan Uni Eropa dan justru menerima paket bantuan ekonomi dari Rusia. Meskipun Ukraina menolak kerjasama dari Uni Eropa, Merkel menyatakan menghargai keputusan tersebut dan tetap akan menawarkan kesepakatan asosiasi dari Uni Eropa. Merkel tidak melihat keputusan Ukraina tersebut sebagai *postponement*.¹³⁹ Pasca eskalasi konflik yang ditandai dengan aneksasi Krimea, Merkel meminta klarifikasi kepada Putin dan Putin mengakui kejadian tersebut, Merkel melihat bahwa tindakan Rusia sudah melanggar hukum internasional dan menyalahi kedaulatan suatu negara. Meskipun Rusia sudah mengambil tindakan militer, pada saat yang sama Merkel mengunjungi Moskow untuk mendiskusikan krisis Ukraina bersama Putin. Merkel bukanlah sosok yang tidak memperhitungkan keuntungan dan kerugian, aksi Merkel tersebut tentunya penuh dengan resiko bahwa dialog tersebut tidak berhasil. Meskipun saat ini Jerman menjadi negara pasifis yang

¹³⁸ Tuomas Forsberg, 2016, “*From Oastpolitik to ‘frostpolitik’? Merkel, Putin and German Foreign Policy towards Russia*”, 92:1 International Affairs.

¹³⁹ Valentina Pop dan Andrew Rettman, 2013, “*Merkel Criticises Russia on Eve of Vilnius Summit*,” *EU Observer*, diakses melalui <https://euobserver.com/foreign/122264> pada 17 Maret 2016

tidak mengandalkan kekuatan militer, tetapi Jerman masih menempatkan beberapa pasukan militernya dalam aliansi NATO di beberapa negara. Namun, dalam krisis Ukraina Merkel tetap mengupayakan diplomasi sebagai solusi konflik.

Dalam pidatonya di Sydney, Australia, Merkel mengatakan bahwa terjadinya Perang Dunia di tahun 1914 disebabkan oleh gagalnya komunikasi antar elit Eropa yang berujung pada kegagalan diplomasi. Salah satu petikan pidato Merkel berbunyi:

“In 1914, national self-importance and cold-blooded military logic pushed aside responsible politics and diplomacy. In 2014, in contrast, we in Europe is striving to engage in dialogue and find peaceful solutions-no matter how difficult the negotiations may be.”

Komitmen Merkel untuk mengupayakan diplomasi pada krisis Ukraina membuahkan hasil dengan tercapainya perjanjian Minsk.

Merkel dikenal sebagai pemimpin yang teguh pada pendiriannya meskipun harus tidak sejalan dengan apa yang pemimpin negara lain inginkan. Sosok sederhana ini dikenal sebagai pemimpin yang pragmatis, tidak tertarik dengan kekuasaan seperti kekayaan atau hal-hal prestis. Pendidikan dasar sebagai ilmuwan yang Merkel tempuh juga memengaruhi gaya kepemimpinan Merkel sebagai seorang yang rasional, Karakter kuat tersebut menjadikan Merkel seorang figur yang mampu berperan penting dalam krisis internasional saat ini. Merkel juga mendapatkan akuntabilitas politik yang kuat dari masyarakatnya. Salah seorang penulis biografi Merkel, Ralph Bollman, menyatakan bahwa popularitasnya di Jerman dikarenakan Merkel

mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga masyarakat Jerman merasa aman dengan kepemimpinannya.¹⁴⁰

5.3.1 Pernyataan Resmi Angela Merkel terkait Krisis Ukraina

Untuk mengetahui karakteristik pemimpin suatu negara, pernyataan-pernyataan resmi yang dinyatakan pemimpin baik berupa pidato, wawancara, dan lainnya dapat dijadikan referensi dalam penilaian karakter dasar pemimpin tersebut. Dalam menjelaskan karakter Angela Merkel, penulis mengutip beberapa petikan pidatonya terkait upaya diplomasi Jerman pada krisis Ukraina. Berikut tabel yang terdiri dari pernyataan resmi Angela Merkel melalui pidato

Tabel. 3 Pernyataan Angela Merkel terkait Isu Krisis Ukraina

No.	Tanggal	Petikan pernyataan terkait krisis Ukraina
1.	13 Maret 2014 di Bundestag ¹⁴¹	<ul style="list-style-type: none"> “...<i>shameful comparison...[as] Russia’s action in Ukraine undoubtedly represent violation of a fundamental principles of international law. They would not be relativised by other international law violation</i>”.
2	17 November 2014	<ul style="list-style-type: none"> “..<i>we’ve seen that even in Europe there are still forces which refuse to accept the concept of mutual respect...and have disregard for the strength of the law. That’s exactly what happened when Russia flouted international law and annexed Crimea. Russia is violating the territorial integrity and the sovereign of Ukraine.</i>”

¹⁴⁰ The Guardian, “*Ten Reason’s Angela Merkel is the World’s Most Powerful Woman*”, diakses melalui <http://www.theguardian.com/world/2015/jan/07/ten-reasons-angela-merkel-germany-chancellor-world-most-powerful-woman> pada 8 April 2016.

¹⁴¹ Angela Merkel, 2014, “*Policy Statement by Federal Chancellor Angela Merkel on the Situation in Ukraine*,” Press and Information Office of the Federal Government, diakses melalui http://www.bundesregierung.de/Content/EN/Reden/2014/2014-03-13-regierungserklaerung-ukraine_en.html?nn=709674. Pada 20 Maret 2016

3	9 Februari 2015	<ul style="list-style-type: none"> • <i>"For somebody who comes from Europe, I can only say, if we give up this principle of territorial integrity, we will not be able to maintain the peaceful order of Europe....It's essential."</i> • <i>"I, myself, actually would not be able to live without having made this attempt at finding a diplomatic solution"</i>
3	20 Maret 2015, Pidato, Sydney, Australia	<ul style="list-style-type: none"> • <i>"In 1914, national self-importance and cold-blooded military logic pushed aside responsible politics and diplomacy. In 2014, in contrast, we in Europe is striving to engage in dialogue and find peaceful solutions-no matter how difficult the negotiations may be."</i>

Sumber : Hasil olahan penulis dari berbagai sumber

Pidato pertama merupakan pidato sebagai tanggapan resmi pemerintah Jerman sesaat setelah aneksasi yang dilakukan Rusia atas Krimea. Merkel menyatakan bahwa apa yang sudah dilakukan Rusia merupakan pelanggaran yang fatal karena tidak menghargai hukum internasional.

Selanjutnya pada tanggal 17 November 2014, Merkel kembali menjelaskan bahwa ia mengecam perbuatan suatu negara yang melanggar hukum internasional. Merkel mengungkapkan kekecewaan karena masih adanya negara yang bersifat ekspansionis dengan mengambil alih kedaulatan negara lain. Secara jelas, Merkel menyebut Rusia sebagai negara yang ia maksudkan yang telah melanggar kedaulatan negara lain di kawasan Eropa. Dalam pidato tersebut Merkel menekankan bahwa Rusia telah melakukan kesalahan dan kejadian tersebut menjadi perhatian bagi Merkel selaku kanselir Jerman.

Pidato selanjutnya berupa penekanan kembali bahwa pelanggaran atas kedaulatan suatu negara akan merusak tatanan Eropa dan akan menimbulkan dinamika

bagi stabilitas keamanan kawasan. Dari pernyataan Merkel tersebut, terlihat Merkel sangat memperhatikan pentingnya tercapainya stabilitas kawasan. Berbekal pengalaman masa lalu ketika Eropa terpecah pada masa Perang Dunia mengantarkan Merkel menjadi seseorang yang sangat menjunjung tinggi perdamaian yang saat ini sudah dicapai Uni Eropa dalam bentuk integrasi. Merkel menambahkan pada pernyataan kedua bahwa secara personal, ia meletakkan perhatian dan komitmennya pada krisis Ukraina yang menunjukkan kesanggupannya untuk berupaya terlibat dalam resolusi konflik Ukraina melalui upaya diplomasi. Penekanan yang ditunjukkan Merkel selaku repretasi Jerman adalah resolusi konflik yang ia usahakan bukanlah dengan tindakan militer melainkan solusi diplomasi.

Poin tersebut kemudian dipertegas Merkel dalam pidatonya di Australia yang menyatakan bahwa aksi militer sudah tidak relevan dalam penyelesaian konflik antar-negara seperti halnya yang terjadi pada masa perang. Aksi militer dalam sebuah resolusi konflik dipandang akan tetap menimbulkan korban jiwa sehingga Merkel melihat bahwa upaya diplomasi berupa negosiasi dengan pihak berkonflik merupakan solusi yang relevan saat ini. Merkel juga menghimbau masyarakat Eropa dengan menekankan pada pentingnya dialog untuk mencapai solusi damai.

Dengan karakteristik Angela Merkel yang terlihat dalam beberapa pernyataan resminya, dapat dikatakan bahwa pandangan atau persepsi seorang pemimpin merupakan salah satu indikator yang berpengaruh dalam sikap politik Jerman yang mengupayakan resolusi konflik Ukraina melalui dialog pada krisis Ukraina. Pernyataan tersebut juga menunjukkan karakter Merkel yang mengutamakan perdamaian di sisi lain juga tegas terhadap apa yang memang tidak sesuai dengan kesepakatan

internasional. Sikap optimis Merkel juga ditunjukkan dari beberapa pernyataannya untuk tetap mengutamakan dialog pada krisis Ukraina.

Meskipun *Foreign Office* memiliki peran yang signifikan dalam formulasi kebijakan luar negeri, namun sebenarnya kebijakan luar negeri hanya diatur namun tidak diformulasikan oleh *Foreign Office*. Kuatnya pengaruh Kanselir bersama Menteri Luar Negeri melalui pengalaman, keahlian, dan karakter kepemimpinan lah yang menjadi titik poin dalam mengarahkan dan memformulasikan kebijakan luar

Terkait politik luar negeri Jerman berupa adaptasi atas krisis Ukraina yang terjadi di tahun 2013, indikator kepemimpinan yaitu Angela Merkel sangat menentukan pilihan politik Jerman tersebut. Nilai-nilai, pengalaman, serta kepribadian Angela Merkel sangat mempengaruhi bagaimana kemudian Merkel mempersepsikan, mengkalkulasikan, dan menentukan sikap politik Jerman terhadap lingkungan eksternal. Dengan adanya perbedaan karakter kepemimpinan setiap pemimpin, maka orientasi kebijakan luar negeri juga akan tercermin dari pilihan-pilihan yang diambil seorang pemimpin. Dalam hal ini, penulis melihat pola adaptasi dari Angela Merkel terhadap krisis Ukraina di tahun 2013.

Terlahir di Hamburg namun dibesarkan di Jerman Timur membentuk Merkel sebagai pemimpin yang mampu melihat krisis Ukraina dari dua sisi. Dikenal sebagai sosok pragmatis yang mengedepankan nilai-nilai yang ia anut meskipun harus berbeda dengan apa yang masyarakat internasional inginkan. Meskipun Merkel mengedepankan nilai-nilai kebaikan yang dibuktikan dengan upayanya dalam mencapai resolusi konflik tanpa pendekatan militer pada krisis Ukraina, namun sifat

tegas Merkel terlihat ketika ia mampu membedakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Rusia.

Dalam orientasi sikap politiknya terhadap Rusia, Merkel menjadi Kanselir yang berbeda dengan Kanselir sebelumnya. Meskipun dibesarkan di Jerman Timur, nyatanya Merkel tidak memiliki hubungan personal dengan intensitas yang tinggi dengan Presiden Putin. Merkel justru mengurangi kontak dengan Putin dan berbanding terbalik ketika krisis Ukraina terjadi dimana Merkel menjadi pemimpin negara di Uni Eropa yang secara aktif terlibat dalam percakapan telepon intensif tiap minggu dan juga kunjungan kenegaraan. Sejak terjadinya krisis, kunjungan kenegaraan yang dilakukan Merkel merupakan kunjungan pertama kali bagi Merkel di tahun 2013. Meskipun tidak memiliki kedekatan personal dengan Putin, nyatanya intensitas percakapan yang dilakukannya dengan Putin lebih banyak dibanding percakapannya dengan Obama, David Cameron, dan Hollande.¹⁴²

Pribadi Merkel yang dikenal sebagai seorang yang konservatif tercermin dalam sikap politik yang diambil Jerman pada krisis Ukraina. Pilihan Merkel untuk tetap mengedepankan dialog tersebut dikatakan sebagai bentuk *strategic patience*¹⁴³ yang diterapkan Angela Merkel. Merkel secara terus menerus mengupayakan dialog dengan pihak yang berkonflik dengan secara langsung melakukan perjalanan menuju Kiev dan Moskow berturut-turut pada tanggal 5 dan 6 Februari demi tercapainya gencatan

¹⁴² Justin Huggler, 2015, "Angela Merkel takes on world's major crises-Ukraine and Islamic State", The Telegraph, diakses melalui <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/angela-merkel/11396595/Angela-Merkel-takes-on-worlds-major-crises-Ukraine-and-Islamic-state.html> pada 3 Maret 2016

¹⁴³ Konsep ini disebutkan oleh Angela Merkel pada *Munich Security Conference* tanggal 7 Februari 2015. <http://www.bundesregierung.de/Content/De/Mitschrift/Presskonferenzen/2015/02/2015-02-09-merkel-obama.html>

senjata atas aksi kekerasan yang terjadi di Donbass. Upaya Merkel tersebut nyatanya tidak berlangsung lama atau dapat dikatakan gagal akibat keinginan masyarakat pro-Barat untuk segera melengserkan Presiden Yanukovich. Tidak berhenti begitu saja, sifat Merkel yang tetap pada pendirian ditunjukkan dalam wadah negosiasi lain yaitu *Normandy Format*.

Sebelumnya, Merkel memberi syarat pre-kondisi berupa laporan de-eskalasi konflik sebelum bertemu Putin pada pertemuan *Normandy Format*. Latar belakang Merkel yang sebelumnya menjadi ilmuwan dan peneliti membuatnya sangat bergantung pada fakta dan data, dapat mengubah sikapnya dengan secara personal terlibat langsung pada negosiasi *Normandy Format* tanpa menerapkan syarat pre-kondisi tersebut dikarenakan Merkel mendapat fakta baru atas tindakan Rusia yang mensponsori gerakan separatis di bulan Januari. Fakta tersebut mengubah pandangan Merkel bahwa negosiasi tersebut memiliki urgensi yang lebih sehingga mengharuskan Merkel mengambil peran yang lebih besar. Sikap Merkel tersebut menjukkannya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, mengacu pada kegagalan upaya diplomasi Jerman yang dilakukan sebelumnya, maka Merkel merasa perlu memperbaiki dan meningkatkan perannya dalam upaya diplomasi pada krisis Ukraina.

Faktor idiosinkratik yang tercermin pada Merkel berupa nilai-nilai disiplin, tegas, bertanggung jawab dan juga diperkuat dengan keyakinan yang dianutnya. Merkel dibesarkan pada keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai Kristen sebagaimana ayahnya, Horst Kasner, yang berprofesi sebagai Pastur. Faktor lingkungan keluarga tersebut melekat pada bagaimana Merkel menjadi anggota partai CDU bahkan karir politiknya terus menunjukkan hasil positif. Nilai-nilai keyakinan

juga kerap kali Merkel utarakan dalam beberapa kesempatan pidatonya. Merkel percaya bahwa agamanya mengajarkan kebaikan dan hidup berdampingan merupakan esensi penting dalam hidup bernegara. Terbukti dari beberapa kebijakan Merkel yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan seperti pada kasus migran Eropa, beberapa kebijakan domestik yang pro rakyat kecil, dan kebijakan Merkel yang menghapuskan ketimpangan imigran Turki di negaranya. Pada krisis Ukraina sendiri, nilai tersebut mendasari pilihan politik Jerman. Merkel cenderung menghindari konfrontasi dengan Rusia dan menekankan pada pendekatan multilateral dengan tidak menitikberatkan pada aksi militer seperti apa yang diharapkan Amerika Serikat.

Sikap Merkel yang tegas terhadap apa yang ia yakini mengantarkannya menjadi tokoh politik dunia yang diperhitungkan. Dengan berbagai penghargaan yang telah didapat, Merkel semakin memantapkan peran pentingnya dalam perpolitikan dunia. Sejak masa kepemimpinannya di tahun 2005, Merkel tidak begitu antusias dengan perannya di level internasional. Fokus Merkel pada saat itu adalah urusan domestik Jerman.¹⁴⁴

Sumber idiosinkratik Merkel juga dapat dilihat dari pidato yang disampaikan. Karakter Merkel yang tegas terlihat dari petikan pidatonya yang secara lugas menyatakan bahwa Rusia telah melanggar hukum internasional. Persepsi tersebut beberapa kali Merkel ungkapkan pada tiap kesempatan pidatonya mengenai krisis Ukraina. Persepsi dari seorang kanselir dengan pernyataan yang diulang-ulang pada setiap kesempatan tentunya turut membentuk persepsi masyarakat Jerman. Sebagai

¹⁴⁴ Christian Nunlist, 2014, "*More Responsibility: German Foreign Policy in 2014*", CSS Analysis No. 149 hal. 2

hasil, masyarakat Jerman memandang Rusia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas krisis Ukraina.

Tidak ada satupun pemimpin Jerman yang memainkan peran *high profile* pada urusan internasional. Negara yang mengalami isolasionisme selama beberapa dekade, pengalaman NAZI yang menimbulkan trauma bagi masyarakat Jerman, dan berubahnya Jerman menjadi negara pasif dalam aspek militer ternyata dapat mengambil perhatian masyarakat internasional ketika dipimpin oleh Angela Merkel. Merkel sangat mengetahui posisi negaranya di kawasan. Dengan perekonomian yang stabil yang dibuktikan dengan perannya dalam krisis Eropa lalu membuat Merkel menjadi salah satu tokoh *peacemaker*. Masa mudanya di GDR bersama ibunya yang berasal dari Jerman Barat selalu mengatakan bahwa kehidupan di Jerman Barat lebih layak. Hal tersebut tidak membuat Merkel menyesalkan masa kecilnya di GDR, justru masa mudanya di GDR-lah yang membuat Merkel muda menginginkan kehidupan yang bebas dan adil. Pemimpin konservatif ini telah menunjukkan karakter kepemimpinannya dalam upaya diplomasi pada krisis Ukraina yang ia upayakan. Nilai-nilai, pengalaman, karakter, dan prinsip merupakan faktor kepemimpinan yang diadaptasi oleh Jerman dalam merespon krisis Ukraina. Merkel kemudian merespon krisis Ukraina yang terjadi dengan menunjukkan sikap politik yang pragmatis, yaitu walaupun bertentangan dengan berbagai pihak, namun Merkel tetap menjalankan pilihan politik tersebut agar tercapai kepentingan nasional Jerman.

Berdasarkan paparan data dan analisis yang sudah dilakukan pada penjelasan sebelumnya, penulis melihat bahwa setiap aksi politik yang dilakukan subjek politik dalam hal ini negara, memiliki dimensi adaptif. Kajian politik adaptasi ini

memfokuskan pada hubungan antar fenomena pada interaksi antar aksi dan konsekuensinya kepada pembuat kebijakan. Pada penelitian ini dimana Jerman mengupayakan pendekatan diplomasi pada krisis Ukraina terlihat bahwa dinamika politif adaptif Jerman terjadi karena adanya permintaan dari lingkup internal dan eksternal Jerman sehingga Jerman mengupayakan tercapainya keseimbangan antara faktor domestik dan internal melalui kebijakannya.

Orientasi politik luar negeri Jerman pada krisis Ukraina menunjukkan *preservative adaptation* dimana Jerman merespon perubahan yang terjadi pada sumber eksternal dan sumber internal yaitu Jerman bertindak sebagai mediator dalam negosiasi yang dilakukan pada wadah *Normandy Format* untuk kepentingan regional atau dengan kata lain pemerintah Jerman mengusahakan keseimbangan antar prioritas domestik dan eksternal. Pemerintah Jerman melihat kapasitasnya untuk mengakomodasi permintaan baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi eksternal, perluasan isu area dari konflik domestik menjadi konflik regional dengan isu utama pelanggaran hukum internasional dan HAM pada krisis Ukraina yang akan mempengaruhi dinamika keamanan regional menjadi dimensi perubahan yang mendasari sikap Jerman dalam krisis Ukraina. Sedangkan pada sisi internal, akibat adanya aneksasi Krimea oleh Rusia telah mengubah pandangan elit politik pada *Grand Coalition* atas Rusia. Selain itu, adanya peningkatan perhatian masyarakat Jerman terhadap isu internasional dan bagaimana Jerman seharusnya bertindak turut mendasari politik adaptasi yang dilakukan Jerman.

Pada masa kepemimpinan Angela Merkel, Jerman mengadaptasi politik luar negerinya dari yang semula *Business as Usual* pada krisis Russo-Georgia yang terjadi

pada tahun 2008 dimana Jerman tidak menindak tegas aksi Rusia tetapi justru mengutamakan pendekatan ekonomi, pada krisis Ukraina kali ini menunjukkan pola adaptasi dimana Jerman menunjukkan komitmennya untuk mencapai upaya damai pada krisis Ukraina dengan menjadi mediator konflik.

BAB 6

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Kebijakan luar negeri Jerman saat ini mengalami perubahan-perubahan mendasar seiring dengan kondisi pasca reunifikasi yang mendorong Jerman menjadi negara besar dengan perekonomian yang kuat. Dengan kondisi ini, Jerman menghadapi tanggung jawab dalam hubungan dengan masyarakat Eropa dan krisis internasional. Dengan terbukanya arus informasi dan semakin majunya perkembangan pengetahuan, peristiwa yang terjadi di luar batas wilayah dapat dengan mudah diakses masyarakat Jerman. Terlebih, populasi Jerman merupakan masyarakat industri yang sudah mengalami modernisasi sehingga makin terbuka terhadap arus informasi yang berhubungan dengan negaranya. Tingkat partisipasi politik Jerman yang tinggi juga tercermin dalam kesadaran masyarakat akan peran negaranya dan ditunjukkan dengan jajak pendapat sebagai bentuk penyaluran aspirasi yang mereka miliki.

Upaya diplomasi Jerman pada krisis Ukraina menunjukkan Jerman melakukan upaya adaptasi atas perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan internal, eksternal dan juga faktor kepemimpinan. Perubahan tersebut kemudian menuntut Jerman untuk melakukan adaptasi melalui kebijakan luar negerinya agar kepentingan nasional tetap

dapat tercapai. Perubahan-perubahan tersebut merupakan input yang menjadi faktor penting dalam perumusan kebijakan luar negeri.

Untuk menjawab tujuan penelitian, berdasarkan model adaptif milik Rosenau, penulis menarik kesimpulan bahwa sikap politik Jerman yang ditunjukkan dengan upaya diplomasi pada krisis Ukraina merupakan hasil adaptasi dari perubahan-perubahan yang ada. Jerman melakukan upaya adaptasi terhadap lingkungan eksternal berupa meluasnya isu area pada krisis Ukraina sesuai dengan indikator yang disampaikan Rosenau yaitu dengan melakukan upaya negosiasi dalam resolusi krisis Ukraina melalui berbagai inisiatif dialog seperti *Weimar Triangle*, *Normandy Format* hingga menghasilkan kesepakatan Minks. Dari sisi internal, Jerman melakukan adaptasi atas perubahan berupa meluasnya isu krisis Ukraina yang diiringi dengan berubahnya opini publik Jerman atas krisis Ukraina sehingga Jerman dituntut untuk tetap berperan aktif dalam resolusi konflik internasional. Dari sisi pemerintahan juga beradaptasi dengan membangun citra Jerman yang aktif dalam resolusi konflik regional maupun internasional.

Adanya perubahan di lingkungan internal dan eksternal kemudian dipersepsikan oleh pemimpin negara dalam hal ini kanselir Angela Merkel. Pengalaman, sifat, dan karakter kepemimpinan Merkel menentukan bagaimana kebijakan luar negeri Jerman dirumuskan. Pengaruh kuat kanselir sebagai penentu arah politik luar negeri dan juga sebagai eksekutor mencerminkan pentingnya faktor idiosinkratik dari seorang Angela Merkel dalam mempengaruhi pembuat kebijakan dan eksekusi dari kebijakan luar negeri.

6.2. Saran

6.2.1 Secara Teoritik

Model Politik Adaptif milik Rosenau memungkinkan peneliti untuk menyederhanakan fenomena yang rumit melalui penekanan pada variabel-variabel yang terkait. Rosenau menyajikan representasi dari fenomena di lapangan dalam bentuk pilihan-pilihan sederhana agar dapat dengan mudah memahami fenomena. Model ini dapat membantu peneliti mengarahkan penelitian pada fenomena yang akan diteliti sesuai dengan variabel yang sudah ditentukan.

Pada segi analisis kebijakan luar negeri, model ini bersifat menggambarkan bagaimana suatu negara memberikan respon terhadap tantangan atau kesempatan yang ada di lingkungan internal ataupun eksternal. Rosenau memberikan variabel beserta indikator yang sangat rigid dan rinci, mulai dari variabel yang multilevel dan multiperspektif dari level negara, sistem internasional, hingga individu. Sehingga diperlukan bagi peneliti untuk cermat dan memperhatikan referensi terperinci yang didapat guna dapat menempatkan data pada indikator yang seharusnya. Tidak semua indikator yang disajikan Rosenau relevan dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga teknik *clustering* atau pengelompokkan dapat digunakan setelah data terhimpun.

6.2.2. Bagi Peneliti

Kebijakan luar negeri Jerman menjadi sesuatu yang menarik untuk selalu dibahas. Jerman yang sudah membagikan kedaulatannya pada institusi internasional tetapi di saat yang sama kapabilitas Jerman juga terus meningkat, memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Jika penulis melihat politik adaptasi Jerman dalam sebuah krisis internasional maka hal menarik lain yang dapat dilakukan peneliti selanjutnya adalah bagaimana Jerman dapat menghimpun negara-negara Uni Eropa untuk memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia pada krisis Ukraina. Selain itu, hubungan bilateral antara Jerman dan Rusia juga menjadi kajian menarik karena hubungan keduanya yang sangat kuat dan bisa melemah di saat yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A.Mintz & K. J. DeRouen. 2010. *Understanding Foreign Policy Decision Making*, Cambridge: Cambridge University Press.
- B. White. 1989. *Analysing Foreign Policy* dalam M. Clarke, & B. White, *Understanding Foreign Policy: The Foreign Policy Systems Approach* (pp. 1-24). Southampton: The Camelot Press.
- Banyu Perwita, DR. Anak Gunung & Mochammad Yani, DR. Yanyan. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Holsti, K. J. 1988. *Politik Internasional: Kerangka Analisis*. Jakarta: Erlangga.
- Kasali, Rhenal. 2003. *Manajemen Public Relations, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Mas'oed, Mochtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PustakaLP3ES.
- Morgenthau, Hans J. 1962. *Politics Among Nations*. New York: Alfred A Knopf
- N. Peterson. 1977. *Adaptation As a Framework For The Analysis Foreign Policy Behavior*.
- Nye, Joseph S. 2009. *Understanding International Conflict*. New York, USA: Pearson Longman.
- Rosenau, James N. 1981. *The Study of Political Adaptation*. New York, USA: Nichols Publishing Company.
- Rosenau, James N. Boyd, Gavin & Thompson, Kenneth W. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press.

2. Jurnal, Artikel, dan Karya Ilmiah

- Ademoit, Hannes. 2015. *German-Russian Relations: Change of Paradigm versus 'Business as Usual'*. France: Ifri
- Bachrach, Peter & Morton. S. Baratz. 2012. *Power and Its Two Faces Revisited: A Reply to Geoffrey Debnam* dalam Igor Kovac, *The Power Structure of The Post Cold War International System*. Ljubljana. Hal. 29
- Berdick, Annegret. 2015. *The 2014 Review: Understanding the Pillars of German Foreign Policy and the Expectations of the rest of the World*. SWP Berlin: Working Paper RD EU.
- Budjeryn, Mariana. *The Breach Ukraine's Territorial Integrity and the Budapest Memorandum*, Wilson Center, Washington: NPIHIP.

- Buhbe, Matthes. 2007. *The Main Features of a German Strategy towards Russia*. Friedrich Ebert Stiftung.
- Cox, Michael. 2012. *Power Shifts, Economic Change and the Decline of the West?*, London: Sage Publication.
- Chronology of EU Sanctions against Russia in 2014* . Diakses melalui <http://www.turkishweekly.net/files/other/JmKcLj43aB3PNVFXlz6lK3TvS0egAh.pdf> (Diakses pada 3 Desember 2015)
- European Union Committee. 2015. *The EU and Russia: Before and Beyond the Crisis in Ukraine*, London: Authority of House of Lords.
- Federal Statistical Office. 2009. *Germany's Population by 2060*, Wiesbaden: Federal Statistical Office.
- Fix, Liana dan Anna-Lena Kirch. 2016. *Germany and The Eastern Partnership after Ukraine Crisis*, Brussels: IFRI.
- Forsbeg, Tuomas. 2016. "From Oastpolitik to 'frostpolitik'? Merkel, Putin and German Foreign Policy towards Russia", 92:1 International Affairs.
- Gotz, Roland. 2007, *Germany and Russia Strategic Partnership*. Geopolitical Affairs.
- Gromadzki, Grzegorz. 2015. *Perception of the Russia-Ukraine conflict in Germany and in Poland – an evaluation*. Warsaw: Heinrich Boll Foundation.
- Iwanski, Tadeusz. 2015 *Russian Policy towards Ukraine: Not Just Crimea*. OSW
- Kearens, Heggy. 2012. *Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Indonesia: Kebijakan Kontra Terorisme Pasca Serangan Bom Bali I*. Diakses melalui <http://lontar.ui.ac.id/file?file?=digital/20299886-T30458-Heggy%2Kearens-pdf>. (Diakses pada 10 Oktober 2015)
- Kreft, Anne-Kathrin. 2010. *The weight of history: change and continuity in German foreign policy towards the Israeli-Palestinian*, WWU Masters Thesis Collection.
- Kucharczyk, Jacek. 2015. *Close together or far apart? Poles, Germans and Russians on the Russia-Ukraine Crisis*. Institute of Public Affairs European Program.
- Kwiatkowska-Drosdz, Anna & Konrad Poplawski. 2014. *The German Reaction to the Russian-Ukrainian conflict – Shock and Disbelief*. OSW.
- Lane, Charles. 1995. *Germany's New Ostpolitik*, New York: Council on Foreign Relations NY diakses melalui <http://search.proquest.com/docview/214230804?accountid=46437> pada 15 Februari 2016.
- Meister, Stefan. 2014. *Reframing Germany's Russia Policy-An Opportunity for The EU*. European Council on Foreign Relations.
- Neack, Laura. *The New Foreign Policy: Power Seeking in A Globalization Era*. United States: The Row man & Littlefield Publishing Group.

- Nunlist, C. 2014. *More Responsibility? German Foreign Policy in 2014*. CSS Analysis in Security Policy No. 149.
- Schweers, Philipp. 2008. *Still a Civilian Power?*. DIAS-Analyse.
- Trenin, Dmitri. 2014 *The Ukraine Crisis and the Resumption of Great power Rivalry*, Moskow: Carnegie Moscow Center.

3. Website

- Barkin, Noah. 2014. *Germany's Russian rethink: How Merkel lost faith in Putin*. Diakses melalui <http://reuters.com/article/idUSBREA2J15720140320> (Diakses pada 5 Oktober 2015)
- BBC. 2014. *Ukraine Crisis in Map*. Diakses melalui <http://www.bbc.com/news/world-europe-27308526> (Diakses pada 18 Februari 2015).
- Briney, Amanda. 2014. *Geography of Germany*, diakses melalui <http://geography.about.com/od/germanymaps/a/germany-geography.htm> pada 1 April 2016.
- Buzzelli, Susan. 2011. *Smell the Roses: Germany's Flora and Fauna*, diakses melalui <http://zeitguidegermany.com/2011/03/germanys-flora-fauna/> pada 1 April 2016
- Council of the European Union 2013, "*Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Vilnius, 28–29 November 2013: Eastern Partnership; The Way Ahead.*" Council of the European Union, diakses melalui http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/139765.pdf. pada 21 Maret 2016 hal.3
- Federal Foreign Office. 2016. "*Human Rights Policy*", diakses melalui http://auswaertiges-amt.de/sid_94779453949AA811895AB5FE18968CFD/EN/Aussenpolitik/Menschrechte.html pada 13 April 2016.
- Federal German Ministry of Justice and Customer Rights. 2012. *Basic Law for the Federal Republic of Germany* versi revisi yang diterbitkan oleh Federal Law Gazette dan diamandement pada 11 July 2012, *Federal Law Gazette I*, article 32.
- Conradt, David P. 2015. *Christian Democratic Union* diakses melalui <http://www.britannica.com/topic/Christian-Democratic-Union-political-party-Germany> pada 26 Desember 2015
- Global Fire Power. 2016. *Germany Military Strength*, diakses melalui http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=germany pada 20 April 2016.

- Holland, Steve dan Roberta Rampton, 2014, “*Obama, Germany’s Merkel discuss potential resolution to Ukraine crisis*”, Reuters, diakses melalui <http://reuters.com/article/idUSBREA2401N20140305> pada 20 April 2016.
- Huggler, Justin. 2015. *Angela Merkel takes on world’s major crises-Ukraine and Islamic State*. The Telegraph. diakses melalui <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/angela-merkel/11396595/Angela-Merkel-takes-on-worlds-major-crises-Ukraine-and-Islamic-state.html> pada 3 Maret 2016
- Husna, Rida. 2016. *Germany Balance of Trade*, diakses melalui <http://www.tradingeconomics.com/balance-of-trade> pada 17 Februari 2016
- Kershaw, Tom 2012, “*The Religion and Political views of Angela Merkel*”, diakses melalui <http://hollowverse.com/angela-merkel/> pada 8 Maret 2016
- Kirschbaum, Erik. *Russia sanctions will hurt German economy but needed – Vice Chancellor*. Diakses melalui <http://reuters.com/article/idUKKBN0G30CL20140803?irpc=932> (Diakses pada 20 Juli 2015).
- Kovac, Igor. 2012. *The Power Structure of The Post Cold War International System*, Ljubljana, diakses melalui http://www.academia.edu/8353379/THE_POWER_STRUCTURE_OF_THE_POST_COLD_WAR_INTERNATIONAL_SYSTEM pada 2 April 2016.
- Merkel, Angela. 2014. *Chancellor Merkel outlines German Position ahead of EU Summit in Crimea*. Diakses melalui <http://www.dw.com/en/merkel-speech-to-bundestag-outlines-sanctions-on-russian-leaders-over-crimea/av-17510408>. (Diakses pada 21 Desember 2015)
- Merkel, Angela. 2014, “*Policy Statement by Federal Chancellor Angela Merkel on the Situation in Ukraine,*” Press and Information Office of the Federal Government, diakses melalui http://www.bundesregierung.de/Content/EN/Reden/2014/2014-03-13-regierungserklaerung-ukraine_en.html?nn=709674. Pada 20 Maret 2016
- Merkel, Angela, 2015. pada *Munich Security Conference* tanggal 7 Februari 2015. (Diakses melalui <http://www.bundesregierung.de/Content/De/Mitschrift/Presskonferenzen/2015/02/2015-02-09-merkel-obama.html> pada 10 Maret 2016
- Moravcsik, Andrew. Review *Germany, Russia, and the Rise of Geo-Economics; The Paradox of German Power*. Diakses melalui

<https://www.foreignaffairs.com/reviews/2015-08-13/germany-russia-and-rise-geo-economics-paradox-german-power> (Diakses pada 24 Desember 2015).

Paet, Urmas. 2015. *The Ukraine crisis is a threat to Europe's security architecture*, Europe's World, diakses melalui <http://europesworld.org/2015/06/24/ukraine-crisis-threat-europes-security-architecture/#.VzTqGchXesM> pada 11 April 2016

Petrou, Michael. 2015, "How the reluctant German Chancellor become the one person capable of stopping Putin and saving Europe", diakses melalui <http://www.macleans.ca/politics/angela-merkel-the-real-leader-of-the-free-world> pada 11 Maret 2016

Pew Research Center. 2015. *Germany and the United States: Reliable Allies*. Pew Research Center: Global Attitudes and Trends, <http://www.pewglobal.org/2015/05/07/germany-and-the-united-states-reliable-allies/>. Diakses pada 30 Maret 2016.

Pop, Valentina dan Andrew Rettman, 2013, "Merkel Criticises Russia on Eve of Vilnius Summit," *EU Observer*, diakses melalui <https://euobserver.com/foreign/122264> pada 17 Maret 2016

Speck, U. 2015. *Stopping Putin: Can Merkel Succeed without Force?*. Diakses melalui <https://www.newsweek.com/stopping-putin-can-merkel-succeed-without-force-319086> (Diakses pada 28 Agustus 2015)

Spiegel, A *High Price for German Business*. Diakses melalui <http://spiegel.de/international/europe/a-959019.html> (Diakses pada 20 Juli 2015)

Sussmuth, Rita. 2009. *The Future of Migration and Integration Policy in Germany*. Migration Policy Institute, diakses melalui <http://migrationpolicy.org/research/future-migration-and-integration-policy-germany> pada 1 Mei 2016.

The Global Power Structure, Norms and the Future of the Liberal International Order", diakses melalui <http://gt2030.com/2012/06/06/the-global-power-structure-norms-and-the-future-of-the-liberal-international-order> pada 15 April 2016

Traynor, Ian. *Ukraine Crisis: Any EU Sanctions are Unlikely to Make Impression to Putin*. Diakses melalui <http://theguardian.com/world/2014/mar/05/ukraine-crimea-crisi-eu-sanctions-impressions-putin> (Diakses pada 2 September 2015)

- UN News Center. *Persistent and Grave Human Rights Violations in Eastern Ukraine-UN Report*, diakses melalui <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID+51016> pada 20 April 2016.
- Vinocur, John. 2015. *Germany Falls Out of Love with America*. Wall Street Journal, diakses melalui <http://www.wsj.com/articles/germany-falss-out-of-love-with-america-1433187158> pada 11 April 2016.
- VOA. 2015. *Obama, Merkel for Diplomacy in Ukraine Crisis*, diakses melalui <http://www.voanews.com/content/german-chancellor-to-hold-talks-monday-with-obama-on-ukraine/2634472.html> pada 8 Maret 2016
- Weather Online. *Germany*, diakses melalui <http://www.weatheronline.co.uk/reports/climate/Germany.htm> pada 1 April 2016.
- Werbowski, M. *Germany's Dominant Role in European Union*. Diakses melalui <http://www.globalresearch.ca/germanys-dominant-role-in-the-european-union/5326785> (Diakses pada 5 November 2015)
- World Bank. 2014. *Ukraine Economic Update*, diakses melalui <http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/ukraine/ua-macro-april-2014-en.pdf>. pada 20 Maret 2016
- Worldometers. *Germany Population*, diakses melalui <http://www.worldometers.info/world-population/germany-population> pada 3 April 2016.

